

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 40 TAHUN 2015
 TENTANG
 KODE REKENING APBD TAHUN ANGGARAN 2016

A. KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1			URUSAN WAJIB
1	01		Pendidikan
1	01	01.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	02		Kesehatan
1	02	01.	Dinas Kesehatan
1	02	02.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau
1	03		Pekerjaan Umum
1	03	01.	Dinas Bina Marga dan Pengairan
1	03	01.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1	06		Perencanaan Pembangunan
1	06	01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	07		Perhubungan
1	07	01.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
1	08		Lingkungan Hidup
1	08	01.	Kantor Lingkungan Hidup
1	10		Kependudukan dan catatan sipil
1	10	02.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	11	02.	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1	15	02.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
1	16		Penanaman Modal
1	16	02.	Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	17		Kebudayaan
1	17	03.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1	19	03.	Satuan Polisi Pamong Praja
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
1	20	01.	DPRD
1	20	02.	KDH & WKDH
1	20	03.	Sekretariat Daerah
1	20	04.	Sekretariat DPRD
1	20	05.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	20	06.	Badan Kepegawaian Daerah
1	20	07.	Inspektorat Kabupaten
1	20	08.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	20	09.	Kecamatan Putussibau Utara
1	20	10.	Kecamatan Putussibau Selatan
1	20	11.	Kecamatan Bika
1	20	12.	Kecamatan Kalis
1	20	13.	Kecamatan Embaloh Hilir
1	20	14.	Kecamatan Embaloh Hulu
1	20	15.	Kecamatan Bunut Hilir
1	20	16.	Kecamatan Boyan Tanjung
1	20	17.	Kecamatan Bunut Hulu
1	20	18.	Kecamatan Mentebah
1	20	19.	Kecamatan Jongkong
1	20	20.	Kecamatan Pengkadan
1	20	21.	Kecamatan Hulu Gurung
1	20	22.	Kecamatan Selimbau

1	20	23.	Kecamatan Badau
1	20	24.	Kecamatan Batang Lupar
1	20	25.	Kecamatan Empanang
1	20	26.	Kecamatan Puring Kencana
1	20	27.	Kecamatan Semitau
1	20	28.	Kecamatan Suhaid
1	20	29.	Kecamatan Seberuang
1	20	30.	Kecamatan Silat Hilir
1	20	31.	Kecamatan Silat Hulu
1	20	32.	Kelurahan Putussibau Kota
1	20	33.	Kelurahan Hilir Kantor
1	20	34.	Kelurahan Kedamin Hilir
1	20	35.	Kelurahan Kedamin Hulu
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa
1	22	01.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2			URUSAN PILIHAN
2	01		Pertanian
2	01	05.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
2	01	07.	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
2	03		Energi dan Sumberdaya Mineral
2	03	01.	Dinas Pertambangan dan Energi
2	05		Kelautan dan Perikanan
2	05	02.	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	08		Ketransmigrasian
2	08	02.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

B. KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN
01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
01.04.	Penyediaan Jasa Jaminaan Pemeliharaan Kesehatan PNS
01.05.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
01.08.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01.14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
01.19.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
01.20.	Pembinaan Kemasyarakatan
01.21.	Penyediaan Jasa Penilaian Angka kredit
01.22.	Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Formal
01.23.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
01.24.	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
01.25.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
01.26.	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
01.27.	Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
01.28.	Pelayanan Ketatausahaan Personel di Lingkungan SKPD
01.29.	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas
01.30.	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
01.31.	Penyusunan RKA dan DPA
01.32.	Penyediaan Perlengkapan Informasi dan Dokumentasi
01.33.	Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas Nakertransos
01.34.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Hortikultura
01.35.	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI
01.36.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
01.37.	Penunjang Kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian
01.38.	Penyusunan Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa
01.39.	Penyediaan Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan
01.40.	Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah
01.41.	Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Telekomunikasi Daerah
01.42.	Minotoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas

01.44.	Pemuktahiran Data Infrastruktur di Kab. Kapuas Hulu
01.45.	Penataan Dokumen Kepagawaian PNSD Kabupaten Kapuas Hulu
01.46.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau
01.47.	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Propinsi Kalbar
01.48.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah
01.49.	Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Rutin SKPD
01.50.	Monitoring Perkembangan Kependudukan
01.51.	Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Kepala Desa dan Sekretaris Desa
01.52.	Penyediaan Dana Operasional Pendidikan UPT Dinas pendidikan POR di Kecamatan - kecamatan
01.54.	Rapat Kerja Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
01.55.	Pemeliharaan dan Updating Web Site
01.59.	Sosialisasi dan Implementasi PP 46 Tahun 2011 (Penyusunan Sasaran Kerja PNS)
01.60.	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum
01.61.	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
01.62.	Pembuatan Website SKPD
01.63.	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan kebijakan layanan Publik
01.64.	Monitoring Pelaksanaan ADD
01.65.	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Festival Budaya daerah
01.66.	Penyediaan Jasa Publikasi
01.67.	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
01.68.	Pengadaan Sarana Kehutanan Kab. kapuas Hulu
01.69.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh kehutanan
01.70.	Penyusunan Pemuktahiran Data Pegawai
01.71.	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
01.72.	Penyediaan Jasa Tim Pengadaan Barang dan Jasa
01.73.	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan
01.74.	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Festival Budaya
01.75.	Penerbitan Buletin Kepegawaian
01.76.	Penyusunan Nominatif Pegawai dan DUK
01.77.	Pelaksanaan Admin TEPPA / Monev Online dan Admin Sirup SKPD
01.78.	Penataan Pegawai Negeri Sipil
01.79.	Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
01.80.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
01.81.	Penataan dan Publikasi Produk Hukum
02.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.01.	Pembangunan Rumah Jabatan
02.02.	Pembangunan Rumah Dinas
02.03.	Pembangunan Gedung Kantor
02.04.	Pengadaan Mobil Jabatan
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
02.06.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
02.08.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
02.10.	Pengadaan Mebeleur
02.11.	Pengadaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.12.	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
02.13.	Pengadaan Buku/Perpustakaan

02.18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah jabatan
02.19.	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
02.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan / Dinas
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
02.29.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
02.30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum
02.31.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
02.32.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan
02.33.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Umum Pemerintah
02.34.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Bercorak Kebudayaan
02.35.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Terminal, Pos IPJ dan Dermaga
02.36.	Pengadaan Fasilitas Tempat Tinggal
02.37.	Pembangunan Garasi/Tempat Penyimpanan Speedboat
02.40.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
02.41.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
02.43.	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
02.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
02.45.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Fasilitas Umum
02.47.	Peningkatan Sarana dan Prasarana PLKB
02.48.	Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)
02.49.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Praja
02.50.	Pengadaan Mobil Samsat Keliling
02.51.	Penyediaan Peralatan Layanan Digital
02.53.	Pembangunan Mess Dinas Pendidikan
02.65.	Penyediaan Fasilitas Rumah Jabatan
02.66.	Peningkatan Sarana dan Prasarana PLKB
02.67.	Pemeliharaan Perangkat Jaringan Pendidikan Nasional
02.68.	Pengadaan Sarana Kehutanan kab. kapuas Hulu
02.69.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan kehutanan
02.70.	Pembangunan Garasi Mobil KIR
02.71.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan
02.72.	Pemeliharaan Digital Society
02.73.	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor
02.74.	Rehab Ringan Gedung LPSE
02.75.	Rehab Ringan Gedung Radio
02.76.	Pembangunan Gedung Arsip Kantor DISHUBKOMINFO
02.77.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
02.78.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Mess Guru
02.79.	Pemeliharaan Rutin/BerkalaLingkungan Kebun Entrys
02.80.	Pembangunan Mess Penyuluh

03.	Peningkatan Disiplin Aparatur
03.01.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
03.03.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
03.04.	Pengadaan Pakaian KORPRI
03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
03.06.	Pengadaan Pakaian POLHUT
03.07.	Pengadaan Pakaian Dalkarhutla
04.	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
04.01.	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
04.02.	Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam melaksanakan Tugas
04.03.	Pemindahan Tugas PNS
05.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal
05.02.	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
05.04.	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
05.05.	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
05.06.	Bimbingan Teknis Administrasi Sekretaris Desa se-kabupaten Kapuas Hulu
05.07.	Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa
05.08.	Diklat Teknis Pembentukan Auditor
05.09.	Pelaksanaan Rapat Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian
05.10.	Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama
05.11.	Pengevaluasian Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kapuas Hulu
05.12.	Bimtek Penulisan Karya Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik
05.13.	Fasilitasi Penilaian Pemberian penghargaan Citra pelayanan Prima
05.14.	Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
05.16.	Diklat Teknis Kehumasan, Dokumentasi dan Informasi
05.17.	Bimtek Penyusunan Standart Operating Prosedure (SOP)
05.18.	Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP kecamatan
05.19.	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan
05.21.	Bimbingan Teknis Pengelolaan PPID dan Informasi
05.23.	Pelatihan Tenaga Laboran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu di Laboratorium UPMPJK
05.26.	Diklat Pembentukan Auditor
05.28.	Sosialisasi PPID di Kab. Kapuas Hulu
05.29.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
05.30.	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Aset Daerah
05.31.	Study Pembelajaran Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Administrasi Kecamatan
05.32.	Sosialisasi Protokoler
05.33.	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Pendapatan
05.36.	Sosialisasi ULP Kabupaten Kapuas Hulu
05.37.	Diklat Persiapan Purna Tugas
05.39.	Pelatihan Perancangan Campuran Aspal-Agregat
05.40.	Biaya Diklat PPNS
05.41.	Peringatan HUT Polisi pamong Praja dan Raker Trantibum
05.42.	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Inventaris Barang Puskesmas
05.43.	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) bagi Paramedis

05.44.	Pelaksanaan Pelatihan Aparat Desa
05.46.	Bimbingan Teknis Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD
05.47.	Peningkatan Wawasan Sumber Daya Aparatur PNS Bidang Koperasi dan UKM
05.48.	Diklat Aparatur Pembina Koperasi dan UKM
05.50.	Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan UPT
05.51.	Pelatihan Tenaga Laboratorium DBMP Kab. Kapuas Hulu
05.52.	Penataan Sistem Informasi Kinerja
05.53.	Diklat Aparatur Pembina Koperasi dan UKM
05.54.	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Inventaris Barang Puskesmas
05.56.	Diklat Aparatur Pembina Bidang Perdagangan
05.57.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
05.58.	Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
05.59.	Diklat Aparatur UPT-PPD
05.60.	Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS
05.61.	Sosialisasi Elektronik Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (E-PUPNS)
05.62.	Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas
05.63.	Peningkatan Wawasan Sumber Daya Aparatur PNS Bidang Perdagangan
06.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
06.03.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
06.05.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
06.06.	Penyusunan jurnal dan Buku Besar
06.07.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD
06.08.	Finalisasi Laporan Keuangan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK khusus Sekretariat Daerah
06.09.	Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Kapuas Hulu
06.10.	Penyusunan LAKIP Kabupaten Kapuas Hulu
06.12.	Penyusunan RENSTRA SKPD
06.14.	Penyusunan Jurnal dan Buku Besar SKPD
06.15.	Penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD
06.16.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
06.17.	Penyusunan Data Base Pertanian
06.18.	Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu
06.19.	Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
06.20.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Proyek pembangunan di Kab. Kapuas Hulu
06.21.	Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan SKPD
06.22.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
06.23.	Penyelenggaraan Administrasi Penggajian PNS Kab. Kapuas Hulu
06.24.	Penyusunan Profil Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
06.25.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
06.26.	Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
06.27.	Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi DAK
06.28.	Penyusunan FHO dan PHO
06.29.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan
06.30.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
06.31.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
06.32.	Penyusunan Data Potensi Wilayah (Monografi) dan Programa Penyuluhan Pertanian

06.33.	Penyusunan Restatement Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2014
06.34.	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
06.35.	Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Instansi
06.36.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
06.37.	Penyusunan Data Base Inventarisasi Barang SKPD
06.38.	Penyusunan Rencana Tindakan Pengendalian SPIP
06.39.	Pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan
06.40.	Asistensi Penyusunan Rencana Kebutuhan Tenaga ASN
06.41.	Penyusunan Laporan Akuntansi dan Laporan Tahunan
06.42.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD
06.43.	Pemantauan dan pengendalian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pembangunan
06.44.	Penyusunan Rencana Strategis Pengendalian Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu
06.45.	Penyusunan SOP Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu
06.46.	Penyelenggaraan Penyusunan Profil Kecamatan
06.47.	Penyusunan Laporan Tahunan
06.48.	Pemantauan dan Pengendalian Program Kerja Bidang
06.49.	Penyelenggaraan Penyusunan Profil Kecamatan/Desa/Kelurahan
06.50.	Pendukung Kegiatan Majelis TP-TGR Kabupaten Kapuas Hulu
06.51.	Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang/Aset SKPD
06.52.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah
06.53.	Penyusunan Bazetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD
06.54.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
06.55.	Penyusunan Bazzeting PNS dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah
06.56.	Penyusunan Informasi Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah
06.57.	Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
06.58.	Penyusunan Matrik Renja SKPD
06.59.	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
06.60.	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah
06.61.	Pengadaan dan Implementasi Komputerisasi SIM Perjalanan Dinas
06.62.	Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan
06.63.	Review Hasil Analisis Jabatan
06.64.	Penyusunan Pedoman Uraian Jabatan
06.65.	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Dinas
06.66.	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu
06.67.	Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA-BLU)
06.68.	Penyusunan Komputerisasi Inventarisasi Barang dan Pengelolaan Aset
06.69.	Penyusunan Komputerisasi Manajemen Kepegawaian
06.70.	Penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Inventarisasi Kawasan Kumuh
06.71.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha Kekayaan
06.72.	Penyusunan Pelaporan Keuangan triwulan I dan Triwulan III SKPD tahun 2014 dan Rekonsiliasi Data SKPD
06.73.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama
06.74.	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan
06.75.	Pengembangan Data Karier Pegawai
06.76.	Pendataan Aset/Barang Milik Negara
06.77.	Penyempurnaan Data Aset SKPD
06.78.	Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kab. Kapuas Hulu
06.79.	Penyusunan Standar dan Prasarana Kerja Aparatur
06.80.	Inventarisasi Data Pembangunan
06.81.	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu

06.82.	Penataan Sistem Informasi Kinerja
06.83.	Inventarisasi Aset Jembatan dan Irigasi
06.84.	Penyusunan Profil Pendidikan
06.85.	Penyusunan Laporan Administrasi Realisasi Aset
06.86.	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan SKPD
06.87.	Penyusunan Inventarisasi Barang dan Pengelolaan Aset SKPD
06.88.	Penyusunan RPIJM SKPD
06.89.	Penyusunan Standar Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
06.90.	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab. Kapuas Hulu
06.91.	Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
06.92.	Study Pembelajaran Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Administrasi Kecamatan
06.93.	Perhelangan/Penjualan Barang Inventarisasi Alat-alat berat Milik Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu
06.94.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
06.95.	Penyusunan Stok Opname Obat-obatan
06.97.	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program SKPD
06.99.	Fasilitasi dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa
07.	Peningkatan Perdagangan dan Investasi di Dalam Negeri
07.01.	Promosi Produk Hasil Pertambangan Daerah dan Energi
08.	Peningkatan Pembinaan Terhadap Pemberdayaan perempuan
08.01.	Pembinaan PKK, Wanita Tani dan P2WKSS
08.02.	Pendukung Kegiatan Dharma Wanita Persatuan SKPD
01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
01.04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
01.05.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
01.08.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01.14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
01.19.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
01.20.	Pembinaan Kemasyarakatan
01.21.	Penyediaan Jasa Penilaian Angka kredit
01.22.	Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Formal
01.23.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
01.24.	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
01.25.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan

01.26.	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
01.27.	Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
01.28.	Pelayanan Ketatausahaan Personel di Lingkungan SKPD
01.29.	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas
01.30.	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
01.31.	Penyusunan RKA dan DPA
01.32.	Penyediaan Perlengkapan Informasi dan Dokumentasi
01.33.	Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas Nakertransos
01.34.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Hortikultura
01.35.	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI
01.36.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
01.37.	Penunjang Kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian
01.38.	Penyusunan Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa
01.39.	Penyediaan Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan
01.40.	Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah
01.41.	Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Telekomunikasi Daerah
01.42.	Minotoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas
01.44.	Pemuktahiran Data Infrastruktur di Kab. Kapuas Hulu
01.45.	Penataan Dokumen Kepagawaian PNSD Kabupaten Kapuas Hulu
01.46.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau
01.47.	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Propinsi Kalbar
01.48.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah
01.49.	Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Rutin SKPD
01.50.	Monitoring Perkembangan Kependudukan
01.51.	Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Kepala Desa dan Sekretaris Desa
01.52.	Penyediaan Dana Operasional Pendidikan UPT Dinas pendidikan POR di Kecamatan - kecamatan
01.54.	Rapat Kerja Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
01.55.	Pemeliharaan dan Updating Web Site
01.59.	Sosialisasi dan Implementasi PP 46 Tahun 2011 (Penyusunan Sasaran Kerja PNS)
01.60.	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum
01.61.	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
01.62.	Pembuatan Website SKPD
01.63.	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan kebijakan layanan Publik
01.64.	Monitoring Pelaksanaan ADD
01.65.	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Festival Budaya daerah
01.66.	Penyediaan Jasa Publikasi
01.67.	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
01.68.	Pengadaan Sarana Kehutanan Kab. kapuas Hulu
01.69.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh kehutanan
01.70.	Penyusunan Pemuktahiran Data Pegawai
01.71.	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
01.72.	Penyediaan Jasa Tim Pengadaan Barang dan Jasa
01.73.	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan
01.74.	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Festival Budaya
01.75.	Penerbitan Buletin Kepegawaian
01.76.	Penyusunan Nominatif Pegawai dan DUK
01.77.	Pelaksanaan Admin TEPPA / Monev Online dan Admin Sirup SKPD
01.78.	Penataan Pegawai Negeri Sipil
01.79.	Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil

01.80.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
01.81.	Penataan dan Publikasi Produk Hukum
02.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.01.	Pembangunan Rumah Jabatan
02.02.	Pembangunan Rumah Dinas
02.03.	Pembangunan Gedung Kantor
02.04.	Pengadaan Mobil Jabatan
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
02.06.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
02.08.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
02.10.	Pengadaan Mebeleur
02.11.	Pengadaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.12.	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
02.13.	Pengadaan Buku/Perpustakaan
02.18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah jabatan
02.19.	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
02.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan / Dinas
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
02.29.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
02.30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum
02.31.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
02.32.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan
02.33.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Umum Pemerintah
02.34.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Bercorak Kebudayaan
02.35.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Terminal, Pos IPJ dan Dermaga
02.36.	Pengadaan Fasilitas Tempat Tinggal
02.37.	Pembangunan Garasi/Tempat Penyimpanan Speedboat
02.40.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
02.41.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
02.43.	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
02.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
02.45.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Fasilitas Umum
02.47.	Peningkatan Sarana dan Prasarana PLKB
02.48.	Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)
02.49.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Praja
02.50.	Pengadaan Mobil Samsat Keliling
02.51.	Penyediaan Peralatan Layanan Digital
02.53.	Pembangunan Mess Dinas Pendidikan

02.65.	Penyediaan Fasilitas Rumah Jabatan
02.66.	Peningkatan Sarana dan Prasarana PLKB
02.67.	Pemeliharaan Perangkat Jaringan Pendidikan Nasional
02.68.	Pengadaan Sarana Kehutanan kab. kapuas Hulu
02.69.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan kehutanan
02.70.	Pembangunan Garasi Mobil KIR
02.71.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan
02.72.	Pemeliharaan Digital Society
02.73.	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor
02.74.	Rehab Ringan Gedung LPSE
02.75.	Rehab Ringan Gedung Radio
02.76.	Pembangunan Gedung Arsip Kantor DISHUBKOMINFO
02.77.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
02.78.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Mess Guru
02.79.	Pemeliharaan Rutin/BerkalaLingkungan Kebun Entrys
02.80.	Pembangunan Mess Penyuluh
03.	Peningkatan Disiplin Aparatur
03.01.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
03.03.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
03.04.	Pengadaan Pakaian KORPRI
03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
03.06.	Pengadaan Pakaian POLHUT
03.07.	Pengadaan Pakaian Dalkarhutla
04.	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
04.01.	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
04.02.	Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam melaksanakan Tugas
04.03.	Pemindahan Tugas PNS
05.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal
05.02.	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
05.04.	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
05.05.	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
05.06.	Bimbingan Teknis Administrasi Sekretaris Desa se-kabupaten Kapuas Hulu
05.07.	Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa
05.08.	Diklat Teknis Pembentukan Auditor
05.09.	Pelaksanaan Rapat Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian
05.10.	Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama
05.11.	Pengevaluasian Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kapuas Hulu
05.12.	Bimtek Penulisan Karya Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik
05.13.	Fasilitasi Penilaian Pemberian penghargaan Citra pelayanan Prima
05.14.	Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
05.16.	Diklat Teknis Kehumasan, Dokumentasi dan Informasi
05.17.	Bimtek Penyusunan Standart Operating Prosedure (SOP)
05.18.	Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP kecamatan

05.19.	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan
05.21.	Bimbingan Teknis Pengelolaan PPID dan Informasi
05.23.	Pelatihan Tenaga Laboran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu di Laboratorium UPMPJK
05.26.	Diklat Pembentukan Auditor
05.28.	Sosialisasi PPID di Kab. Kapuas Hulu
05.29.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
05.30.	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Aset Daerah
05.31.	Study Pembelajaran Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Administrasi Kecamatan
05.32.	Sosialisasi Protokoler
05.33.	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Pendapatan
05.36.	Sosialisasi ULP Kabupaten Kapuas Hulu
05.37.	Diklat Persiapan Purna Tugas
05.39.	Pelatihan Perancangan Campuran Aspal-Agregat
05.40.	Biaya Diklat PPNS
05.41.	Peringatan HUT Polisi pamong Praja dan Raker Trantibum
05.42.	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Inventaris Barang Puskesmas
05.43.	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) bagi Paramedis
05.44.	Pelaksanaan Pelatihan Aparat Desa
05.46.	Bimbingan Teknis Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD
05.47.	Peningkatan Wawasan Sumber Daya Aparatur PNS Bidang Koperasi dan UKM
05.48.	Diklat Aparatur Pembina Koperasi dan UKM
05.50.	Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan UPT
05.51.	Pelatihan Tenaga Laboratorium DBMP Kab. Kapuas Hulu
05.52.	Penataan Sistem Informasi Kinerja
05.53.	Diklat Aparatur Pembina Koperasi dan UKM
05.54.	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Inventaris Barang Puskesmas
05.56.	Diklat Aparatur Pembina Bidang Perdagangan
05.57.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
05.58.	Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
05.59.	Diklat Aparatur UPT-PPD
05.60.	Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS
05.61.	Sosialisasi Elektronik Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (E-PUPNS)
05.62.	Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas
05.63.	Peningkatan Wawasan Sumber Daya Aparatur PNS Bidang Perdagangan
06.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
06.03.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
06.05.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
06.06.	Penyusunan jurnal dan Buku Besar
06.07.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD
06.08.	Finalisasi Laporan Keuangan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK khusus Sekretariat Daerah
06.09.	Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Kapuas Hulu
06.10.	Penyusunan LAKIP Kabupaten Kapuas Hulu
06.12.	Penyusunan RENSTRA SKPD
06.14.	Penyusunan Jurnal dan Buku Besar SKPD
06.15.	Penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD

06.16.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
06.17.	Penyusunan Data Base Pertanian
06.18.	Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu
06.19.	Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
06.20.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Proyek pembangunan di Kab. Kapuas Hulu
06.21.	Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan SKPD
06.22.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
06.23.	Penyelenggaraan Administrasi Penggajian PNS Kab. Kapuas Hulu
06.24.	Penyusunan Profil Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
06.25.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
06.26.	Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
06.27.	Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi DAK
06.28.	Penyusunan FHO dan PHO
06.29.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan
06.30.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
06.31.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
06.32.	Penyusunan Data Potensi Wilayah (Monografi) dan Programa Penyuluhan Pertanian
06.33.	Penyusunan Restatement Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2014
06.34.	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
06.35.	Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Instansi
06.36.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
06.37.	Penyusunan Data Base Inventarisasi Barang SKPD
06.38.	Penyusunan Rencana Tindakan Pengendalian SPIP
06.39.	Pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan
06.40.	Asistensi Penyusunan Rencana Kebutuhan Tenaga ASN
06.41.	Penyusunan Laporan Akuntansi dan Laporan Tahunan
06.42.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD
06.43.	Pemantauan dan pengendalian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pembangunan
06.44.	Penyusunan Rencana Strategis Pengendalian Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu
06.45.	Penyusunan SOP Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu
06.46.	Penyelenggaraan Penyusunan Profil Kecamatan
06.47.	Penyusunan Laporan Tahunan
06.48.	Pemantauan dan Pengendalian Program Kerja Bidang
06.49.	Penyelenggaraan Penyusunan Profil Kecamatan/Desa/Kelurahan
06.50.	Pendukung Kegiatan Majelis TP-TGR Kabupaten Kapuas Hulu
06.51.	Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang/Aset SKPD
06.52.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah
06.53.	Penyusunan Bazetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD
06.54.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
06.55.	Penyusunan Bazzeting PNS dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah
06.56.	Penyusunan Informasi Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah
06.57.	Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
06.58.	Penyusunan Matrik Renja SKPD
06.59.	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
06.60.	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah
06.61.	Pengadaan dan Implementasi Komputerisasi SIM Perjalanan Dinas
06.62.	Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan
06.63.	Review Hasil Analisis Jabatan
06.64.	Penyusunan Pedoman Uraian Jabatan

06.65.	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Dinas
06.66.	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu
06.67.	Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA-BLU)
06.68.	Penyusunan Komputerisasi Inventarisasi Barang dan Pengelolaan Aset
06.69.	Penyusunan Komputerisasi Manajemen Kepegawaian
06.70.	Penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Inventarisasi Kawasan Kumuh
06.71.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha Kekayaan
06.72.	Penyusunan Pelaporan Keuangan triwulan I dan Triwulan III SKPD tahun 2014 dan Rekonsiliasi Data SKPD
06.73.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama
06.74.	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan
06.75.	Pengembangan Data Karier Pegawai
06.76.	Pendataan Aset/Barang Milik Negara
06.77.	Penyempurnaan Data Aset SKPD
06.78.	Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kab. Kapuas Hulu
06.79.	Penyusunan Standar dan Prasarana Kerja Aparatur
06.80.	Inventarisasi Data Pembangunan
06.81.	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu
06.82.	Penataan Sistem Informasi Kinerja
06.83.	Inventarisasi Aset Jembatan dan Irigasi
06.84.	Penyusunan Profil Pendidikan
06.85.	Penyusunan Laporan Administrasi Realisasi Aset
06.86.	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan SKPD
06.87.	Penyusunan Inventarisasi Barang dan Pengelolaan Aset SKPD
06.88.	Penyusunan RPIJM SKPD
06.89.	Penyusunan Standar Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
06.90.	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab. Kapuas Hulu
06.91.	Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
06.92.	Study Pembelajaran Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Administrasi Kecamatan
06.93.	Perhelangan/Penjualan Barang Inventarisasi Alat-alat berat Milik Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu
06.94.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
06.95.	Penyusunan Stok Opname Obat-obatan
06.97.	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program SKPD
06.99.	Fasilitasi dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa
07.	Peningkatan Perdagangan dan Investasi di Dalam Negeri
07.01.	Promosi Produk Hasil Pertambangan Daerah dan Energi
08.	Peningkatan Pembinaan Terhadap Pemberdayaan perempuan
08.01.	Pembinaan PKK, Wanita Tani dan P2WKSS
08.02.	Pendukung Kegiatan Dharma Wanita Persatuan SKPD
01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
01.04.	Penyediaan Jasa Jaminaan Pemeliharaan Kesehatan PNS
01.05.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
01.08.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor

01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01.14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
01.19.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
01.20.	Pembinaan Kemasyarakatan
01.21.	Penyediaan Jasa Penilaian Angka kredit
01.22.	Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Formal
01.23.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan / Kelurahan
01.24.	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
01.25.	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
01.26.	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
01.27.	Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD
01.28.	Pelayanan Ketatausahaan Personel di Lingkungan SKPD
01.29.	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas
01.30.	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
01.31.	Penyusunan RKA dan DPA
01.32.	Penyediaan Perlengkapan Informasi dan Dokumentasi
01.33.	Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas Nakertransos
01.34.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Hortikultura
01.35.	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI
01.36.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
01.37.	Penunjang Kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian
01.38.	Penyusunan Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa
01.39.	Penyediaan Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan
01.40.	Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah
01.41.	Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Telekomunikasi Daerah
01.42.	Minotoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas
01.44.	Pemuktahiran Data Infrastruktur di Kab. Kapuas Hulu
01.45.	Penataan Dokumen Kepagawaian PNSD Kabupaten Kapuas Hulu
01.46.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau
01.47.	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Propinsi Kalbar
01.48.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah
01.49.	Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Rutin SKPD
01.50.	Monitoring Perkembangan Kependudukan
01.51.	Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Kepala Desa dan Sekretaris Desa
01.52.	Penyediaan Dana Operasional Pendidikan UPT Dinas pendidikan POR di Kecamatan - kecamatan
01.54.	Rapat Kerja Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
01.55.	Pemeliharaan dan Updating Web Site
01.59.	Sosialisasi dan Implementasi PP 46 Tahun 2011 (Penyusunan Sasaran Kerja PNS)
01.60.	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum
01.61.	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
01.62.	Pembuatan Website SKPD

01.63.	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan kebijakan layanan Publik
01.64.	Monitoring Pelaksanaan ADD
01.65.	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Festival Budaya daerah
01.66.	Penyediaan Jasa Publikasi
01.67.	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
01.68.	Pengadaan Sarana Kehutanan Kab. kapuas Hulu
01.69.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh kehutanan
01.70.	Penyusunan Pemuktahiran Data Pegawai
01.71.	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
01.72.	Penyediaan Jasa Tim Pengadaan Barang dan Jasa
01.73.	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan
01.74.	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Festival Budaya
01.75.	Penerbitan Buletin Kepegawaian
01.76.	Penyusunan Nominatif Pegawai dan DUK
01.77.	Pelaksanaan Admin TEPPA / Monev Online dan Admin Sirup SKPD
01.78.	Penataan Pegawai Negeri Sipil
01.79.	Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
01.80.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
01.81.	Penataan dan Publikasi Produk Hukum
.....	dst.....
02.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.01.	Pembangunan Rumah Jabatan
02.02.	Pembangunan Rumah Dinas
02.03.	Pembangunan Gedung Kantor
02.04.	Pengadaan Mobil Jabatan
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
02.06.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
02.08.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
02.10.	Pengadaan Mebeleur
02.11.	Pengadaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.12.	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
02.13.	Pengadaan Buku/Perpustakaan
02.18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah jabatan
02.19.	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
02.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan / Dinas
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
02.29.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
02.30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum
02.31.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

02.32.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan
02.33.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Umum Pemerintah
02.34.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Bercorak Kebudayaan
02.35.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Terminal, Pos IPJ dan Dermaga
02.36.	Pengadaan Fasilitas Tempat Tinggal
02.37.	Pembangunan Garasi/Tempat Penyimpanan Speedboat
02.40.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
02.41.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
02.43.	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
02.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
02.45.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Fasilitas Umum
02.47.	Peningkatan Sarana dan Prasarana PLKB
02.48.	Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)
02.49.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Praja
02.50.	Pengadaan Mobil Samsat Keliling
02.51.	Penyediaan Peralatan Layanan Digital
02.53.	Pembangunan Mess Dinas Pendidikan
02.65.	Penyediaan Fasilitas Rumah Jabatan
02.66.	Peningkatan Sarana dan Prasarana PLKB
02.67.	Pemeliharaan Perangkat Jaringan Pendidikan Nasional
02.68.	Pengadaan Sarana Kehutanan kab. kapuas Hulu
02.69.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan kehutanan
02.70.	Pembangunan Garasi Mobil KIR
02.71.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan
02.72.	Pemeliharaan Digital Society
02.73.	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor
02.74.	Rehab Ringan Gedung LPSE
02.75.	Rehab Ringan Gedung Radio
02.76.	Pembangunan Gedung Arsip Kantor DISHUBKOMINFO
02.77.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
02.78.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Mess Guru
02.79.	Pemeliharaan Rutin/BerkalaLingkungan Kebun Entrys
02.80.	Pembangunan Mess Penyuluh
.....	dst.....
03.	Peningkatan Disiplin Aparatur
03.01.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
03.03.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
03.04.	Pengadaan Pakaian KORPRI
03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
03.06.	Pengadaan Pakaian POLHUT
03.07.	Pengadaan Pakaian Dalkarhutla
.....	dst.....
04.	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
04.01.	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
04.02.	Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam melaksanakan Tugas

04.03.	Pemindahan Tugas PNS
.....	dst.....
05.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal
05.02.	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
05.04.	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
05.05.	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
05.06.	Bimbingan Teknis Administrasi Sekretaris Desa se-kabupaten Kapuas Hulu
05.07.	Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa
05.08.	Diklat Teknis Pembentukan Auditor
05.09.	Pelaksanaan Rapat Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian
05.10.	Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama
05.11.	Pengevaluasian Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kapuas Hulu
05.12.	Bimtek Penulisan Karya Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik
05.13.	Fasilitasi Penilaian Pemberian penghargaan Citra pelayanan Prima
05.14.	Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
05.16.	Diklat Teknis Kehumasan, Dokumentasi dan Informasi
05.17.	Bimtek Penyusunan Standart Operating Prosedure (SOP)
05.18.	Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP kecamatan
05.19.	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan
05.21.	Bimbingan Teknis Pengelolaan PPID dan Informasi
05.23.	Pelatihan Tenaga Laboran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu di Laboratorium UPMPJK
05.26.	Diklat Pembentukan Auditor
05.28.	Sosialisasi PPID di Kab. Kapuas Hulu
05.29.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
05.30.	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Aset Daerah
05.31.	Study Pembelajaran Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Administrasi Kecamatan
05.32.	Sosialisasi Protokoler
05.33.	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Pendapatan
05.36.	Sosialisasi ULP Kabupaten Kapuas Hulu
05.37.	Diklat Persiapan Purna Tugas
05.39.	Pelatihan Perancangan Campuran Aspal-Agregat
05.40.	Biaya Diklat PPNS
05.41.	Peringatan HUT Polisi pamong Praja dan Raker Trantibum
05.42.	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Inventaris Barang Puskesmas
05.43.	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) bagi Paramedis
05.44.	Pelaksanaan Pelatihan Aparat Desa
05.46.	Bimbingan Teknis Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD
05.47.	Peningkatan Wawasan Sumber Daya Aparatur PNS Bidang Koperasi dan UKM
05.48.	Diklat Aparatur Pembina Koperasi dan UKM
05.50.	Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan UPT
05.51.	Pelatihan Tenaga Laboratorium DBMP Kab. Kapuas Hulu
05.52.	Penataan Sistem Informasi Kinerja
05.53.	Diklat Aparatur Pembina Koperasi dan UKM
05.54.	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Inventaris Barang Puskesmas
05.56.	Diklat Aparatur Pembina Bidang Perdagangan
05.57.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan

05.58.	Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
05.59.	Diklat Aparatur UPT-PPD
05.60.	Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS
05.61.	Sosialisasi Elektronik Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (E-PUPNS)
05.62.	Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas
05.63.	Peningkatan Wawasan Sumber Daya Aparatur PNS Bidang Perdagangan
.....	dst.....
06.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
06.03.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
06.05.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
06.06.	Penyusunan jurnal dan Buku Besar
06.07.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD
06.08.	Finalisasi Laporan Keuangan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK khusus Sekretariat Daerah
06.09.	Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Kapuas Hulu
06.10.	Penyusunan LAKIP Kabupaten Kapuas Hulu
06.12.	Penyusunan RENSTRA SKPD
06.14.	Penyusunan Jurnal dan Buku Besar SKPD
06.15.	Penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD
06.16.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
06.17.	Penyusunan Data Base Pertanian
06.18.	Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu
06.19.	Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
06.20.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Proyek pembangunan di Kab. Kapuas Hulu
06.21.	Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan SKPD
06.22.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
06.23.	Penyelenggaraan Administrasi Penggajian PNS Kab. Kapuas Hulu
06.24.	Penyusunan Profil Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
06.25.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
06.26.	Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD
06.27.	Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi DAK
06.28.	Penyusunan FHO dan PHO
06.29.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan
06.30.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
06.31.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
06.32.	Penyusunan Data Potensi Wilayah (Monografi) dan Programa Penyuluhan Pertanian
06.33.	Penyusunan Restatement Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2014
06.34.	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
06.35.	Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Instansi
06.36.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
06.37.	Penyusunan Data Base Inventarisasi Barang SKPD
06.38.	Penyusunan Rencana Tindakan Pengendalian SPIP
06.39.	Pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan
06.40.	Asistensi Penyusunan Rencana Kebutuhan Tenaga ASN
06.41.	Penyusunan Laporan Akuntansi dan Laporan Tahunan
06.42.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD

06.43.	Pemantauan dan pengendalian Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pembangunan
06.44.	Penyusunan Rencana Strategis Pengendalian Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu
06.45.	Penyusunan SOP Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu
06.46.	Penyelenggaraan Penyusunan Profil Kecamatan
06.47.	Penyusunan Laporan Tahunan
06.48.	Pemantauan dan Pengendalian Program Kerja Bidang
06.49.	Penyelenggaraan Penyusunan Profil Kecamatan/Desa/Kelurahan
06.50.	Pendukung Kegiatan Majelis TP-TGR Kabupaten Kapuas Hulu
06.51.	Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang/Aset SKPD
06.52.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah
06.53.	Penyusunan Bazetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD
06.54.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
06.55.	Penyusunan Bazzeting PNS dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah
06.56.	Penyusunan Informasi Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah
06.57.	Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
06.58.	Penyusunan Matrik Renja SKPD
06.59.	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
06.60.	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah
06.61.	Pengadaan dan Implementasi Komputerisasi SIM Perjalanan Dinas
06.62.	Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan
06.63.	Review Hasil Analisis Jabatan
06.64.	Penyusunan Pedoman Uraian Jabatan
06.65.	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Dinas
06.66.	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu
06.67.	Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA-BLU)
06.68.	Penyusunan Komputerisasi Inventarisasi Barang dan Pengelolaan Aset
06.69.	Penyusunan Komputerisasi Manajemen Kepegawaian
06.70.	Penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Inventarisasi Kawasan Kumuh
06.71.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha Kekayaan
06.72.	Penyusunan Pelaporan Keuangan triwulan I dan Triwulan III SKPD tahun 2014 dan Rekonsiliasi Data SKPD
06.73.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama
06.74.	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan
06.75.	Pengembangan Data Karier Pegawai
06.76.	Pendataan Aset/Barang Milik Negara
06.77.	Penyempurnaan Data Aset SKPD
06.78.	Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kab. Kapuas Hulu
06.79.	Penyusunan Standar dan Prasarana Kerja Aparatur
06.80.	Inventarisasi Data Pembangunan
06.81.	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu
06.82.	Penataan Sistem Informasi Kinerja
06.83.	Inventarisasi Aset Jembatan dan Irigasi
06.84.	Penyusunan Profil Pendidikan
06.85.	Penyusunan Laporan Administrasi Realisasi Aset
06.86.	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan SKPD
06.87.	Penyusunan Inventarisasi Barang dan Pengelolaan Aset SKPD
06.88.	Penyusunan RPIJM SKPD
06.89.	Penyusunan Standar Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
06.90.	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab. Kapuas Hulu
06.91.	Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

06.92.	Study Pembelajaran Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Administrasi Kecamatan
06.93.	Perelangan/Penjualan Barang Inventarisasi Alat-alat berat Milik Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu
06.94.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
06.95.	Penyusunan Stok Opname Obat-obatan
06.97.	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program SKPD
06.99.	Fasilitasi dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa
07.	Peningkatan Perdagangan dan Investasi di Dalam Negeri
07.01.	Promosi Produk Hasil Pertambangan Daerah dan Energi
.....	dst.....
08.	Peningkatan Pembinaan Terhadap Pemberdayaan perempuan
08.01.	Pembinaan PKK, Wanita Tani dan P2WKSS
08.02.	Pendukung Kegiatan Dharma Wanita Persatuan SKPD
.....	dst.....
Urusan	1.01.PENDIDIKAN
15.	Pendidikan Anak Usia Dini
15.01.	Pembangunan Gedung PAUD
15.02.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
15.03.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
15.05.	Pembangunan Ruang Locker Siswa
15.06.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
15.07.	Pembangunan Sarana dan Prarana Bermain
15.08.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
15.09.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
15.10.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
15.11.	Pembangunan Ruang Ibadah
15.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
15.13.	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya
15.14.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
15.15.	Pengadaan Buku - Buku dan Alat Tulis Siswa
15.16.	Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
15.18.	Penyediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa TK
15.19.	Pengadaan Mebeleur Sekolah
15.21.	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
15.22.	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
15.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
15.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
15.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas
15.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Guru Sekolah
15.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang locker Siswa
15.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
15.29.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Bermain
15.30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Serba Guna/Aula
15.31.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
15.32.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Unit Kesehatan Sekolah
15.33.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Ibadah

15.36.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitary
15.37.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
15.40.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga Sekolah
15.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
15.43.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
15.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Siswa
15.45.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas Sekolah
15.47.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Locker Siswa
15.48.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga
15.49.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Bermain
15.50.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Seba Guna/ Aula
15.51.	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
15.52.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
15.53.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah
15.54.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
15.56.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary
15.57.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
15.58.	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Subsidi)
15.59.	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
15.60.	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini
15.61.	Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
15.62.	Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Taman Kanak - Kanak
15.63.	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
15.64.	Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini
15.65.	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
15.66.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15.67.	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Taman Kanak - Kanak
15.68.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas (Siswa TK/RA)
.....	dst.....
16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16.01.	Pembangunan gedung sekolah
16.02.	pembangunan rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah
16.03.	Penambahan ruang kelas sekolah
16.04.	Penambahan ruang guru sekolah
16.05.	Pembangunan ruang locker siswa
16.06.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
16.08.	Pembangunan ruang serba guna/aula
16.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar dan fasilitas parkir
16.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
16.11.	Pembangunan ruang ibadah
16.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
16.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
16.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
16.15.	Pengadaan buku Hasil Belajar/Rapor Siswa
16.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah
16.17.	Pengadaan pakaian olahraga
16.18.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah Dasar
16.19.	Pengadaan Mebelair SD dan SMP

16.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah
16.21.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
16.22.	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
16.23.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
16.24.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
16.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
16.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
16.27.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
16.28.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
16.29.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
16.30.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan dan fasilitas parkir
16.31.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
16.32.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
16.33.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
16.34.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
16.35.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
16.36.	Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
16.37.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
16.38.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
16.39.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
16.40.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
16.41.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
16.42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
16.43.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
16.44.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
16.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
16.46.	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
16.47.	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
16.48.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
16.49.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
16.50.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
16.51.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
16.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
16.53.	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
16.54.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
16.55.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
16.56.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
16.57.	Pelatihan Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pendidik
16.58.	Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi
16.59.	Pelatihan Implementasi kurikulum 2013
16.60.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sarana dan Prasarana Melalui Dapordikdas
16.61.	Pengadaan Buku Induk Siswa dan Buku Rapor Sekolah Dasar
16.62.	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
16.63.	Penyediaan dana bantuan operasional sekolah daerah(BOSDA)
16.64.	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
16.65.	Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 untuk Siswa dan Guru SD dan SMP
16.66.	Pengadaan Buku Penguat Ujian Nasional
16.67.	Penyelenggaraan paket A setara SD
16.68.	Penyelenggaraan paket B Setara SMP

16.69.	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan
16.70.	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
16.71.	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (CTL bagi Guru Bahasa Inggris)
16.72.	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
16.73.	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
16.74.	Pengelolaan Siswa Penerima BSM
16.75.	Pelatihan Kompetensi Ibadah Siswa Muslim (Training spritual journey for student)
16.76.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
16.77.	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar
16.78.	Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SMP Tahun Pelajaran 2014/2015
16.79.	Fasilitasi Penyelenggaraan UN SMP/MTs
16.80.	Evaluasi wajib belajar sembilan tahun (Try Out ujian nasional SD/MI, SMP/MTs)
16.81.	Fasilitasi penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015
16.82.	Pelatihan Kompetensi Ibadah Siswa Muslim (Training spritual journey for student)
16.83.	Penyelenggaraan UN Paket B Setara SMP Formal
16.84.	Study perancangan Sistem Data Base Pemetaan dan Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan
16.85.	Pendataan Aset Bangunan dan Tanah Sekolah
16.87.	Pembangunan Asrama Siswa/Pelajar
16.88.	Study Profil Aksesibilitas Pendidikan Daerah Tertinggal di Pedalaman Kab. Kapuas Hulu
16.89.	Fasilitas Pengelolaan dana Beasiswa Siswa Miskin
16.90.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK Bidang Pendidikan)
16.91.	Sistem Informasi manajemen Rehabilitasi Sekolah
16.92.	Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa dan Guru
16.93.	Pengadaan Buku - Buku Pengayaan untuk Perpustakaan
16.94.	Pengelolaan Siswa Penerima BSM
16.95.	Survey Kebutuhan Sekolah Ber-asrama di daerah perbatasan, terpencil dan terisolir
16.96.	Survey Kebutuhan Perumahan Dinas Guru di daerah perbatasan, terpencil dan terisolir
16.98.	Penyelenggaraan Ujian Umum Bersama (UUB) SD/MI dan SMP/MTs
16.99.	Perencanaan Rehabilitasi Sedang / Berat Sekolah Dasar
17.	Program Pendidikan Menengah
17.01.	Pembangunan gedung sekolah
17.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah
17.03.	Penambahan ruang kelas sekolah
17.04.	Penambahan ruang guru sekolah
17.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium IPA dan laboratorium TIK)
17.06.	Pembangunan ruang locker siswa
17.08.	Pembangunan ruang serba guna/aula
17.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar dan fasilitas parkir
17.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
17.11.	Pembangunan ruang ibadah
17.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
17.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
17.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
17.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
17.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah
17.17.	Pengadaan pakaian olahraga
17.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
17.19.	Pengadaan Meubeulair sekolah

17.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah
17.21.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
17.22.	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
17.23.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
17.24.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
17.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
17.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
17.27.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
17.28.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
17.29.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
17.30.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara, pagar dan fasilitas parkir
17.31.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
17.32.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
17.33.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
17.34.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
17.35.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
17.36.	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
17.37.	Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair sekolah
17.38.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
17.39.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
17.40.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
17.41.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
17.42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
17.43.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
17.44.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
17.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
17.46.	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
17.47.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
17.48.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
17.49.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
17.50.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara, pagar dan fasilitas parkir
17.51.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
17.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
17.53.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
17.54.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
17.55.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
17.56.	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
17.57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
17.58.	Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2015
17.59.	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
17.60.	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan
17.61.	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
17.62.	Pendataan Siswa Penerima Beasiswa (BSM)
17.63.	Penyelenggaraan paket C setara SMA
17.64.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
17.65.	Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan
17.66.	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
17.67.	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
17.68.	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

17.69.	Penyelenggaraan Try Out SMA/MA dan SMK
17.70.	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
17.71.	Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2014/2015
17.72.	Penyediaan dana bantuan operasional sekolah Daerah (BOSDA)
17.73.	Pelaksanaan UAS SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
17.74.	Pelaksanaan UNAS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
17.75.	Pelaksanaan Promosi Kompetensi Siswa SMK
17.76.	Penerimaan Siswa Baru (PSB)
17.77.	Kegiatan Akreditasi SD dan SMP
17.78.	Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Try out ujian nasional
17.79.	Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tahun 2014/2015
17.80.	Penyediaan Beasiswa bagi siswa berprestasi SMA/MA dan SMK
17.81.	Biaya Operasional Pemeliharaan MCK sekolah-sekolah negeri
17.82.	Training spritual journey for student
17.83.	Pemetaan dan Penyusunan Data Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah
17.84.	Gelar Prestasi dan Bela Negara
17.85.	Pengadaan Buku Teks Pelajaran untuk Siswa SMA dan SMK
17.87.	Pembangunan Asrama Siswa / Pelajar
17.88.	Penyediaan Dana Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah
17.90.	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan
17.91.	Penyediaan peralatan / sarana olahraga
17.92.	Pendampingan Dana Block Grant Pendidikan untuk SMA
17.93.	Land Clearing Pembangunan SMAN 9 (Subsidi)
17.94.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Setara SMA Formal
.....	dst.....
18.	Program Pendidikan Non Formal dan Formal
18.01.	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (Bimtek Peningkatan Mutu PTK-PAUDNI)
18.03.	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI)
18.04.	Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional
18.05.	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
18.06.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
18.07.	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
18.08.	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
18.09.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
18.10.	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
18.11.	Perencanaan dan penyusunan Data pendidikan non formal
18.12.	Sosialisasi dan Pendidikan Program PAUDNI
18.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan non formal
18.14.	Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Nonformal Informal
18.15.	Pelaksanaan Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA
18.33.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.34.	Pembinaan bagi Lembaga Kursus dan Pendidikan Non formal dan Informal
18.35.	Apresiasi PTK PAUDNI
18.36.	Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM)
18.37.	Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional
.....	dst.....
19.	Program Pendidikan Luar Biasa

19.01.	Pembangunan gedung sekolah
19.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
19.03.	Penambahan ruang kelas sekolah
19.04.	Penambahan ruang guru sekolah
19.05.	Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA,
19.06.	Pembangunan ruang locker siswa
19.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
19.08.	Pembangunan ruang serba guna/aula
19.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
19.11.	Pembangunan ruang ibadah
19.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
19.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
19.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
19.15.	Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
19.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga
19.17.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
19.18.	Pengadaan mebeluer sekolah
19.19.	Pengadaan perlengkapan sekolah
19.20.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
19.21.	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
19.22.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
19.23.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
19.24.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
19.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
19.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
19.27.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
19.28.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
19.29.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19.30.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
19.31.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
19.32.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
19.33.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
19.34.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
19.35.	Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar
19.36.	Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
19.37.	Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah
19.38.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
19.39.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
19.40.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
19.41.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
19.42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
19.43.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
19.44.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
19.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
19.46.	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
19.47.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
19.48.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
19.49.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

19.50.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19.51.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
19.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
19.53.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
19.54.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
19.55.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
19.56.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
19.57.	Pelatihan penyusunan kurikulum
19.58.	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
19.59.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.60.	dst.....
20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20.01.	Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA) Bagi Tenaga Pendidik
20.02.	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
20.03.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
20.04.	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
20.05.	Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)
20.06.	Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)
20.07.	Pendidikan lanjutan bagi pendidikan untuk memenuhi standarisasi kualifikasi
20.08.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan
20.09.	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
20.10.	Pemilihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi
20.11.	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan
20.12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.13.	Pendidikan lanjutan bagi pendidikan untuk memenuhi standarisasi kualifikasi
20.14.	Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS
20.15.	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan
20.16.	Study Banding Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi
20.17.	Pembinaan Musyawarah Guru Mata pelajaran
20.18.	Penilaian angka kredit jabatan Guru
20.19.	Pelatihan pengawas SMP/SLTA
20.20.	Rapat Tekhnis Pengelolaan Administrasi Sekolah
20.21.	Peringatan Hari Anak Nasional
20.22.	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
20.23.	Penyelenggaraan Jurnal Riset Penelitian Pendidikan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20.24.	Pembinaan Kinerja Pengawas SD, SMP, SMA, dan SMK Sekolah
20.25.	Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
20.26.	Pengembangan Sistem Pendaftaran dan Pemetaan PTK
20.27.	Evaluasi Diri Sekolah / EDS
20.28.	Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar (subsidi)
20.29.	Workshop Olimpiade Matematika dan Sains
20.30.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
20.31.	Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN)
20.32.	Pelantikan Kepala Sekolah
20.33.	Pelatihan Penilaian Kinerja Guru SMP, SMA, dan SMK
20.34.	Pelatihan Kompetensi Pengawas Sekolah
20.35.	Penyelenggaraan Rapat Tim Promosi Mutasi Kepala Sekolah dan Guru
20.36.	Study Kelayakan Pengembangan Sarana Pendidikan Sekolah Terpadu di Kabupaten Kapuas Hulu

.....	dst.....
21.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
21.01.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
21.02.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
21.03.	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana bantuan
21.04.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
21.05.	Pembinaan dewan pendidikan
21.06.	Pembinaan komite sekolah
21.07.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
21.08.	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
21.09.	Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan Pada UPT DPOR Kecamatan
21.10.	Pelatihan Manajemen Administrasi Sekolah
21.11.	Pelatihan Pengelolaan Laboratorium Sekolah
21.12.	Sosialisasi Wajib Belajar Sembilan tahun
21.13.	Pelatihan Manajemen berbasis Sekolah
21.14.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional
21.15.	Pembinaan Persatuan Guru Republik Indonesia Kab. Kapuas Hulu
21.16.	Peningkatan Mutu Kepala Sekolah
21.17.	Peningkatan Mutu Pengawas
21.19.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan (Lanjutan)
21.20.	Peringatan Hari Anak Nasional
21.21.	Pembuatan Kartu Induk Siswa Nasional (NISN) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
21.22.	Penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan dasar dan Menengah (RPDK Kabupaten)
21.23.	Pembinaan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan
21.24.	Pembinaan Sekolah Penerima Dana BOS (Safe Guarding) Jenjang SD dan SMP
21.25.	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
.....	dst.....
22.	Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
22.01.	Bantuan Dana untuk Perguruan tinggi Swasta
.....	dst.....
23.	Program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
23.06.	Penyelenggaraan Kompetensi Olah Raga
23.07.	Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda Perintis Paskibra
23.08.	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) Serta Seleksi LPI di Kabupaten Kapuas Hulu
23.09.	O2SN dan FLSN Tingkat Propinsi Kalimantan Barat
23.10.	Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (OOSN) SLB Tk. Prop. Kalbar
23.11.	Bhakti Pemuda Antar Provinsi
23.12.	Jambore Pemuda Indonesia
23.13.	Pekan Olah Raga Pelajar (POPDA) Tingkat Prov. Kalbar
23.14.	Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Pendidikan Sumpah Pemuda dan Olahraga Nasional
23.15.	Pemuda Kreatif
23.16.	Penyelenggaraan Pekan OLah Raga dan Seni (PORSENI) Guru di Kab. Kapuas Hulu
23.17.	Latihan Pembinaan Pramuka Tingkat Dasar
.....	dst.....
25.	Program Pembinaan dan Seni Budaya Peserta Didik

25.01.	Pemeliharaan benda cagar budaya
25.02.	Pendataan BCB yang bergerak maupun tidak bergerak di 5 Kecamatan
25.03.	Mengikuti Festival seni tari tingkat Propinsi
25.04.	PORSENI SMP Tingkat Propinsi
25.05.	Pengiriman Peserta Pagelaran Seni dan Budaya
.....	dst.....
26.	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
26.01.	Jambore Nasional
.....	dst.....
Urusan :	1.02. - KESEHATAN
15.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.01.	Pengadaan obat- obat dan perbekalan kesehatan
15.02.	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
15.03.	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk
15.04.	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
15.05.	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
15.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Obat
15.07.	Pengadaan Tabung Oksigen
15.08.	Pelatihan Pemberian informasi bagi Pasien Ibu Hamil dan Anak dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas
15.09.	Pertemuan Konfirmasi Data Persediaan Obat Per 31 Desember 2015 dalam Rangka Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
15.10.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam Rangka Pengelolaan Obat Puskesmas
.....	dst.....
16.	Upaya Kesehatan Masyarakat
16.01.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
16.02.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
16.03.	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
16.04.	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
16.05.	Perbaikan gizi masyarakat
16.06.	Revitalisasi sitem kesehatan
16.07.	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
16.08.	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
16.09.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat
16.10.	Pencegahan Penyakit
16.11.	Pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
16.12.	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah kesehatan
16.13.	Pelatihan Kesehatan Jiwa Bagi Petugas Kesehatan
16.14.	Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Khusus
16.15.	Pelayanan Kesehatan Hari - Hari Besar dan Nasional
16.16.	Pelayanan Kesehatan Haji
16.17.	Perumusan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Pratama
16.19.	Penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) Secara Terpadu
16.20.	Pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB)
16.21.	Pelayanan Kesehatan dasar Dan Khusus
16.22.	Pemberantasan Penyakit IMS,HIV/AIDS dan Monitoring Pengobatan Penderita Kusta
16.23.	Pemberantasan Penyakit TBC

16.24.	Penanganan Orang Gila
16.25.	Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dan Puskesmas
16.26.	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pusban (DAK-KES)
16.28.	Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan
16.29.	Rapat Kerja Kesehatan Daerah
16.30.	Penanggulangan Penyakit Campak (PIN Campak)
16.31.	Pengelolaan Register Kunjungan Puskesmas
16.32.	Penilaian Kinerja Puskesmas
16.33.	Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien
16.34.	Pnyusunan Data Pasien Umum, Askes, Jaamkesmas dan Jamkesda
16.35.	Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
16.36.	Peresmian Puskesmas Rawat Inap Puring Kencana Kecamatan Puring Kencana
16.37.	Penerbitan Izin dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan
16.38.	Pelatihan Petugas Puskesmas Dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Haji
16.39.	Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan
16.40.	Sosialisasi PERDA Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di
16.41.	Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji
16.42.	Pengelolaan Register Kunjungan Puskesmas
16.43.	Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
16.44.	Pelayanan Kesehatan Olahraga
.....	dst.....
17.	Pengawasan Obat dan Makanan
17.01.	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
17.02.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
17.03.	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
17.04.	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
17.05.	Monitoring, evaluasi Industri Rumah Tangga Pangan
17.06.	Pemantauan Makanan Yang Terindikasi Mengandung Bahan Berbahaya
17.07.	Pelaksanaan Pengadaan Obat dan Bahan Kimia untuk LSM, Mahasiswa, Pejabat Eselon,
17.08.	Pertemuan Pengelolaan Obat
17.09.	Penyuluhan Keamanan Pangan dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan
17.10.	Penyuluhan Jajan Anak Sekolah Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
17.11.	Monitoring Evaluasi dan konsultasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
17.12.	Pengelolaan Izin Pendirian Apotek dan Toko Obat
.....	dst.....
18.	Pengembangan Obat Asli Indonesia
18.01.	Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat
18.02.	Pengembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam indonesia
18.03.	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri
18.04.	Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
18.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.06.	dst.....
19.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
19.01.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
19.02.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
19.03.	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

19.04.	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
19.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program PSM
19.06.	Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan Generasi Muda
19.07.	Pembinaan Posyandu di Kabupaten Kapuas Hulu
19.08.	Jambore Kader Posyandu
19.09.	Pelatihan Kader Pos Yandu
19.10.	Partisipasi dalam Pelaksanaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional 2011
19.11.	Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional Tingkat Kabupaten di Kab. Kapuas Hulu
19.12.	Penyusunan Profil Rumah Sakit
19.13.	Penyusunan Buku Pedoman Informasi Rumah Sakit
19.14.	Pembinaan dan Pengembangan Posyandu dalam Program P2W-KSS KB-Kes, Lomba Desa dan UKS
19.15.	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sejak Dini
19.16.	Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Tk. Kecamatan
19.17.	Pelatihan Petugas PSM Puskesmas
19.18.	Pembinaan dan Pengembangan Saka Bhakti Husada
19.19.	Jambore Kader Posyandu Tingkat Propinsi
19.20.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
19.23.	Perkemahan Sosial (Saka Bhakti Husada) Tk. Nasional
.....	dst.....
20.	Perbaikan Gizi Masyarakat
20.01.	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
20.02.	Pemberian makanan dan vitamin
20.03.	Penanggulangan Masalah Kurang Energi Protein (KEP)
20.04.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
20.05.	Peningkatan gizi lebih
20.06.	Monitoring, evaluasi dan Bimbingan Teknis Program Perbaikan Gizi di Puskesmas
20.07.	Pertemuan Integrasi Program Gizi dan KIA
20.08.	Penyuluhan Tentang Gizi kepada Siswa SD s/d SMA
20.09.	Penanggulangan Masalah Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
20.10.	Pelatihan Petugas Gizi Puskesmas
20.11.	Pelatihan Tenaga Pelatih (TOT) Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
20.12.	Pelatihan Tenaga Konselor Menyusui Air Susu Ibu (ASI) Ekseklusif
20.13.	Monitoring, Evaluasi dan Bimbingan Teknis Program Perbaikan Gizi di Puskesmas
20.14.	Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
20.15.	Pelatihan Tenaga Pemantauan Pertumbuhan
.....	dst.....
21.	Pengembangan Lingkungan Sehat
21.01.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
21.02.	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
21.03.	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
21.04.	Monitoring dan evaluasi Program Kesehatan Lingkungan ke Puskesmas
21.05.	Pengawasan Kualitas Air Konsumsi dalam kemasan
21.06.	Pembangunan Sumur -Sumur Ait Tanah
21.07.	Pengawasan Kualitas Air DAMIU dan PDAM
21.08.	Pengawasan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Industri Katering
21.09.	Demo Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Sekolah Dasar
21.10.	Pengawasan Hygiene Sanitasi Salon / Pangkas Rambut dan Penginapan / Hotel

21.11.	Pelatihan Petugas Pengawas TPM
21.12.	Sosialisasi Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan
21.13.	Pengawasan Kualitas Air Minum
21.14.	Pertemuan Validasi Data Laporan Kesling Puskesmas
21.15.	Pelatihan Pemberantasan Sarang Nyamuk
21.16.	Pelatihan Klinik Sanitasi Puskesmas
21.17.	Orientasi Pasar Sehat
21.18.	Pelatihan STBM Bagi Sanitarian dan Kader Kesling Desa
21.19.	Penyediaan Sarana Air Minum Masyarakat Pedesaan
21.20.	Sosialisasi Sertifikasi dan Hygiene Sanitasi Bagi Pengelola Hotel dan Penginapan
21.21.	Sosialisasi Sertifikasi dan Hygiene sanitasi Bagi Pengelola Salon/ Pangkas Rambut
21.22.	Sosialisasi Sertifikasi dan Hygiene Sanitasi Bagi Pengelola Depot Air Minum Isi Ulang
21.23.	Pengawasan Kualitas Air Minum
21.24.	Pelatihan Software Imunisasi
21.25.	Penyediaan Penampungan Air Hujan (PAH)
.....	dst.....
22.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
22.02.	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
22.03.	Pengadaan vaksin penyakit menular
22.04.	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
22.05.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
22.06.	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
22.07.	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
22.08.	Peningkatan Imunisasi
22.09.	Peningkatan surveillence epideminologi dan penaggulangan wabah
22.10.	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
22.12.	Fogging Fokus dan Fogging Sebelum Masa Penularan Demam Berdarah Dengue
22.13.	Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah
22.14.	Penanggulangan Penyakit Tuberkolosis Paru (TBC)
22.15.	Pemberantasan Penyakit Malaria Dengan Indoor Residual Spraying (IRS)
22.16.	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
22.17.	Penyemprotan Dengan Insektisida atau Indor Residual Spraying (IRS)
22.18.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan proogram pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular
22.19.	Pelaksanaan Mass Blood Survey (MBS)
22.20.	Penanggulangan Penyakit Rabies
22.21.	Pertemuan Pemantapan dan Evaluasi Rabies
22.22.	Penanggulangan Penyakit Kecacingan
22.23.	Pelatihan Rantai Dingin Vaksin
22.24.	Penanggulangan Penyakit Filariasis
22.25.	Sosialisasi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio
.....	dst.....
23.	Standarisasi Pelayanan Kesehatan
23.01.	Penyusunan standar pelayanan kesehatan
23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan
23.03.	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
23.04.	Penyusunan akademis standar pelayanan kesehatan

23.05.	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
23.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
23.07.	Penilaian Standarisasi Akreditasi Rumah Sakit
23.08.	Pengembangan Puskesmas ISO
23.09.	Penilaian Medis dan Paramedis Teladan
23.10.	Pemantapan Persiapan Puskesmas BLUD
23.11.	Workshop Penggalangan Komitmen dan Persiapan Akreditasi Puskesmas
23.12.	Penilaian Akreditasi Puskesmas Oleh Tim Akreditasi Pusat
23.13.	Pendampingan dan Implementasi Akreditasi Puskesmas Tahun 2016
23.14.	Kalibrasi Alat Kesehatan
23.15.	Penyusunan Standar Pelayanan Keperawatan dan Medis
23.16.	Penyusunan Standar Pelayanan Rekam Medik
23.17.	Penyusunan dan Pemuktahiran Data Dasar Keselamatan Pasien
23.18.	Penyusunan Laporan Evaluasi Kepuasan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
23.19.	Penyusunan Raperda Tentang Retribusi Rumah Sakit
23.20.	Penyusunan Data BPJS
23.21.	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
23.23.	Workshoop Persiapan Akreditasi Puskesmas
23.24.	Penilaian Akreditasi Puskesmas Oleh Tim Provinsi dan Pusat
23.26.	Pertemuan Penyusunan Dokumen dan Instrumen Akreditasi Puskesmas Tahun 2015
23.27.	Pendampingan dan Implementasi Akreditasi Puskesmas Tahun 2015
23.28.	Pembimbingan Akreditasi Rumah Sakit
.....	dst.....
24.	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
24.01.	Pelayanan Operasi Bibir Sumbing
24.02.	Pelayanan kesehatan THT
24.03.	Pelayanan Operasi Katarak
24.04.	Pelayanan sunatan masal
24.05.	Penanggulangan ISPA
24.06.	Penanggulangan penyakit cacangan
24.07.	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
24.08.	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
24.09.	Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu
24.10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
24.11.	Pelayanan kesehatan Komunitas Adat Terpencil
24.12.	Pelayanan kesehatan keluarga miskin/subsidi Propinsi (Lanjutan)
24.13.	Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
24.14.	Operasional Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
24.15.	Bantuan Pelayanan Kesehatan Gakin (Subsidi Propinsi)
24.16.	Pelayanan Rujukan dan Pemulangan Pasien Tidak Mampu
.....	dst.....
25.	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
25.01.	Pembangunan puskesmas
25.02.	Pembangunan puskesmas pembantu
25.03.	Pengadaan puskesmas perairan
25.04.	Pengadaan puskesmas keliling
25.05.	Pembangunan posyandu

25.06.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
25.07.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
25.08.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan
25.09.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
25.10.	Pengadaan sarana dan prasarana keliling
25.11.	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
25.12.	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
25.13.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
25.14.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
25.15.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan
25.16.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
25.17.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu
25.18.	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
25.19.	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
25.20.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
25.21.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan
25.22.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
25.23.	Rehabilitasi Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
25.24.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan puskesmas, Pustu dan Polindes
25.25.	Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
25.26.	Peningkatan polindes menjadi Poskesdes
25.27.	Pembangunan Poskesdes
25.28.	Study Rencana Strategis Investasi Infrastruktur Kesehatan
25.29.	Perencanaan Pembangunan Puskesmas
25.30.	Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas di Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
26.	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
26.01.	Pembangunan Ruang Rawat Jalan
26.02.	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
26.03.	Pembangunan gudang obat/apotik
26.05.	Pengembangan ruang gawat darurat
26.06.	Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU
26.07.	Pengembangan ruang operasi
26.08.	Pengembangan ruang terapi
26.09.	Pengembangan ruang isolasi
26.10.	Pengembangan ruang bersalin
26.11.	Pengembangan ruang inkubator
26.12.	Pengembangan ruang bayi
26.13.	Pengembangan ruang rontgen
26.14.	Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
26.15.	Pembangunan kamar jenazah
26.16.	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
26.17.	Rehabilitasi bangunan rumah sakit
26.18.	Pengadaan alat-alat rumah sakit
26.19.	Pengadaan obat-obatan rumah sakit
26.20.	Pengadaan ambulance/mobil jenazah
26.21.	Pengadaan mebeleur rumah sakit
26.22.	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu

26.23.	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
26.24.	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
26.25.	Pengembangan tipe rumah sakit
26.26.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
26.27.	Pengadaan Pakaian Khusus Pasien dan Perlengkapannya
26.28.	Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan dan Medis
26.29.	Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit Bergerak di Badau
26.30.	Pembersihan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Semitau
26.31.	Pengadaan Dokumen UKL/UPL Rumah Sakit
26.32.	Pengadaan Peralatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
26.33.	Pengadaan Peralatan BDRS/UTD Rumah Sakit
26.34.	Pengadaan Peralatan Rumah Sakit Siap Ponek
26.35.	Pengadaan Peralatan IGD Rumah Sakit
26.36.	Pengadaan Peralatan ICU Rumah Sakit
26.37.	Pengadaan Peralatan TT Kelas 3
26.38.	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit
26.39.	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Sakit Bergerak
.....	dst.....
27.	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
27.01.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
27.02.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliiklinik rumah sakit
27.03.	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
27.04.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
27.05.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
27.07.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
27.08.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
27.09.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi
27.10.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
27.11.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator
27.12.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
27.13.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen
27.14.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit
27.15.	Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
27.16.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
27.17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
27.18.	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
27.19.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit
27.20.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
27.21.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
27.22.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Mata
27.23.	Rehabilitasi Gedung Kelas 3
27.24.	Rehabilitas Gedung Rawat Inap Kelas 3 Rumah Sakit
27.25.	Rehabilitasi Gedung ICU
27.36.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jalan dan Saluran Air Rumah Sakit
27.37.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pagar Rumah Sakit
27.38.	Rehabilitasi Selasar Rumah Sakit
.....	dst.....

28.	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
28.01.	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
28.02.	Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
28.03.	Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
28.04.	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
28.05.	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
28.06.	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
28.07.	Kemitraan pengobatan bagi pasien tidak mampu
28.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
28.09.	Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah Kab. Kapuas Hulu
28.10.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemda
28.11.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan
28.12.	Penyusunan dan Pembahasan Draft Raperda JAMKESDA
28.13.	Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Masyarakat Hukum Kec. Balikpapan Selatan
28.14.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
28.15.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Jaminan Kesehatan Nasional
28.17.	Pertemuan Petugas Pengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional
.....	dst.....
29.	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
29.01.	Penyuluhan kesehatan anak balita
29.02.	Imunisasi bagi anak balita
29.03.	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
29.04.	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
29.05.	Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
29.06.	Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita
29.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
29.08.	dst.....
30.	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
30.01.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan
30.02.	Rekrutmen tenaga perawat kesehatan
30.03.	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
30.04.	Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
30.05.	Pembangunan panti asuhan
30.06.	Pelayanan kesehatan
30.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30.08.	Pertemuan dan Pemantauan Kesehatan Lansia
30.09.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)
.....	dst.....
31.	Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
31.01.	Pemeriksaan Makanan Kadaluwarsa dan Rusak Pada Toko Mini Market Dalam Rangka Pengawasan Keamanan dan Kesehatan
31.02.	Pemeriksaan Sampel Makanan Dalam Rangka Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil
31.03.	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
31.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
.....	dst.....
32.	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

32.01.	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
32.02.	Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
32.03.	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
32.04.	Pelatihan Manajemen Asfiksia
32.05.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
32.06.	Pembuatan PERDA Kesehatan Reproduksi dan Kemitraan Bidan Dukun
32.07.	Peningkatan Kapasitas Manajemen PWS KIA Bagi Bidan Se Kabupaten Kapuas Hulu
32.08.	Pertemuan Audit Maternal Perinatal
32.10.	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit
32.11.	Pertemuan Integrasi Pengelola Program KIA - Gizi
32.12.	Monitoring, Evaluasi dan Bimbingan Teknis
32.13.	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal
32.14.	Pertemuan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
32.15.	Pelatihan Penyelia Supervisi Fasilitatif
.....	dst.....
33.	Pengelolaan Komunikasi Publik dalam meningkatkan Penyelenggaraan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan
33.01.	Pengembangan Informasi Hidup Sehat (PHBS)
33.03.	Penyebarluasan Informasi Hidup Sehat
33.05.	Peringatan Hari Kesehatan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2014
33.06.	Pemilihan Duta HIV / AID Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014
33.07.	Penyuluhan PHBS Rumah Tangga dan Institusi Pendidikan (Sekolah)
33.08.	Penyusunan Profil Kesehatan dan Profil Promosi Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
33.09.	Promosi Kesehatan Untuk Generasi Muda Saka Bakti Husada
33.11.	Treaning Of Trainer (TOT) Fasilitator Tentang Pendidikan Remaja Sebaya Tahun 2016
33.12.	Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
33.13.	Penyusunan Buletin dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015
33.14.	Pengembangan Informasi Hidup Sehat dan Generasi Muda (Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan)
33.15.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Komunikasi Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Komunikasi dan
33.16.	Pelatihan Pengembangan Media Promosi Kesehatan Bagi Petugas Promosi Kesehatan
.....	dst.....
34.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan
34.01.	Pengembangan Pengelolaan Data Sistem Informasi Kesehatan
.....	dst.....
35.	Penanggulangan Penyakit Menular Seksual, HIV AIDS dan Narkoba
35.01.	Pembinaan ODHA
35.02.	Konseling dan Tes Sukarela (VTC) Kelompok Resiko Tinggi
.....	dst.....
33.	Pengelolaan Komunikasi Publik dalam meningkatkan Penyelenggaraan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan
33.01.	Pengembangan Informasi Hidup Sehat (PHBS)
33.03.	Penyebarluasan Informasi Hidup Sehat
33.05.	Peringatan Hari Kesehatan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2014
33.06.	Pemilihan Duta HIV / AID Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014
33.07.	Penyuluhan PHBS Rumah Tangga dan Institusi Pendidikan (Sekolah)
33.08.	Penyusunan Profil Kesehatan dan Profil Promosi Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
33.09.	Promosi Kesehatan Untuk Generasi Muda Saka Bakti Husada

33.11.	Treaning Of Trainer (TOT) Fasilitator Tentang Pendidikan Remaja Sebaya Tahun 2016
33.12.	Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
33.13.	Penyusunan Buletin dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015
33.14.	Pengembangan Informasi Hidup Sehat dan Generasi Muda (Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan)
33.15.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Komunikasi Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Komunikasi dan
33.16.	Pelatihan Pengembangan Media Promosi Kesehatan Bagi Petugas Promosi Kesehatan
.....	dst.....
34.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan
34.01.	Pengembangan Pengelolaan Data Sistem Informasi Kesehatan
.....	dst.....
35.	Penanggulangan Penyakit Menular Seksual, HIV AIDS dan Narkoba
35.01.	Pembinaan ODHA
35.02.	Konseling dan Tes Sukarela (VTC) Kelompok Resiko Tinggi
.....	dst.....
Urusan :	1.03. - PEKERJAAN UMUM
15.	Pembangunan Jalan dan Jembatan
15.01	Perencanaan Pembangunan Jalan
15.02.	Survei Kontur Jalan dan Jembatan
15.03.	Pembangunan Jalan Kabupaten
15.05.	Peningkatan Jembatan
15.06.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15.07.	Peningkaan Jalan
15.08.	Pembangunan Infrastruktur Jalan (Dak Tambahan P3K2 dan Usulan Daerah)
15.09.	Perencanaan Pembangunan Jembatan
15.10.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Jalan dan Jembatan Kabupaten
15.11.	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Jalan dan Jembatan Kabupaten
.....	dst.....
16.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
16.01.	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Saluran Drainase/Riol
16.02.	Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Saluran Drainase, MCK, WC Umum
16.03.	Pendukung Pembangunan Jaringan Air Bersih Potan
16.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16.05.	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase
16.06.	Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)
16.07.	Penunjang Pembangunan Air Bersih Potan
.....	dst.....
17.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
17.01.	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong
17.02.	Survei Kemiringan Lereng Turap/Talud/Bronjong
17.03.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
17.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
17.05.	dst.....

18.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18.01.	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18.02.	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
18.03.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
18.05.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
18.06.	Pengadaan Alat-alat Kelancaran Prasarana Kantor
18.07.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten
18.08.	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
18.09.	Pengadaan Komputer
18.10.	Pengadaan LCD
18.21.	Penyusunan Data Pokok Jalan dan Jembatan
.....	dst.....
19.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
19.01.	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
19.02.	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
19.03.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
19.04.	dst.....
20.	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
20.01.	Inspeksi Kondisi Jalan
20.02.	Inspeksi Kondisi Jembatan
20.03.	Evaluasi dan Pelaporan
20.04.	dst.....
21.	Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
21.01.	Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
21.02.	Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
21.03.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
21.04.	dst.....
22.	Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
22.01.	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
22.02.	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan
22.03.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
22.04.	dst.....
23.	Peningkatan Sarana dan Prasarana
23.01.	Pembangunan Gedung Balai Latihan Kebinamargaan
23.02.	Pembangunan Gedung Workshop
23.03.	Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan
23.04.	Pengadaan Alat-alat Berat
23.05.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat
23.06.	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
23.07.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Balai Latihan Kebinamargaan
23.08.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop
23.09.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan

23.10.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
23.11.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat
23.12.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
23.13.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
23.14.	Rehabilitasi Gedung Kantor
23.15.	Inventarisasi, Pemetaan Quarry dan Kajian Mutu Bahan Konstruksi di Kab. Kapuas Hulu
23.16.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
23.17.	Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Kontruksi dan Tim Sekretariat Jasa Kontruksi Kab. Kapuas Hulu
23.18.	Pelaksanaan Pengujian Mutu Kontruksi di Lapangan dan pada Laboratorium DBMP
23.19.	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Kontruksi
23.20.	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi
23.21.	Pembinaan Teknis Perancangan Campuran dan Pengendalian Mutu Beton
23.22.	Pembinaan Pengawasan Teknis Bidang Ke PU - an
.....	dst.....
24.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
24.01.	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
24.02.	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
24.03.	Perencanaan Pembangunan Reservoir
24.04.	Perencanaan Pembangunan Pintu Air
24.05.	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
24.06.	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
24.07.	Pembangunan Reservoir
24.08.	Pembangunan Pintu Air
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
24.10.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
24.11.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum
24.12.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir
24.13.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
24.14.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Sungai
24.15.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun
24.16.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Petani Pemakai Air
24.17.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
24.18.	Redesign Perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
24.20.	Penyusunan Data Pokok Sumber Daya Air
.....	dst.....
25.	Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
25.01.	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
25.02.	Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
25.03.	Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
25.04.	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
25.05.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air
25.06.	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku
25.07.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
25.08.	dst.....
26.	Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26.01.	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

26.02.	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
26.03.	Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau
26.04.	Rehabilitasi Kawasan Lindung Daerah Tangkapan Sungai dan Danau
26.05.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26.06.	Peningkatan Konversi Air Tanah
26.07.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
26.08.	dst.....
27.	Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
27.01.	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Saluran Drainase/Riol
27.02.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
27.03.	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
27.04.	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah
27.05.	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum
27.06.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT.26)
27.07.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum
27.08.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
27.09.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
27.10.	Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Saluran Drainase/Riol
.....	dst.....
28.	Pengendalian Banjir
28.01.	Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir
28.02.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
28.03.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
28.04.	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendali Banjir
28.05.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir
28.06.	Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
28.07.	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
28.08.	Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir
28.09.	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
28.10.	Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak
28.11.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
28.12.	Study Pengangan Banjir Kelurahan Batu Ampar (Lanjutan)
28.13.	Penanggulangan Banjir di Kelurahan Baru Tengah (ABT)
.....	dst.....
29.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
29.01.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
29.03.	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
29.04.	dst.....
30.	Pembangunan infrastruktur perdesaaan
30.01.	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan
30.02.	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan
30.03.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
30.04.	Pembangunan pasar perdesaaan
30.05.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

30.06.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
30.07.	Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan
30.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30.09.	Inventarisasi Prasarana dan Sarana Penataan Lingkungan Pemukiman Tradisional
30.10.	Operasional Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP)
30.11.	Operasional Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
.....	dst.....
31.	Perencanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang
31.01.	Pra Rancangan Pembuatan Perda Bangunan Gedung
31.02.	Pembuatan Perda dan Perbup RDTRK dan RTBL
31.03.	Sosialisasi Peraturan perundang - undangan Rencana Tata Ruang dan Penertiban IMB
31.04.	Pra Rancangan Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2001 Tentang IMB
31.07.	Sosialisasi Ijin Mendirikan Bangunan
31.08.	Asistensi Kegiatan Perencanaan Bidang Gedung dan Tata Ruang
31.10.	Operasional Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP)
31.11.	Operasional Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
31.12.	Penunjang Kegiatan DAK Air Bersih
.....	dst.....
32.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
32.01.	Pengembangan Penerangan Jalan Umum
.....	dst.....
33.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
33.02.	Penilaian lomba kebersihan
33.03.	Pemeliharaan rutin bidang pertamanan
33.04.	Pemeliharaan Rutin kebersihan Kota
33.06.	Peningkatan penataan taman keindahan kota
33.07.	Pemeliharaan/ penataan Taman Alun Kapuas
.....	dst.....
35.	Pembangunan Gedung Kantor dan fasilitas Umum
35.01.	Perencanaan Pembangunan Rumah Jabatan, Gedung Kantor,Rumah / Fasilitas Umum
35.02.	Peningkatan dan pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum
.....	dst.....
36.	Pembangunan Jalan rabat Beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung
36.02.	Pembangunan jalan rabat beton, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung
36.03.	Perencanaan Teknis dan Survey Subsidi Dana Provinsi, DAK, KPDT, Transmigrasi dan APBD
.....	dst.....
38.	Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan Kota
38.01.	Pra Rancangan Pembuatan Perda Persampahan
38.02.	Penilaian Lomba Kebersihan
38.03.	Pemeliharaan Taman Kota dan Tugu/Gerbang
38.04.	Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan
38.05.	Sosialisasi Perda Retribusi Persampahan
38.06.	Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Kapuas Hulu

39.	Pemeliharaan Prasarana Cipta Karya
39.01.	Penunjang Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya
.....	dst.....
Urusan :	1.05. - PENATAAN RUANG
15.	Perencanaan Tata Ruang
15.01.	Pra Rancangan Pembuatan Perda Bangunan Gedung
15.02.	Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
15.03.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana tata Ruang
15.04.	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
15.05.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
15.06.	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
15.07.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
15.08.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
15.09.	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang
15.10.	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
15.11.	Revisi Rencana Tata Ruang
15.12.	Pelatihan Aparat dalam perencanaan Tata Ruang
15.13.	Survey dan Pemetaan
15.15.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Ruang
15.16.	Updeting Data Kawasan Perumahan dengan Sistem Digital
15.19.	Pembuatan Tempat Pemasangan Perizinan Reklame
15.20.	Pemetaan Bangunan Umum pada Peta Dasar dan Peta Rencana untuk Bangunan yang ber IMB
15.24.	Pembangunan Rumah atas Air Type 21 (Lanjutan)
15.28.	Pelaksanaan Dispensasi Pengurusan IMB (Lanjutan)
15.29.	Penyusunan Rencana Tekhnis Penataan Ruang Kawasan Cepat Tumbuh (lanjutan)
15.39.	Pelaksanaan Dispensasi Pengurusan IMB
.....	dst.....
16.	Pemanfaatan Ruang
16.01.	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
16.02.	Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
16.03.	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
16.05.	Survey dan pemetaan
16.06.	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
16.07.	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang
.....	dst.....
17.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.01.	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
17.02.	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
17.03.	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang
17.04.	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
17.05.	Pengawasan pemanfaatan ruang
17.06.	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
17.07.	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

17.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.09.	dst.....
18.	Peningkatan Penyuluhan dan Teknis Pola Penataan Ruang
18.01.	Survey dan Evaluasi Bangunan Umum Kelurahan Klandasan Ulu dan Ilir
19.	Penyiapan Pengelolaan Data dan Informasi Tentang Bangunan Perkantoran dan Permukiman
19.01.	Survey dan Evaluasi Bangunan Perumahan Klandasan ilir dan Klandasan Ulu
20.	Peningkatan Pelayanan Bantuan Teknis Tentang Perencanaan Penataan Bangunan
20.01.	Monitoring dan Evaluasi Kawasan Perumahan Terencana
.....	dst.....
21.	Peningkatan Administrasi Tentang Pelayanan Perizinan untuk Bangunan Umum dan Bangunan Perumahan
21.01.	Pelayanan Perizinan untuk Bangunan Umum
.....	dst.....
22.	Pelayanan Pengukuran, Pemetaan Situasi, Lokasi Penempatan Bangunan Umum dan Bangunan Perumahan
22.01.	Pengukuran dan Pemetaan Situasi Lokasi Penempatan Bangunan Umum
.....	dst.....
24	Peningkatan PAD melalui Pelayanan Retribusi IMB
2401.	Pelayanan Perizinan untuk Bangunan Perumahan
25.	Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Bangunan
25.01.	Pengawasan Penertiban IMB
.....	dst.....
26.	Peningkatan Koordinasi Dalam Pengendalian Pendataan Pengawasan Penertiban Bangunan
.....	dst.....
26.01.	Pemeriksaan Bangunan Terhadap Konstruksi
27.	Pengelolaan Penerimaan, Pembayaran dan Pengelolaan Penerimaan Retribusi
27.01.	Penertiban Retribusi IMB dan Rumah Sewa
.....	dst.....
Urusan :	1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
15.	Pengembangan data/informasi
15.01.	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
15.02.	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
15.03.	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
15.04.	Penyusunan Buku PDRB Menurut Penggunaan dan PDRB Menurut Lapangan Usaha
15.05.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah
15.06.	Pertemuan Teknis LITBANG dan Statistik
15.08.	Inventarisasi Sarana dan Prasarana Fisik di Kabupaten Kapuas Hulu
15.09.	Pemuktahiran data profil Kabupaten Kapuas Hulu
15.10.	Koordinasi LITBANG dan IPTEK
15.11.	Penyusunan Updating Data Pokok

15.12.	Penyusunan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu
15.13.	Penelitian Potensi Struktur Tanah untuk Pengembangan Pertanian dan Perkebunan di Lintas
15.14.	Pemeliharaan dan Update Web Site
15.15.	Inventarisasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kapuas Hulu
15.16.	Kajian Sektor, Sub Sektor dan Komoditas Unggulan Daerah Perbatasan
15.17.	Penyusunan Profil Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
15.18.	Survey Pemutahiran Data Base Jaringan Irigasi Kabupaten
15.19.	Penyusunan dan Analisis informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
15.20.	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
15.21.	Survey Pemutahiran Data Base Jalan dan Jembatan Kabupaten
15.22.	Pemutahiran Peta Kabupaten Kapuas Hulu
15.23.	Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Danau Sentarum Berbasis Lingkungan
15.24.	Pendataan Produk Unggulan Untuk Perencanaan Pengembangan UKM di Kab. Kapuas Hulu
15.25.	Kelompok Kerja Jaringan Penelitian (Jarlit) Kebijakan Bidang Pendidikan Kab. Kapuas Hulu
15.26.	Penyusunan Peta (Basis Data Grafis) Jaringan Jalan di Kabupaten Kapuas Hulu
15.27.	Penyusunan Peta (Basis Data Grafis) Jaringan Irigasi di Kabupaten Kapuas Hulu
15.28.	Kajian Pemanfaatan Potensi Limbah Perkebunan dan Pertanian Berbasis Masyarakat
15.29.	Kajian Masalah-masalah Pendidikan dalam usaha peningkatan Mutu pendidikan di Kabupaten
15.30.	Kajian Pola Kemitraan Pembangunan Pekebunan Sawit sesuai kondisi masyarakat Kabupaten
15.31.	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) IKK Kecamatan Bunut Hulu
15.32.	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) IKK Kecamatan Seberuang
15.33.	Inventarisasi Infrastruktur di daerah perbatasan
15.34.	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
15.35.	Rencana Pengembangan Pendidikan Tinggi Kabupaten Kapuas Hulu
15.36.	Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
15.38.	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa Tertinggal dan Terpencil di Kab.Kapuas Hulu
15.39.	Kajian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Fokus Bahasan Pada Upaya Peningkatan
15.40.	Kajian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Program Kewirausahaan
15.41.	Kajian Pengembangan Inovasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Hulu
15.42.	Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIM-PPD)
15.43.	Analisis Kebutuhan Satuan dan Sarana Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu
15.44.	Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan
15.45.	Penyusunan Buku Kapuas Hulu Membangun
15.46.	Fasilitas Pendirian Perguruan Tinggi Kabupaten Kapuas Hulu
15.47.	Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dalam Rangka Persiapan Penyusunan RPJMD Kab. Kapuas Hulu 2016-2020
15.48.	Kajian Pengembangan Perekonomian Berbasis Pengetahuan di Kabupaten Kapuas Hulu
15.49.	Kajian Peningkatan Produksi Pertanian dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Pangan di Kabupaten Kapuas Hulu
15.50.	Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIM-PPD)
15.55.	Pemeliharaan dan Updating Web Site
.....	dst.....
16.	Kerjasama Pembangunan
16.01.	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
16.02.	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
16.03.	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga
16.04.	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
16.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.06.	dst.....

17.	Pengembangan Wilayah Perbatasan
17.01.	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
17.02.	Sosialisai kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara
17.03.	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
17.04.	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
17.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.06.	Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan
17.07.	Koordinasi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu
17.08.	Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Kapuas
17.09.	Kajian Pengelolaan Infrastruktur Fisik di Wilayah Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu
17.10.	Penyusunan Rencana umum Jaringan Transportasi Jalan (RUTJ) di Wilayah Perbatasan
17.11.	Koordinasi dan Sinkronisasi program
17.13.	Inventarisasi permasalahan di kecamatan perbatasan
17.14.	Koordinasi dan konsultasi pengelolaan kawasan Perbatasan
17.15.	Inventarisasi potensi ekonomi dan sosial kawasan perbatasan
17.16.	Konsultasi Program Bidang Pengelolaan Batas Negara
17.17.	Sinkronisasi Program Kerja Pengelolaan Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan
17.18.	Inventarisasi Patok Batas Wilayah
17.19.	Musyawarah Rencana Pembanguna Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
18.	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
18.01.	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
18.02.	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
18.03.	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
18.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.05.	Penunjang Kelompok Kerja (POKJA) Heart of Borneo (HOB)
18.06.	Penunjang kegiatan P2IP-DT
18.07.	Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAAMSIMAS) III Kab. Kapuas Hulu
18.08.	Penunjang kegiatan P2WP
18.09.	Penunjang kegiatan percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
18.10.	Penunjang Kegiatan P4DT
18.11.	Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan
18.12.	Percepatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
18.13.	Penunjang Tim Koordinasi Program Kemakmuran Hijau (Green Prosperity) di Kab.Kapuas Hulu
18.14.	Penyusunan Rencana Kawasan Strategi Cepat Tumbuh dan Potensial di Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
19.	Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
19.09.	Koordinasi Perencanaan Air Bersih, Drainase dan Sanitasi Permukiman
19.10.	Pemetaan Kawasan Kumuh perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu
19.12.	Penyusunan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Perkotaan
19.13.	Penyusunan Materi Teknis Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan & Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas hulu
19.14.	Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Kec.Putussibau Utara dan Putussibau Selatan)
19.15.	Kajian Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Wilayah Kab. Kapuas Hulu
.....	dst.....

20.	peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
20.01.	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
20.02.	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
20.03.	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
20.04.	Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
21.	perencanaan pembangunan daerah
21.01.	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
21.02.	Penyusunan RPJP Tahun 2006-2026
21.03.	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
21.04.	Penetapan RPJPD
21.05.	Penyusunan rancangan RPJMD Kab.Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016-2020
21.06.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016-2020
21.07.	Penetapan RPJMD
21.08.	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Tahun Anggaran 2017
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kab. Kapuas Hulu
21.10.	Penetapan PERDA tentang RPJMD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016-2020
21.11.	Penyelenggaraan Forum SKPD Tahun 2012
21.12.	Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2015
21.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
21.14.	Penyusunan LKPAJ
21.15.	Penyusunan KUA - PPAS Tahun 2017
21.16.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang fisik sarana dan
21.17.	Study Pemetaan Investasi berdasarkan Pemanfaatan Potensi Wilayah (Lanjutan)
21.18.	Penyusunan Profil Proyek-Proyek Investasi (Lanjutan)
21.19.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) Tahun 2006-2026 (Lanjutan)
21.20.	Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi Kebutuhan /Dokumen Perencanaan (Study Pemetaan Investasi berdasarkan Pemanfaatan Potensi wilayah Kota)(Lanjutan)
21.22.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan DAK di Kabupaten Kapuas Hulu
21.23.	Penyelenggaraan Forum SKPD
21.24.	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2015
21.25.	Evaluasi dan Pengendalian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015
21.26.	Penyusunan rencana strategis Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu
21.27.	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Kapuas Hulu
21.28.	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Thn. 2016
21.29.	Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Kapuas Hulu
21.30.	Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
21.31.	Review Rencana Program Investasi Jangka Panjang Menengah (RPIJM) Kab. Kapuas Hulu
.....	dst.....
22.	perencanaan pembangunan ekonomi
22.01.	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
22.02.	Penyusunan indikator ekonomi daerah
22.03.	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
22.04.	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
22.05.	Penyusunan tabel input output daerah
22.06.	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

22.07.	Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
22.08.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
22.09.	Penyusunan dan Pengembangan Pusat Niaga Perikanan/Nelayan Terpadu (Lanjutan)
22.10.	Penyusunan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Unggulan Agrobisnis Terpadu (KUAT)
22.11.	Penunjang kegiatan P4DT
22.12.	Penunjang pelaksanaan kegiatan POKJA TP3D
22.13.	Pelaksanaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
22.14.	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan pada Bidang Perekonomian
22.15.	Penunjang Pembinaan P2WKSS dan Lomba Desa
22.16.	Pelaksanaan Operasional POKJA TP3K
22.17.	Penyusunan Rencana Umum Kawasan Industri di Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
23.	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
23.01.	Koordinasi Penyusunan masterplan Pembangunan Sarana Pendidikan di Kabupaten Kapuas
23.03.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
23.04.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
23.05.	Penyusunan rencana strategis perlindungan perempuan dan trafficking di kabupaten Kapuas
23.06.	Perencanaan Kebutuhan Fasilitas Politeknik
23.07.	Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan RUSD
23.08.	Penilaian Tim Independen Terhadap Hasil Pendataan Penduduk Miskin
23.11.	Pengawasan dan monitoring pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya
23.12.	Koordinasi Program Bantuan Langsung Masyarakat Kawasan Strategis Kabupaten (BLM-KSK)
23.13.	Koordinasi Berkala Pelaksanaan Program-program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Budaya
23.14.	Penunjang Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Program Bidang Sosial Budaya
23.15.	Penunjang Program Quick Win Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Kab. Kapuas Hulu
.....	dst.....
24.	Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
24.04.	Penyusunan Rencana Pengembangan Energi Alternatif Untuk ketenaga Listrik di Kab. Kapuas
24.05.	Rencana Detail Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik Daerah Terisolir dan Tertinggal
24.06.	Penyusunan Rencana Pengembangan Moda Transportasi Sungai di Kabupaten Kapuas Hulu
24.07.	Penyusunan Masterplan Jaringan Drainase Kota Kecamatan Putussibau Selatan
24.09.	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
24.16.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang
24.18.	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana di Kabupaten Kapuas Hulu
24.19.	Survey Pemuktahiran data Sarana dan Prasarana Wilayah Kab. Kapuas Hulu
24.20.	Inventarisasi Kawasan Kumuh Ibukota Kecamatan Badau, Hulu Gurung, Semitau dan Silat Hilir
24.21.	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum di Kab. Kapuas Hulu
24.30.	Penyusunan Peraturan Daerah Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor TNBK-TNDS 2016 - 2036
.....	dst.....
26.	Perencanaan Tata Ruang
26.04.	Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
26.05.	Penunjang Kegiatan Penataan Ruang Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
26.06.	Rencana Induk Sistem penyediaan Air minum (SPAM) IKK Na.Embaloh
26.07.	Rencana induk sistem penyediaan air minum(SPAM) IKK Suhaid
26.09.	Penyusunan Rencana Sumber Daya Alam Spatial (NSAS) di Kab.Kapuas Hulu
26.10.	Penyusunan RAD PPDT Kab Kapuas hulu Tahun 2010

26.11.	Penyusunan rencana detail tata ruang kota kecamatan Selimbau
26.12.	Penyusunan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu
26.13.	Pemutakhiran data profil kabupaten Kapuas hulu
26.14.	Penyusunan indeks gini ratio kabupaten Kapuas Hulu
26.15.	Pembuatan Peta Perusahaan Perkebunan di kabupaten Kapuas Hulu
26.16.	Pembuatan Peta Perusahaan Pertambangan di kabupaten Kapuas Hulu
26.17.	Pembuatan Peta Areal HPH di kabupaten Kapuas Hulu
26.18.	Pemutahiran data pemetaan dan Inventarisasi jaringan irigasi di kab.Kapuas Hulu
26.19.	Pemutakhiran data base jalan dan jembatan Kabupaten Kapuas Hulu
26.22.	Penunjang kegiatan bidang fisik Prasarana dan Tata Ruang Wilayah Daerah di Kab. Kapuas Hulu
26.23.	Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Ekowisata Danau Sentarum
26.24.	Pelaksanaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016
26.26.	Penunjang Kegiatan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
26.27.	Penunjang Program Pengembangan Kota Hijau Kabupaten kapuas Hulu
26.28.	Sistem Informasi Tata Ruang Terpadu (SIMTARU)
26.29.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kab. Kapuas Hulu 2010-2030
26.30.	Fasilitasi Persetujuan Substansi Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
26.31.	Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang di Kabupaten Kapuas Hulu
26.32.	Review Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Hulu Gurung 2014-2034
26.34.	Fasilitasi Persetujuan Substansi Peta RTRW Kab. Kapuas Hulu dari Badan Informasi Geospasial
26.35.	Sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu 2014 - 2034
.....	dst.....
Urusan :	1.07. - PERHUBUNGAN
15.	Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya
15.01.	Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
15.02.	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
15.03.	Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
15.04.	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
15.05.	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
15.06.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan
15.07.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
15.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.09.	Pembangunan Terminal barang Tahap I
15.10.	Pembuatan Sistem Informasi manajemen Angkutan Umum
15.11.	Penyusunan Pembuatan Sertifikat Terminal dan Balik Nama Sertifikat Tanah
15.12.	Studi Angkutan Masal
15.13.	Studi Tataran Transportasi Lokal
15.14.	Survei Kepelabuhan
15.15.	Pelaksanaan Survei Kapal Isi Kotor Lebih Kecil Dari GT.7
15.16.	Survei Penumpang Angkutan Liar
15.17.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kapuas
15.18.	Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
15.19.	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIRUP dan LPSE di SKPD
.....	dst.....
16.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
16.01.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

16.02.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
16.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
16.04.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
16.05.	Pembangunan Garasi Bus Sekolah
16.06.	Perawatan / Penggantian Rambu-rambu jalan
16.07.	Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh Dan Halte
16.08.	Pemeliharaan/Pengecatan Kerb, Pagar Jembatan, Marka Jalan, Marka Di Tepi Jalan, Zebra
16.09.	Pemeliharaan Gedung Terminal, Kerb/Marka
16.10.	Pengecatan Median dan Trotoar Jalan
.....	dst.....
17.	Peningkatan pelayanan angkutan
17.01.	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
17.02.	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
17.03.	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
17.04.	Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang
17.05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
17.06.	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal
17.07.	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan
17.08.	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
.....	dst.....
17.	Peningkatan pelayanan angkutan
17.01.	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
17.02.	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
17.03.	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
17.04.	Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang
17.05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
17.06.	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal
17.07.	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan
17.08.	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
17.09.	Registrasi dan pendataan kendaraan Motor Air
17.10.	Pengawasan dan Patroli lalu lintas
17.11.	Pengawasan pejabat / tamu resmi
17.12.	Pengawasan dan patroli sungai dan danau
17.13.	Sosialisasi keselamatan transportasi darat
17.14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
17.15.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan
17.16.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
17.17.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.18.	Sosialisasi, Registrasi, Pendataan Motor Air, Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Program dan Prasarana ASDP Kabupaten Kapuas Hulu
17.19.	Pengoperasian Bus Sekolah
17.20.	Operasi Pemeriksaan Lalu Lintas (Razia)
17.21.	Operasi Angkutan Lebaran
17.22.	Pengamanan Dan Pengendalian Parkir
17.23.	Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Laut
17.24.	Bantuan Pakaian Seragam Angkutan Kota
17.25.	Penertiban Angkutan Kota

17.26.	Pengembangan Sarana Angkutan Daerah Tertinggal
17.27.	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas ASDP
17.28.	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat
17.29.	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Sungai dan Danau
17.30.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
17.31.	Penunjang Operasional Bus Sekolah
17.32.	Pemetaan Sistem Informasi Infrastruktur Transfortasi di Kabupaten Kapuas Hulu
17.33.	Pelayanan KIR Keliling
17.34.	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas ASDP
17.35.	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Sungai dan Danau
17.36.	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
17.37.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Penyeberangan di Air (ASDP)
17.38.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Ijin Trayek
17.39.	Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Rambu-rambu Lalu Lintas
17.40.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
17.41.	Sosialisasi PERDA Parkir Ditepi Jalan Umum
17.42.	Penyusunan Rancangan PERDA Tentang Lalulintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Kab. Kapuas Hulu
.....	dst.....
18.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
18.01.	Pembangunan gedung terminal
18.02.	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
18.03.	Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal
18.04.	Pembangunan Dermaga
18.05.	Pembangunan Steger/tangga penyeberangan
18.06.	Pembangunan tempat persinggahan kendaraan air
18.07.	Pengoperasian Terminal di kedamin
18.08.	Pembangunan Tangga Tempat Persinggahan Kendaraan Air
18.09.	Pembangunan Sarana Pendukung Terminal
18.10.	Penyediaan Jasa Konsultasi dan Perencanaan Sarana dan Prasarana ASDP
18.11.	Perencanaan / Redesign Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
18.12.	Rehabilitasi/ Peningkatan Terminal Badau
18.13.	Pembangunan Lanting Perhubungan
18.14.	PembangunanTangga turu/ Naik Lanting
18.15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bandar Udara
18.16.	Pembangunan Halte, Gedung dan Terminal
18.17.	Pembangunan Saran dan Prasarana Angkutan Sungai Danau
18.18.	Perencanaan / Redesain Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal dan Jembatan Timbang
.....	dst.....
19.	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
19.01.	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta Marka Jalan
19.02.	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Sungai dan Danau
19.03.	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Linight
19.04.	Pemeliharaan Jalur Lalu Lintas Sungai
19.05.	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat
.....	dst.....
20.	Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

20.01.	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
20.02.	Pengadaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
20.03.	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
20.04.	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
20.05.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
20.06.	Pengadaan Alat Pengujian Kedaraan Bermotor
20.07.	Pengadaan Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor
.....	dst.....
21.	Pengembangan data/Informasi / Statistik daerah
21.01.	Penyusunan updating data pokok
21.02.	Peningkatan kapasitas pusat internet daerah
21.03.	Pengelolaan dan pengembangan website pemerintah kabupaten Kapuas Hulu
21.04.	Pembangunan data base / internet Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
22.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
22.01.	Penyebarluasan informasi melalui MCAP dan CAP
22.02.	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)
22.03.	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK)
22.05.	Optimalisasi Pemanfaatan Desa Informasi Sebagai Sarana Desa Informasi
22.06.	Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan PLIK
22.07.	Pengadaan Alat - alat Komunikasi dan Radio
22.08.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
22.09.	Pengelolaan dan Pengembangan Website SKPD
22.10.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara
22.11.	Pengurusan Ijin Frekuensi Radio Daerah
22.12.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPPL)
22.13.	Pengadaan Jaringan internet Dishubkominfo
22.14.	Pembangunan dan pengembangan ICT Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
23.	Peningkatan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi melalui Media Penyiaran
23.02.	Pengadaan Jaringan Internet
23.05.	Pengadaan Alat-alat Komunikasi
23.06.	Pengadaan Alat-Alat Studio Radio
23.07.	Pemeliharaan Pemancar Radio
23.08.	Sosialisasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
23.09.	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian Menara Telekomunikasi
23.10.	Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio RASIKA
23.11.	Pelaksanaan Pembangunan Pemetaan (Cell Plant) Menara Telekomunikasi
23.12.	Sosialisasi PERDA tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
23.13.	Pemasangan Instalasi dan Jaringan Data Center Kabupaten
23.14.	Penyusunan Rancangan Tentang Peraturan Daerah tentang Penyiaran Publik Lokal (LPPL) RASIKA
23.15.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab.Kapuas Hulu
23.16.	Operasional Kegiatan E-Government Kabupaten Kapuas Hulu
23.17.	Sosialisasi Pemanfaatan Internet Protocol Televisi (TV IP)

23.18.	Monitoring dan Pendataan Tower di Kabupaten Kapuas Hulu
23.19.	Sosialisasi PERDA dan PERBUB tentang Tower Menara Telekomunikasi
.....	dst.....
24.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
24.01.	Sosialisasi Kelompok Informasi (KIM) Masyarakat Kapuas Hulu
24.02.	Pengelolaan dan Pengembangan Website Kab. Kapuas Hulu dan Website Dithubkominfo
24.03.	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Kab. Kapuas Hulu
24.04.	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
24.05.	Pendataan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Kab. Kapuas Hulu
24.06.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui LPPL Rasika - FM
24.07.	Pembangunan E-Government - Kab. Kapuas Hulu
24.08.	Pelaksanaan Surat Elektronik (e-office) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
24.09.	Desiminasi Informasi Media Tradisional (METRA) Melalui Pertunjukan Rakyat
24.10.	Revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
24.11.	Sosialisasi Internet Sehat
24.12.	Sosialisasi Jurnalis Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
.....	dst.....
Urusan :	1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
15.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
15.02.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
.....	dst.....
16.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16.01.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
16.02.	Koordinasi penilaian langit biru
16.03.	Pemantauan Kualitas Lingkungan
16.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
16.05.	Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
16.06.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3
16.07.	Pengkajian dampak lingkungan
16.08.	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
16.09.	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
16.10.	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
16.11.	Pengembangan produksi ramah lingkungan
16.12.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
16.13.	Koordinasi penyusunan AMDAL
16.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
16.15.	Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif
16.16.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.17.	Pemantauan Kualitas Air
16.18.	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup
16.19.	Pengadaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan
.....	dst.....
17.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
17.01.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber daya Air

17.02.	Pantai dan Laut Lestari
17.03.	Pengembangan dan Pematapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan
17.04.	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
17.05.	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
17.06.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
17.07.	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
17.08.	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA
17.09.	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
17.10.	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
17.11.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut
17.12.	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional
17.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
17.15.	Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
17.16.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.17.	Pemuktahiran Data dan Informasi Kawasan Danau Lindung
17.18.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Sumber Daya Air
17.19.	Study Kelayakan Air Baku di Kabupaten Kapuas Hulu
17.20.	Keikutsertaan Masyarakat Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup
17.21.	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Generasi Muda Satuan Karya KALPATARU
.....	dst.....
18.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
18.01.	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
18.02.	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
18.03.	Rehabilitasi hutan dan lahan
18.04.	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
18.05.	Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang
18.06.	Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang
18.07.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SD
18.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.09.	Penilaian Kalpataru tingkat kabupaten
18.10.	Dst.....
19.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
19.01.	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
19.02.	Pengembangan data dan informasi lingkungan
19.03.	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
19.04.	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
19.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.06.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
19.07.	Penyusunan Konsep Peraturan Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup di Putussibau Kab. Kapuas Hulu
.....	dst.....
20.	Peningkatan Pengendalian Polusi
20.01.	Pengujian emisi kendaraan bermotor
20.02.	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
20.03.	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
20.04.	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

20.05.	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
20.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.07.	dst
21.	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan
21.01.	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
21.02.	Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
21.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.04.	dst.....
22.	Pengendalian kebakaran hutan
22.01.	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
22.02.	Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
22.03.	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
22.04.	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
22.05.	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
22.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22.07.	dst....
23.	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
23.01.	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
23.02.	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
23.03.	Peningkatan SDM Pengelolaan Pesisir dan Laut
.....	dst.....
24.	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
24.01.	Penyusunan kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan RTH
24.02.	Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
24.03.	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
24.04.	Penyusunan program pengembangan RTH
24.05.	Penataan RTH
24.06.	Pemeliharaan RTH
24.07.	Pengembangan taman rekreasi
24.08.	Pengawasan dan pengendalian RTH
24.09.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
24.10.	Monitoring dan evaluasi
24.11.	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/DAK
24.12.	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Pendamping
24.13.	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Lanjutan
.....	dst.....
25.	Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan
25.01.	Pengawasan pelaksanaan AMDAL UKL / UPL
.....	dst.....
26.	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota
26.01.	Pembibitan, Pengadaan Dan Dekorasi Kota, Penghijauan Dan Penanaman Pohon Peneduh
26.02.	Penyusunan Desain Landscaping Trotoar dan Taman
.....	dst.....

27.	Peningkatan Kebersihan Kota
27.01.	Pemeliharaan Alat Angkutan darat & Alat Berat
27.02.	Pembersihan Draenase
27.03.	Mengumpulkan dan Mengangkut Sampah dari TPS ke TPA
27.04.	Melaksanakan Penyapuan Dalam Kota
.....	dst.....
28.	Pengelolaan Areal Pemakaman
28.01.	Pembangunan Kebun Raya Balikpapan (Lanjutan)
28.02.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman (pemagaran muslim KM. 0,5 Balikpapan)
.....	dst.....
29.	Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
29.01.	Pengelolaan Pesisir dan Laut Balikpapan (Lanjutan)
29.02.	Penanganan Hutan Kota (Inventarisasi & Pemagaran) (Lanjutan)
29.03.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Hulu dan
29.04.	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
29.05.	Pemberian Persetujuan AMDAL, Rekomendasi UKL/UPL dan Persetujuan SPPL
29.06.	Reboisasi (Dana Pendamping DAK-DR)
29.07.	Penghijauan (DAK-DR)
.....	dst.....
30.	Peningkatan Keindahan Kota
30.01.	Rehabilitasi Pot dan Penanaman Taman di taman Trotoar Masjid Al Taqwa-Gelora (lanjutan)
30.02.	Rehabilitasi dan Pemasangan Pagar BRC Median Jalan Depan SMA N 1 Gn. Pasir, Jalan
.....	dst.....
31.	Pengendalian dan Pengawasan Hutan Lindung
31.01.	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Kota Balikpapan (Lanjutan)
31.02.	Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan (Subsidi)
31.03.	Pemagaran Hutan Lindung Sungai Wain (Lanjutan-Subsidi)
31.04.	Pengelolaan Teluk Balikpapan (Subsidi)
.....	dst.....
32.	Pengkajian Dampak Lingkungan
32.01.	Peningkatan Pelayanan Kajian Lingkungan
.....	dst.....
34.	Program ADIPURA
34.01.	Penghijauan dan Penanaman Pohon
34.02.	Pembuatan Jalan Beton
34.03.	Pengurugan Permukaan Sampah dengan Tanah Urug
34.04.	Pengadaan Agregat untuk Pemeliharaan Jalan Masuk ke TPA
34.05.	Perbaikan Bak Sampah dan Perintisan di Wilayah Timur
34.06.	Penyedotan Tinja Terminal batu
34.07.	Mengumpulkan dan Mengangkut Sampah dari TPS ke TPA (II)
34.09.	Perbaikan Tutup TPS dan Tempat Bunga (II)
.....	dst.....

Urusan :	1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15.	Penataan Administarsi Kependudukan
15.02.	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
15.03.	Implemtasi Sistem Administarsi Kependudukan (membangun updating, dan pemeliharaan)
15.05.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
15.06.	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi Kependudukan
15.07.	Penyediaan Informasi yang dapat di akses masyarakat
15.08.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
15.09.	Pengembangan Data Base Kependudukan
15.10.	Penyusunan Kebijakan Kependudukan
15.11.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil
15.12.	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Pencatatan Sipil
15.15.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pelayanan Pembuatan Akta Catatan Sipil
15.16.	Sosialisasi Renstra 2011 dan Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008
15.17.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas di Perbatasan antar Negara
15.18.	Pemuktahiran Data Kependudukan, pemberian NIK dan Penerapan E-KTP
15.19.	review, Monitoring dan Penyajian Pengelolaan Data Base SIAK
15.20.	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil
15.21.	Monitoring dan Evaluasi Pembuatan Akta
15.22.	Review, Monitoring dan Updating Pengelolaan / Perangkat SIAK
15.23.	Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se Kalbar di Putussibau
.....	dst.....
16.	Jaminan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
16.01.	Penyusunan RAPERDA Kab. KH tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu KK, KTP dan Akta Catatan Sipil
16.02.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
16.03.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas di Perbatasan
16.04.	Koordinasi Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil
16.05.	Penyusunan PERBUP Kapuas Hulu tentang Pelaksanaan PERDA Administrasi Kependudukan
16.06.	Penyusunan PERBUP Kapuas Hulu tentang Pelaksanaan PERDA Pencatatan Sipil
16.07.	Penyediaan Dokumen Administarsi Kependudukan
16.08.	Penyediaan Dokumen Administrasi Catatan Sipil
16.09.	Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik (e-KTP)
16.10.	Penyediaan Jasa Pelayanan KTP Elektronik
16.11.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Program KTP Elektronik
16.12.	Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Program KTP Elektronik
16.13.	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Pelaksanaan KTP Elektronik
16.14.	Pelatihan Tenaga Pelaksana Pelayanan KTP Elektronik
16.15.	Penyediaan Peralatan Mobile Pelaksanaan KTP Elektronik
16.16.	Pelayanan KTP Elektronik bagi masyarakat daerah terpencil sulit transportasi
16.17.	Penyediaan Alat Pendukung E-KTP dan Pencatatan Sipil
16.18.	Sosialisasi dan penataan Kearsipan
16.19.	Penyusuna Data Base dan Informasi Kearsipan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.21.	Pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan
16.22.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan
16.23.	Penyediaan Dokumen Administrasi Catatan Sipil
16.24.	Sosialisasi Administrasi Kependudukan

.....	dst.....
Urusan :	1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
15.01.	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
15.02.	Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik
15.03.	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
15.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15.05.	Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender Tingkat Kecamatan
.....	dst.....
16.	Penguatan Kelembagaan Pengarus Utama Gender dan Anak
16.01.	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan
16.02.	Fasilitasi Perkembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
16.03.	Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak
16.04.	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
16.05.	Penguatan Kelembagaan Pengarus Utama Gender dan Anak
16.07.	Evaluasi Pelaksanaan PUG
16.08.	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
16.09.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16.10.	Pemberdayaan Perempuan
.....	dst.....
17.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
17.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
17.02.	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT
17.03.	Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan
17.04.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)
17.05.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
17.06.	Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT
17.07.	Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan cacat
17.08.	Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan
17.09.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
17.10.	Peningkatan Kualitas Keterampilan Perempuan
17.11.	dst.....
18.	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
18.01.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
18.02.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
18.03.	Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera
18.04.	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha
18.05.	Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
18.06.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
18.07.	dst.....
19.	Penguatan Kelembagaan Pengarus Utama Gender dan Anak
19.01.	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam pengambilan keputusan
19.02.	Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender

19.03.	dst.....
20.	Peningkatan dan Pemberdayaan Organisasi dan Kesejahteraan Perempuan
20.01.	Pembinaan P2W-KSS
20.02.	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Kartini Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu
20.03.	Pembinaan Kelompok Keterampilan Wanita Putus Sekolah
20.04.	Pembinaan Desa PRIMA (Perempuan Indonesai Maju Mandiri)
20.05.	Pembinaan Kelompok Keterampilan Remaja Putus Sekolah (Tata Rias Wajah)
20.06.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Kelompok Wanita
.....	dst.....
21.	Pendataan dan Pendayagunaan Data Keluarga dan Penduduk
21.01.	Pendataan Keluarga Sejahtera
21.02.	Analisis dan Evaluasi data Keluarga Sejahtera
21.03.	Kegiatan Mini Survey Peserta KB Aktif
21.04.	Pengelolaan Data Dinamis
21.05.	Pemetaan Keluarga Miskin
.....	dst.....
22.	Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan serta Kesetaraan Gender
22.01.	Penyuluhan UU Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU Trafficking Tingkat Kecamatan
22.02.	Penanganan Korban Trafficking dan KDRT Perempuan dan Anak
22.03.	Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender Tingkat Kecamatan
22.04.	Pelatihan Keterampilan Korban Trafficking dan KDRT Perempuan dan Anak
.....	dst.....
23.	Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan
23.01.	Pembinaan Peningkatan Mutu Pelayanan Pos Terpadu dan Pelatihan Kader Posyandu
23.02.	Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu
23.03.	Sosialisasi KDRT dan Perlindungan Anak Tingkat Kecamatan
23.04.	Pelaksanaan Pendataan Korban Trafficking dan KDRT
23.05.	Peringatan Hari Kartini
23.06.	Pembentukan dan Sosialisasi P2TP2A
23.07.	Sosialisasi UU PKDRT, UU PA, dan UU Trafficking
.....	dst.....
24.	Pemberdayaan Keluarga dan Pembinaan Remaja
24.01.	Penyuluhan Bahaya HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba untuk Remaja
24.02.	Kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
25.	Keluarga Berencana
25.01.	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
25.02.	Seleksi dan Pengiriman KB Lestari
25.03.	Advokasi dan KIE tentang Kesejahteraan Reproduksi Remaja
25.04.	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
25.05.	Pembinaan Operasional Pusat Informasi dan Konsultasi Kesejahteraan Reproduksi Remaja
25.06.	Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan KB
25.07.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Keluarga Berencana

.....	dst.....
26.	Pelayanan Kontrasepsi
26.01.	Pelayanan Konseling KB
26.02.	Pelayanan Keluarga Berencana Keliling
26.03.	Pengadaan Alat Kontrasepsi
26.04.	Pengadaan BKB - KIT (APE)
26.05.	Pengadaan Alat-alat Pelayanan KB
.....	dst.....
27.	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
27.01.	TNI Manunggal - KB Kesehatan (TMKK)
27.02.	Kesatuan Gerak Bhayangkara- KB Kesehatan
27.03.	Kesatuan Gerak PKK - KB Kesehatan
27.04.	Pembinaan PLKB PKB
27.05.	Pembinaan Operasional PIKRR dan Penyuluh Narkoba
27.06.	Pameran Produksi UPPKS dan HARGANAS
27.07.	Perkemahan Bakti Saka Kencana
27.11.	Pembinaan PLKB PKB
27.12.	Pengadaan Sarana Alat Permainan Edukatif
27.13.	Pembinaan pada Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
27.14.	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (Pembentukan Kelompok BKB, BKR dan BKL)
.....	dst.....
Urusan :	1.12. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
15.	Keluarga Berencana
15.01.	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
15.02.	Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS
15.03.	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
15.04.	Promosi Pelayanan Khiba
15.05.	Pembinaan Keluarga Berencana
15.06.	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim Kb Keliling
15.07.	Tim KB Keliling
15.08.	Pertemuan Medis Teknis
15.09.	Pencabutan Implan
15.10.	Operasional Pembinaan Dokter/ Bidan Praktek Swasta
15.11.	Pertemuan/Rapat Koordinasi Perencanaan Operasional Pelayanan KB Tingkat Kota
15.12.	Pengelolaan Data Basis Perencanaan
15.13.	Pengelolaan dan Penyajian Data Klinik KB dan Pengendalian Lapangan
15.14.	Pengelolaan Data Program melalui Komputer
15.15.	Pengadaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan
15.16.	Orientasi Recording Reporting bagi Petugas Klinik dan Petugas KB di Lapangan
15.17.	Pembinaan Petugas Pencatatan dan Pelaporan
15.18.	Penerbitan Buku/buletin Informasi Program
15.19.	Pendayagunaan Infrastruktur SIDUGA
15.20.	Analisis dan Evaluasi Program KB/KS
15.21.	Pendataan KB
15.22.	Penetapan Target (PPM-PB/AA)

.....	dst.....
16.	Kesejahteraan Reproduksi Remaja
16.01.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan eproduksi Remaja (KRR)
16.02.	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
16.03.	dst.....
17.	Pelayanan Kontrasepsi
17.01.	Pelayanan Konseling KB
17.02.	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
17.03.	Pengadaan Alat Kontrasepsi dalam rangka TKBK momentum
17.04.	Pelayanan KB Medis Operasi
17.05.	Pengadaan Alat Kontrasepsi bagi masyarakat rentan
.....	dst.....
18.	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
18.01.	Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
18.02.	Penilaian Institusi masyarakat Pedesaan (IMP)
19.	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok kegiatan di masyarakat
19.01.	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
19.02.	dst.....
20.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
20.01.	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR
20.02.	Fasilitasi Forum Pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
20.03.	dst.....
21.	Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan HIV/AIDS
21.01.	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
21.02.	dst.....
22.	Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
22.01.	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
22.02.	dst.....
23.	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
23.01.	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
23.02.	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga
23.03.	Pembinaan Kelembagaan Institusi Masyarakat Pedesaan
23.04.	Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
23.05.	Peberdayaan Ekonomi Keluarga
.....	dst.....
24.	Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
24.01.	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
24.02.	dst.....
25.	Pengembangan SDM PKB

25.01.	Bimbingan Teknis Mekanisme Pelayanan Keluarga Berencana
.....	dst.....
Urusan :	1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
15.	Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
15.01.	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
15.02.	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
15.03.	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
15.04.	Pendirian unit penanganan pengaduan
15.05.	Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional
15.06.	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
15.07.	Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah
15.08.	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
15.09.	Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
15.10.	Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah
15.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.13.	Diklat Management UKM
15.14.	Monitoring dan evaluasi UKM penerima dana Program Pemerintah
15.15.	Penilaian UKM Berprestasi
15.16.	Pengembangan Wirausaha baru UKM
15.17.	Promosi / pameran dagang UKM
15.18.	Temu usaha kemitraan bagi UKM
15.19.	Diklat Achievement Motivation Training (AMT) bagi UKM
15.20.	Bazar bersama Industri Kerajinan UKM / IKM
15.21.	Monitoring Dana Bergulir
.....	dst.....
16.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
16.01.	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
16.02.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
16.03.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
16.05.	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi
16.06.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
16.07.	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
16.08.	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
16.09.	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan
16.10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.11.	dst.....
17.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17.01.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
17.02.	Pengembangan klaster bisnis
17.03.	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
17.04.	Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17.05.	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17.06.	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
17.08.	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah
17.09.	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

17.10.	Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
17.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.12.	Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
17.13.	Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
17.14.	Koordinasi dan Konsultasi Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
17.15.	Peningkatan Wawasan Sumber Daya Aparatur PNS Bidang Koperasi dan UMKM
.....	dst.....
18.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
18.01.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi ¹
18.02.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
18.03.	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
18.04.	Seminar Tentang Perkoperasian
18.05.	Pemetaan Klasifikasi dan Penilaian Koperasi, KSP/USP, LKM
18.06.	Pendataan dan Monitoring KUMKM
18.07.	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
18.08.	Penilaian Koperasi, KSP/USP, KJKS dan UJKS
18.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.11.	Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima dana Program Pemerintah
18.12.	Magang Pengurus Koperasi
18.13.	Penilaian Koperasi Berprestasi
18.14.	Pengembangan Wirausaha Baru
18.15.	Sosialisasi Pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris
18.16.	Pembina, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
18.17.	Pelatihan Manajemen bagi Pengelola Koperasi UMKM
18.18.	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi
18.19.	Pelatihan Manajemen Sistem Inovasi
.....	dst.....
19.	Peningkatan Industri Rumah tangga, Industri Kecil dan Menengah
19.01.	Inventarisasi dan Evaluasi Program Indagkop
19.02.	Monitoring dan Evaluasi Industri (IKAH)
19.03.	Monitoring dan Evaluasi Industri (ILMEA)
19.04.	Monitoring dan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
19.05.	Monitoring dan Evaluasi bagi UKM (Seksi UKM)
19.06.	Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (Seksi Metrologi)
19.07.	Pengawasan / Kontrol Tugas Kemetrolgian (Seksi Metrologi)
19.08.	Pengawasan / Monitoring barang-Barang Parcel (Seksi Metrologi)
19.09.	Penyuluhan Usaha Indagkop (Pejabat Fungsional)
19.10.	Penyuluhan Usaha Kecil dan Koperasi
.....	dst.....
20.	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
20.01.	Monitoring Kebutuhan Pokok Masyarakat
20.02.	Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar
.....	dst.....
21.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
21.01.	Pendataan dan Pembaharuan Perizinan Bidang Perdagangan

21.02.	Penyuluhan Peningkatan Disiplin PKL dan Asongan
21.03.	Pendataan PKL di Kawasan Perkotaan dan Kecamatan
21.04.	Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
21.05.	Operasi sisir perizinan
21.06.	Penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah
21.07.	Promosi Produk Expo Daerah
21.08.	Pendataan Pasar di Kecamatan (UPTD) dan Penarikan Retribusi Pasar (UPTD)
21.09.	Pengawasan sembako dan barang jasa yang beredar
21.10.	Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
21.11.	Penertiban dan Pendataan Pasar Tradisional
21.12.	Pembinaan Pedagang Lintas Batas
21.13.	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Bidang Perdagangan
21.18.	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
21.19.	Pembuatan Rancangan Perda Perizinan Perindagkop
21.20.	Pengawasan BBM
21.21.	Pendataan Tera Ulang Bagi Pedagang
21.22.	Pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Semitau
21.23.	Monitoring dan Evaluasi Tera Ulang
21.24.	Road Map Pengelolaan dan Pemasaran Komoditas Unggulan di Kab. Kapuas Hulu
21.25.	Operasi Pasar Sembako/ Murah Dalam rangka Hari Raya Keagamaan
21.26.	Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya
21.27.	Sosialisasi Perlindungan Hutan
21.28.	Pendataan Perusahaan di Kecamatan
21.29.	Sosialisasi Perlindungan Konsumen
.....	dst.....
24.	Peningkatan kemampuan Teknologi Industri
24.01.	Penyediaan peralatan bagi pengrajin pahat dan ukir
24.02.	Penyediaan mesin pengolah jagung
24.03.	Diversifikasi Pengembangan Desain Produk Bambu bagi IKM
24.04.	Pelatihan bagi pengrajin rotan
24.05.	Diversifikasi Pengembangan Desain Produk Purun bagi IKM
24.06.	Penyediaan peralatan pandai besi
24.08.	Penyediaan peralatan Meubel
24.09.	Magang Alih Teknologi IKM bagi Aparatur Industri
24.10.	Penyediaan Peralatan Pendukung Industri pengolahan Ikan
24.11.	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
24.12.	Monitoring dan Evaluasi Pendataan Pembinaan Aparatur IKM
24.13.	Fasilitasi Bahan Baku IKM
24.14.	Penyediaan Peralatan Industri Kerajinan
24.15.	Penyediaan Mesin Pembelah Rotan
24.16.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Batu Akik
24.17.	Penyediaan Peralatan Pengolahan Limbah Kayu Belian
24.18.	Penyediaan Peralatan Pengolahan Abon Ikan
24.19.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pengolahan Ikan
24.20.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Diversifikasi Produk Anyaman
24.21.	Penyediaan Mesin, Peralatan dan Perlengkapan IKM
.....	dst.....

25.	Pengembangan Industri kecil dan Menengah
25.01.	Pembinaan dan penertiban perizinan IKM
25.02.	Pembinaan Industri Kerajinan dan Pangan Olahan pada Kelompok P2WKSS
25.03.	Konversi Gugus Kendali Mutu(GKM)
25.04.	Partisipasi Pameran Kerajinan Dekranasda
25.05.	Bimbingan Teknis Pembina IKM dan Pelaku IKM
25.06.	Pendataan Industri Pengolahan Kayu
25.07.	Operasional Balai Sentra Kerajinan Industri
25.08.	Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Desain Produk Rotan
25.09.	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada Pelaku IKM
25.10.	Peningkatan Sentra Kerajinan Industri
25.11.	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perindustrian
25.12.	Pembangunan Fasilitas Industri Pengolahan Rotan
25.13.	Pembangunan Fasilitas Industri Pengolahan Ikan
25.14.	Monitoring dan Pembinaan Pengerajin Pakaian Adat / Tradisional
25.15.	Pengadaan Fasilitas untuk Pengerajin Pengolahan Bambu
25.16.	Pengadaan Alat - alat Industri
25.17.	Updating Data Industri
25.18.	Partisipasi Pameran Inacraf
25.19.	Partisipasi Pameran APKASI
25.20.	Operasional Dekranasda
25.21.	Partisipasi Pameran Produk Unggulan
25.22.	Perencanaan Survey Sumber Kegiatan Usaha Kecil di Daerah Aliran Sungai Kapuas Kec.
25.23.	Sosialisasi HAKI, SNI, Halal dan Merek
25.24.	Partisipasi Dalam Rangka Kegiatan Lomba Desa
25.26.	Keikutsertaan dalam Pameran Trade Expo Indonesia
25.27.	Sosialisasi dan Fasilitasi Penerapan HKI dan SNI
25.28.	Dasitasi Pengembangan IKM Tenun
25.29.	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Tenun
25.30.	Penyediaan Bahan Baku Rotan
25.31.	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Manik-Manik
25.32.	Fasilitasi Pengujian Produk Pangan
25.33.	Fasilitasi Bahan promosi pada Balai Sentra Kerajinan
25.34.	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA) Kabupaten Kapuas Hulu
25.35.	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Kerajinan Tangan
.....	dst.....
26.	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
26.01.	Operasional Inkubator Wirausaha dan Teknopreneur
26.02.	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan Teknologi Bagi Tenant
26.03.	Pelatihan Kewirausahaan (Technopreneur Ship Camp)
.....	dst.....
Urusan :	1.16. - PENANAMAN MODAL
15.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
15.01.	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil
15.02.	Pengembangan potensi unggulan daerah
15.03.	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal

15.04.	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
15.06.	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah
15.07.	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
15.09.	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
15.10.	Penyelenggaraan pameran investasi
15.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.12.	Penyusunan Profil Investasi Daerah
15.13.	Pameran Investasi Daerah
15.15.	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
15.17.	Pemutahiran informasi potensi daerah dan peluang investasi untuk kerjasama bidang penanaman modal
15.18.	Workshop/pelatihan promosi hasil kerajinan Kab. KH
15.19.	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
.....	dst.....
16.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
16.01.	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
16.02.	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
16.03.	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal
16.04.	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
16.05.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
16.06.	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
16.07.	Kajian Kebijakan penanaman modal
16.08.	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal
16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.10.	Pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan
16.11.	Peningkatan Wawasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
16.12.	Penyusunan peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal
16.13.	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
16.14.	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan SPIPISE Kab. KH
16.15.	Penyusunan kebijakan penanaman modal
16.16.	Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
.....	dst.....
17.	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
17.01.	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
17.02.	dst.....
18.	Pengembangan Penanaman Modal
18.01.	Kajian Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kotan Balikpapan Terhadap Pihak Ketiga
.....	dst.....
19.	Pelayanan dan Pelayanan Perizinan
19.01.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan
19.02.	Penyusunan Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
19.03.	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
19.04.	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
19.05.	Penyusunan Buku Panduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
19.06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi PTSP
19.10.	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Non Perizinan

19.11.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perizinan dan Non Perizinan
19.12.	Pengelolaan dan Pengembangan Konektifitas E-Govermen Kab. KH
19.13.	Penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM) Kab. KH
19.14.	Pelayanan perizinan dan Nonperizinan keliling Kab. KH
19.15.	Kegiatan Penunjang Program Pemerintah lainnya
19.16.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
19.17.	Penyederhanaan Perizinan
19.18.	Penataan Perizinan
.....	dst.....
20.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
20.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Konektivitas E-Government Kab. KH
.....	dst.....
21.	Penataan Kebijakan Penanaman Modal
21.01.	Penataan dan Perumusan Kebijakan Penanaman Modal
.....	dst.....
22.	Pelayanan Pengaduan Masyarakat
22.01.	Fasilitasi dan Koordinasi tentang Pengaduan Masyarakat
.....	dst.....
Urusan :	1.16. - PENANAMAN MODAL
15.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
15.01.	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil
15.02.	Pengembangan potensi unggulan daerah
15.03.	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal
15.04.	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
15.06.	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah
15.07.	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
15.09.	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
15.10.	Penyelenggaraan pameran investasi
15.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.12.	Penyusunan Profil Investasi Daerah
15.13.	Pameran Investasi Daerah
15.15.	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
15.17.	Pemutahiran informasi potensi daerah dan peluang investasi untuk kerjasama bidang penanaman modal
15.18.	Workshop/pelatihan promosi hasil kerajinan Kab. KH
15.19.	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
.....	dst.....
16.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
16.01.	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
16.02.	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
16.03.	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal
16.04.	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
16.05.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
16.06.	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

16.07.	Kajian Kebijakan penanaman modal
16.08.	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal
16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.10.	Pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan
16.11.	Peningkatan Wawasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
16.12.	Penyusunan peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal
16.13.	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
16.14.	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan SPIPISE Kab. KH
16.15.	Penyusunan kebijakan penanaman modal
16.16.	Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
.....	dst.....
17.	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
17.01.	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
17.02.	dst.....
18.	Pengembangan Penanaman Modal
18.01.	Kajian Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kotan Balikpapan Terhadap Pihak Ketiga
.....	dst.....
19.	Pelayanan dan Pelayanan Perizinan
19.01.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan
19.02.	Penyusunan Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
19.03.	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
19.04.	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
19.05.	Penyusunan Buku Panduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
19.06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi PTSP
19.10.	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Non Perizinan
19.11.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perizinan dan Non Perizinan
19.12.	Pengelolaan dan Pengembangan Konektivitas E-Govermen Kab. KH
19.13.	Penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM) Kab. KH
19.14.	Pelayanan perizinan dan Nonperizinan keliling Kab. KH
19.15.	Kegiatan Penunjang Program Pemerintah lainnya
19.16.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
19.17.	Penyederhanaan Perizinan
19.18.	Penataan Perizinan
.....	dst.....
20.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
20.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Konektivitas E-Goverment Kab. KH
.....	dst.....
21.	Penataan Kebijakan Penanaman Modal
21.01.	Penataan dan Perumusan Kebijakan Penanaman Modal
.....	dst.....
22.	Pelayanan Pengaduan Masyarakat
22.01.	Fasilitasi dan Koordinasi tentang Pengaduan Masyarakat
.....	dst.....

Urusan :	1.17. - KEBUDAYAAN
15.	Pengembangan Nilai Budaya
15.01.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
15.02.	Penatagunaan naskah kuno nusantara
15.03.	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
15.04.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
15.05.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
15.06.	Ekspose Seni Budaya Kapuas Hulu di Jakarta
15.07.	Fasilitas Pengembangan Nilai Seni dan Budaya
15.08.	Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
15.09.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Nilai Budaya
15.15.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Adat
.....	dst.....
16.	Pengelolaan Kekayaan Budaya
16.01.	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
16.02.	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
16.03.	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
16.05.	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan
16.06.	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
16.07.	Pengembangan nilai dan geografi sejarah
16.09.	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
16.10.	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
16.11.	Gelar Budaya Daerah Kapuas Hulu
16.12.	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
16.13.	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
16.14.	Pengelolaan dan pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
16.15.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Adat
16.16.	Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah
16.17.	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
16.18.	Peningkatan Kapasitas Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah
16.19.	Perluasan Pengembangan Balai Adat Dusun Sungai Canggih
16.20.	Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Balai Pertemuan Adat Desa Kedamin Darat (Telah
16.21.	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
16.22.	Pengembangan SDM Juru Pelihara Benda Cagar Budaya
16.23.	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
16.34.	Inventarisasi dan Dokumentasi Cagar Budaya
.....	dst.....
17.	Pengelolaan Keragaman Budaya
17.01.	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
17.02.	Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan
17.03.	Keikutsertaan pada Pelaksanaan Festival Equator di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
17.04.	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
17.05.	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
17.06.	Penyelenggaraan Audisi Gita Bahana Nusantara
17.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

17.08.	Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
17.09.	Pendukung Kegiatan Sanggar Pembina Kabupaten Kapuas Hulu
17.10.	Penyusunan Rencana Pengembangan Obyek Wisata di Kawasan Danau Sentarum
17.11.	Perekaman Lagu - Lagu Daerah Kapuas Hulu
17.12.	Penyusunan buku tentang sejarah pemerintahan kabupaten Kapuas Hulu
17.13.	Penyusunan buku tentang profil wisata budaya di wilayah kabupaten Kapuas Hulu
17.14.	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata desa Sungai Uluk Palin
17.15.	Pembangunan sarana dan Prasarana Adat dan Budaya
17.16.	Pemeliharaan sarana dan prasarana Adat dan Budaya
17.17.	Study Sedimentasi Kawasan Danau Sentarum sebagai Objek Wisata Andalan Kabupaten Kapuas
17.18.	Keikutsertaan Gelar Budaya Daerah Dalam Rangka Promosi Budaya
17.19.	Penyelenggaraan Pentas Musik Perbatasan
17.20.	Partisipasi Keikutsertaan dalam Internasional Borneo Opentournament Sumpit
17.21.	Pembuatan Iklan Komersial untuk Musik Sape'
17.22.	Kunjungan Muhibah Budaya
17.23.	Pengadaan Alat Musik Tradisional
17.24.	Penyusunan DED Arena Festival Danau Sentarum - Betung Kerihun di Kedungkang
17.25.	Gawai Dayak Provinsi KALBAR di Pontianak
17.26.	Pekan Budaya Dayak Nasional di Jakarta
17.27.	Pekan Raya Bumi Kasturi di Kecamatan Hulu Gurung
17.28.	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Melayu Provinsi Kalimantan Barat
17.30.	Keikutsertaan dalam Gawai Dayak Provinsi Kalimantan Barat
17.31.	Pelaksanaan Lokakarya Musik Tradisional
17.32.	Pelatihan Tari dan Musik
17.33.	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
17.34.	Fasilitas Penyelenggaraan Gelar Budaya Hari Jadi Kota Putussibau
17.35.	Penyusunan dan Percetakan Buku Sejarah Kabupaten Kapuas Hulu
17.36.	Citra Budaya Tradisi di TMII-Jakarta
17.37.	Pelatihan Tari dan Musik
17.38.	Pergelaran Pentas Pesona Budaya Daerah Kapuas Hulu
17.39.	Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
17.40.	Fasilitasi Promosi Pariwisata Kab. Kapuas Hulu dengan Maskapai Garuda Indonesia
17.41.	Fasilitasi Pelaksanaan Festival Nasional Tari Tradisi
.....	dst.....
Urusan :	1.18. - PEMUDA DAN OLAHRAGA
15.	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
15.01.	Pendataan potensi kepemudaan
15.02.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
15.03.	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
15.04.	Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH
15.06.	Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan
15.07.	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
15.08.	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
15.09.	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
15.10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.11.	dst.....

16.	Peningkatan peran serta kepemudaan
16.01.	Pembinaan Organisasi kepemudaan
16.02.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
16.03.	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
16.04.	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
16.05.	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
16.06.	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
16.07.	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
16.08.	Pameran prestasi hasil karya pemuda
16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
.....	dst.....
17.	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
17.01.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
17.02.	Pelatihan keterampilan bagi pemuda
17.03.	dst.....
18.	Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
18.01.	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
18.02.	dst.....
19.	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
19.01.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
19.02.	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi
19.03.	pengembangan perencanaan olahraga terpadu
19.04.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
19.05.	Pembinaan manajemen organisasi olahraga
19.06.	Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
19.07.	Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan
19.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.09.	dst.....
20.	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
20.01.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
20.02.	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
20.03.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
20.04.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
20.06.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
20.07.	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
20.08.	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
20.09.	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan pretasi
20.10.	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
20.11.	Pengembangan olahraga rekreasi
20.14.	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
20.15.	Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
20.16.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan
20.17.	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya
.....	dst.....

21.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
21.01.	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan
21.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
21.03.	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
21.05.	Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
21.06.	Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
21.07.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
.....	dst.....
Urusan :	1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
15.	Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
15.06.	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
15.07.	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
15.08.	Penyuluhan Pencegahan Kenakalan Remaja / Pelajar
15.09.	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor Rumah Jabatan
.....	dst.....
17.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
17.01.	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama
17.02.	Penguatan Jaringan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
17.03.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai - nilai Luhur Budaya Bangsa
17.04.	Peningkatan Keterampilan Anggota Linmas Untuk Pemilu KADA 2012
.....	dst.....
28.	Pendidikan Politik Masyarakat
28.01.	Desk Pemilu PILKADA
28.02.	Pengamanan Pelaksanaan Pemilu
28.03.	Tim Pemeriksaan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
28.04.	Penyusunan Data Base Partai Politik
28.05.	Seminar Orientasi Peningkatan Budaya Politik
28.06.	Pengadaan Logistik Pemilu (Pengadaan Kotak Suara)
.....	dst.....
29.	Pemeliharaan KANTRAMTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal
29.01.	Pencegahan dan Deteksi Dini AGHT (KOMINDA)
29.04.	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
29.06.	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas
29.08.	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA
.....	dst.....
30.	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
30.04.	Peningkatan kapasitas Aparat dalam Rangka Sihamrata di Daerah
.....	dst.....
32.	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
32.01.	Pembinaan ORMAS, LSM dan OKP
.....	dst.....

41.	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
41.01.	Penyuluhan Napza
41.02.	Penyuluhan, Pencegahan Eksploitasi Terhadap Anak
41.03.	Penyuluhan, Pencegahan dan Penertiban Tindak Penyelundupan
.....	dst.....
42.	Pengembangan wawasan Kebangsaan
42.01.	Penguatan Jaringan FKDM
.....	dst.....
43.	Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
43.01.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi
43.02.	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Penanggulangan Bencana dan Pengungsi
43.03.	Pelatihan Anggota Perlindungan Masyarakat untuk Pengamanan di TPS
43.04.	Penguatan Jaringan SATLAK
43.05.	Pembinaan Anggota Satuan Linmas Kecamatan
43.06.	Peningkatan Ketrampilan anggota Linmas dalam penanggulangan bencana di seluruh
.....	dst.....
46.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
46.05.	Penyusunan Pedoman Penanggulangan Bencana Alam
46.06.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Korban Bencana Alam
46.07.	Pendataan Kawasan Daerah Rawan Bencana
46.08.	Monitoring Daerah / Kawasan yang Terkena Bencana
46.09.	Penyusunan Laporan Kegiatan Monitoring Daerah / Kawasan yang Terkena Bencana
46.10.	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan / Kerugian Pasca Bencana
46.11.	Persiapan Pra Bencana, Pelatihan dan Simulasi
46.12.	Penanganan Tanggap Darurat dan Penyaluran Logistik
46.13.	Penyampaian Bantuan kepada Korban Bencana
46.14.	Pemberdayaan Masyarakat Korban Bencana Jalur Sungai Kapuas
46.15.	Pembentukan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kecamatan
46.16.	Rapat Kerja Penanggulangan Bencana
46.17.	Study Mitigasi Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu
46.18.	Operasional Tim Penilai Kerugian, Kerusakan dan Potensi Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu
46.19.	Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kecamatan
46.20.	Bantuan Stimulan Daerah Rawan Bencana Longsor
46.21.	Pengendalian Kebakaran Pemukiman dan Lahan
46.22.	Operasional Tim Terpadu Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
.....	dst.....
Urusan :	1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
15.	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
15.01.	Pembahasan rancangan peraturan daerah
15.02.	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
15.04.	Rapat-rapat paripurna
15.06.	Reses pimpinan dan anggota DPRD
15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

15.08.	Sosialisasi perturan perundang-undangan
15.09.	Rapat Kerja Dewan
15.11.	Kaji Terap DPRD Tahun 2015
15.13.	Penyusunan Raperda Hak Inisiatif DPRD
15.14.	Peningkatan kapasitas DPRD bidang legislatif drafting
15.15.	Monitoring pelaksanaan pembangunan daerah
15.16.	Penyusunan buku profil DPRD Kab Kapuas Hulu periode 2009-2014
15.17.	Penjaringan aspirasi masyarakat
15.18.	Publikasi Hasil Kaji Terap DPRD
15.19.	Pengantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD dan kegiatan Resmi Lainnya
15.21.	Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kegiatan Resmi Lainnya
15.22.	Kegiatan Penyusunan Buku Memory DPRD Kab. Kapuas Hulu Periode 2004-2009
15.23.	Pembuatan Website DPRD Kab. Kapuas Hulu
15.24.	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
15.25.	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
15.26.	Sosialisasi Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah
.....	dst.....
16.	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
16.01.	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan
16.02.	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non
16.03.	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
16.04.	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
16.05.	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
16.06.	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
16.07.	Kunjungan Kerja ke Jembrana
.....	dst.....
17.	Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
17.01.	Penyusunan analisa standar belanja
17.02.	Penyusunan standar satuan harga
17.03.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
17.04.	Penyusunan Revisi Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
17.06.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA. 2017
17.07.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2017
17.08.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBDTA. 2016
17.09.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2016
17.10.	Penyusunan Rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2015
17.11.	Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2015
17.12.	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah
17.13.	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
17.14.	Sosialisasi Mekanisme Penatausahaan keuangan daerah
17.15.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
17.16.	Peningkatan manajemen aset/barang daerah melalui Sensus Barang Daerah
17.17.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
17.18.	Penyempurnaan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD TA. 2016
17.19.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
17.20.	Koordinasi dan Pendukung Pelaksanaan Audit Pelaksanaan APBD
17.21.	Penyelesaian Akhir APBD Tahun Anggaran 2016

17.33.	Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
17.34.	Penunjang kegiatan bendahara umum daerah
17.35.	Penatausahaan aset daerah
17.36.	Pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah
17.38.	Penyusunan Revisi Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
17.39.	Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Aset
17.40.	Pendampingan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
17.41.	Sosialisasi peraturan Daerah tentang pajak Daerah
17.42.	Pengembangan kerjasama pengelolaan penerimaan PBB seluruh sektor
17.43.	Evaluasi, Pembinaan dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD
17.44.	Penghapusan Aset/Barang Inventaris Milik Daerah
17.45.	Koordinasi dan Konsultasi Masalah Aset Sekretariat Daerah
17.46.	Penaksiran dan Penilaian Harga Penjualan dan Penyewaan Aset Daerah
17.47.	Penyusunan LBMD Berbasis Aplikasi SIMBADA
17.48.	Penyusunan Pedoman Satuan Harga Barang dan Jasa
17.49.	Peningkatan Manajemen Pembukuan Aset melalui Inventaris Aset
17.50.	Pengembangan Sarana dan Prasarana pengelolaan PBB P-2
17.51.	Penyusunan Revisi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas
17.52.	Penyusunan Revisi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
17.53.	Penertiban dan pengamanan aset
17.54.	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
17.55.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata cara pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan
17.56.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata cara pelaksanaan penghapusan dan
17.57.	Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah
17.58.	Pendataan PBB Sektor Perkotaan dan perdesaan se-Kabupaten Kapuas Hulu
17.59.	Pelatihan Petugas PAD & PBB di Kecamatan dan Para Kades se-Kab. KH
17.60.	Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
17.61.	Penyelenggaraan Rakor Pendapatan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota se- Kalbar
17.63.	Penyusunan Neraca Awal SKPD
17.64.	Pembuatan Papan Reklame Himbuan Pajak dan Retribusi Daerah
17.66.	Rekonsiliasi Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
17.67.	Penilaian Aset Daerah
17.68.	Sosialisasi Penilaian dan Pelelangan Barang Milik Daerah
17.69.	Pelelangan Aset Daerah
17.70.	Penagihan Kewajiban Perpajakan Daerah kepada Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
17.71.	Sosialisasi Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
17.72.	Penertiban Kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
17.73.	Percetakan Masalah SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2 TA. 2015
17.74.	Fasilitasi Pembuatan/Pemecahan Sertifikat Tahan Milik Pemerintah Daerah
.....	dst.....
18.	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
18.01.	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota
18.02.	Evaluasi Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/ kota
18.03.	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota
18.04.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan SKPD
18.05.	Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota
18.07.	Asistensi DPA SKPD TA. 2015
18.08.	Asistensi RKA SKPD TA. 2015

18.09.	Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan
18.10.	Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014
18.11.	Verifikasi dan Akurasi Data Sistem Penggajian PNSD
18.12.	Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Berbasis Akrua
18.13.	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD TA.2014
18.14.	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
18.15.	Asistensi SIPKD Berbasis Akrua Modul Pertanggungjawaban
18.16.	Bimbingan Teknis tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
18.17.	Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
.....	dst.....
20.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
20.01.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
20.02.	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
20.03.	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
20.04.	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
20.05.	Inventarisasi temuan pengawasan
20.06.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
20.07.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
20.08.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
20.09.	Koordinasi pemberantasan kegiatan illegal logging
20.10.	Koordinasi penataan dan penertiban pasar
20.11.	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Kapuas Hulu Periode 2005-2010 dan PPD di Kab. KH
20.12.	Review LAKIP SKPD
20.13.	Peliputan, Ekspos, Pendampingan dan pendokumentasian kegiatan pemerintah
20.14.	Koordinasi Ketahanan Pangan
20.15.	Penerbitan Jurnal/Buletin Majalah Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu
20.16.	Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan
20.17.	Pengawasan dan Pengamanan Pelaksanaan Konversi Minyak tanah ke LPG 3 Kg
20.18.	Rekrutmen Calon Direksi BUMD di Kabupaten Kapuas Hulu
20.19.	Pembinaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
20.20.	Rapat Koordinasi dan Workshop Bidang Bina Sarana Perekonomian
20.21.	Rapat dan Koordinasi Bidang Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan
20.22.	Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa
20.23.	Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran RASKIN
20.24.	Rapat- Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan kerja Bagian Perekonomian
20.25.	Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM Bersubsidi di Kab. Kapuas Hulu
20.26.	Pengendalian Inflasi Daerah
20.27.	Penyampaian Berkas LP2P
20.28.	Pembinaan dan Pengawasan BUMD (PDAM) di Kabupaten Kapuas Hulu
20.29.	Fasilitasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Bina Produksi Bidang Perekonomian
20.30.	Percepatan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu
20.31.	Koordinasi dan Pengumpulan Data Sektor Industri, Perdagangan, Hotel dan Restoran dan
20.32.	Pembinaan dan Pengawasan BUMD
20.33.	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengendalian Distribusi LPG Tabung 3 Kg di Kab. Kapuas Hulu
20.34.	Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
20.35.	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran Penggunaan Dana Tidak Terduga
20.36.	Monitoring dan Evaluasi LHKPN
20.37.	Tim Penerima Pengaduan (Whistle Blower)

20.38.	Monitoring dan Evaluasi LHKASN
20.39.	Review Rencana Kerja dan Anggaran TA. 2016
20.40.	Penyelesaian Kerugian Daerah
20.41.	Pemeriksaan Alokasi Dana Desa
20.42.	Pemeriksaan PNPM
.....	dst.....
22.	Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
22.01.	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
22.02.	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
22.03.	Administrasi dan Monitoring TPTGR
23.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
23.01.	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
23.02.	Kajian Kebijakan Penyebaran Siaran TV di Daerah
23.03.	Pengembangan Aplikasi Sistim Informasi Manajemen Satu Atap (Lanjutan)
23.04.	Pengembangan Aplikasi dan Implementasi Software SAKD
23.05.	Koordinasi dan Pengumpulan data dalam pelaksanaan tugas pada bidang perekonomian
23.09.	Pengembangan data / informasi
23.10.	Fasilitasi Pelaksanaan ULP
23.12.	Penyebarluasan Informasi melalui Media Promosi Daerah (TV Display)
23.13.	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
24.	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
24.01.	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
24.02.	Kajian Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Kecamatan
.....	dst.....
25.	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
25.01.	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
25.02.	Fasilitasi/pembentukan kekuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
25.03.	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum
25.04.	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
25.05.	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Pada Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
25.07.	Fasilitas/Pembentukan Komite Inovasi Daerah (KID) Kabupaten Kapuas Hulu
25.08.	Fasilitasi Pemekaran Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
26.	Penataan Peraturan Perundang-undangan
26.01.	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
26.02.	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
26.03.	Legislasi peraturan perundang-undangan
26.04.	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
26.06.	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang
26.07.	Pendokumentasian Produk Hukum Daerah
26.08.	Kodifikasi dan Penataan Dokumentasi Hukum
26.09.	Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Perda
26.10.	Pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDIH)

26.11.	Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan Pengadaan Tanah
26.12.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
26.13.	Monitoring dan Evaluasi Peraturan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu
26.14.	Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Raperda
26.15.	Pengadaan Buku Perundang-Undangan
26.16.	Konsultasi Hukum dan Pendalaman Legal drafting
26.17.	Pembentukan dan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum di kab. KH
26.18.	Bimbingan teknis Rancangan Kontrak (Drafting Contract)
26.19.	Advokasi Hukum Pemerintah kab.Kapuas Hulu
26.20.	Monitoring dan Evaluasi Peraturan desa di Kabupaten Kapuas Hulu
26.21.	Penyusunan PERDA tentang Kabupaten Konservasi
26.22.	Sosialisasi Undang - Undang No. 12 Tahun 2011
26.23.	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kapuas Hulu
26.24.	Penyusunan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Kapuas Hulu
.....	dst.....
27.	Penataan Daerah Otonomi Baru
27.01.	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
27.02.	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
27.03.	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
27.04.	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
27.05.	Koordinasi pemekaran propinsi wilayah timur kalbar
27.06.	Persiapan pemekaran Propinsi Kapuas Raya
27.07.	Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan
27.08.	Fasilitasi Pemekaran Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
27.09.	Fasilitasi urusan PLB Badau dan wilayah Perbatasan
27.10.	Pematangan lahan untuk pembangunan rumah jaga petugas PLB
27.11.	Pematangan Lahan untuk pembangunan Unit Rawat Inap
.....	dst.....
28.	Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah
28.01.	Orientasi, Revisi dan Pendalaman TUPOKSI Organisasi
28.02.	Penataaan SOTK
28.03.	Sosialisasi Tata naskah Dinas
28.04.	Sosialisasi dan Penyusunan Laporan Waskat
28.05.	Bimbingan Teknis Pelayanan Umum
.....	dst.....
29.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perbatasan
29.01.	Peningkatan Wawasan Ekonomi Kawasan Perbatasan
29.02.	Pembinaan kelompok Tani, PKK dan Kegiatan P2WKSS
29.03.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian dan Sosial Masyarakat di Kawasan Perbatasan
29.04.	Pembinaan Potensi Masyarakat Kawasan Perbatasan
29.05.	Festival Budaya Nusantara Masyarakat Kawasan Perbatasan
29.06.	Pembinaan Desa Perbatasan dan P2WKSS
29.07.	Pameran Pontianak Air Show (PAS)
29.08.	Pembinaan dan Pelatihan Pengerajin Tenun dan Manik-Manik Masyarakat Perbatasan
29.09.	Pelatihan Perbengkelan bagi Pemuda Putus Sekolah
29.10.	Pameran Potensi Ekonomi Masyarakat Perbatasan

.....	dst.....
30.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
30.01.	Pembuatan Konsep Sambutan
30.02.	Operasioanl RSPD
.....	dst.....
31.	Peningkatan Koordinasi Pengawasan
31.01.	Rapat Koordinasi Pengawasan
.....	dst.....
32.	Penguatan LSM Ormas dan Organisasi Sosial Politik
32.01.	Pembinaan Ormas , LSM dan OKP
32.02.	Lomba Administrasi Rukun Tetangga (RT)
32.03.	Tim Pemeriksaan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
32.04.	Pengadaan Perangkat Komputer Data Base Orkesmas
32.05.	Sosialisasi Sistem Pelayanan Kelurahan
32.06.	Pendataan / Pembuatan Batas Wilayah RT
32.07.	Penyusunan Anggaran Kelurahan
.....	dst.....
33.	Pengembangan Wilayah Perbatasan
33.01.	Identifikasi Keberadaan Garda Batas Kecamatan Perbatasan
33.02.	Sinkronisasi Program Kerja Pengelolaan Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan
33.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Pengelolaan Batas Negara
33.04.	Sinkronisasi Program Kerja Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Khusus di Kawasan
33.05.	Sosialisasi Trafficking dan KDRT
33.06.	Monitoring Evaluasi dan pelaporan Fungsi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan
33.07.	Pendataan Infrastruktur Pemerintahan di Kawasan Perbatasan
33.08.	Pengumpulan dan Penyusunan Data Informasi Kebutuhan dn Pengelola Kawasan Perbatasan
33.09.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fungsi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan
33.10.	Monitoring Evaluasi Kegiatan Perekonomian dan Sosial Masyarakat di Kawasan Perbatasan
33.11.	Pameran Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan
33.12.	Pendataan, Singkronisasi dan Koordinasi Tata Ruang dan Pemanfaatan Tata Ruang
33.13.	Sosialisasi Perkebunan Karet Masyarakat Kawasan Perbatasan
33.14.	Optimalisasi Fungsi pengendalian Kawasan Perbatasan
33.15.	Penyusunan Data Pokok Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negagara Tahun 2014
33.16.	Studi Manajemen Pengelolaan Perbatasan Negara
33.17.	Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (RAKORBANGTAS)
33.18.	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Dalam Mengelola Kawasan Perbatasan
33.19.	Pembangunan sarana dan Prasarana Infrastruktur Kecamatan di Kawasan Perbatasan
33.20.	Sosialisasi Patok Batas Negara
33.21.	Fasilitasi Pembinaan Generasi Muda di kawasan perbatasan
33.22.	Pelatihan kelompok Nelayan Kawasan Perbatasan
33.23.	Updating Data Potensi Ekonomi dan Sosial Kawasan Perbatasan
33.24.	Pekan Olahraga Masyarakat Perbatasan
33.25.	Fasilitasi KKN Mahasiswa di Kawasan Perbatasan
33.26.	Fasilitasi Kegiatan Pelacakan Batas Wilayah Kecamatan Perbatasan Negara
33.27.	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Anggota Garda Batas

33.28.	Peningkatan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Perbatasan
33.29.	Fasilitasi Rakor Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi di kawasan Perbatasan Negara
33.30.	Pembinaan Anggota Garda Perbatasan
33.31.	Perencanaan Jalan Non Status Kawasan Daerah Perbatasan
.....	dst.....
34.	Peningkatan Perdagangan dalam Negeri
34.01.	Penyelenggaraan Peringatan hari Pertasi Kencana, Hari Lingkungan Hidup, Hari Pangan
34.02.	Fasilitasi Pengembangan Promosi produk unggulan daerah
34.03.	Rapat-Rapat Koordinasi bidang Pertanian, Perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, pertambangan dan SDA
34.04.	Fasilitasi Pekan Nasional (PENAS)
34.05.	Fasilitasi peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)
34.06.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan
34.07.	Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
34.08.	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
34.09.	Fasilitasi Bina Produksi
34.10.	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Penyertaan Modal Daerah
34.11.	Penyusunan dan Pembahasan Raperda Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
34.12.	Fasilitasi Kebijakan Penataan Pasar
34.13.	Stabilitas Harga dan Penanganan Ketersediaan Pangan
34.14.	Fasilitas Pendirian BUMD PT. UNCAK KAPUAS MANDIRI
.....	dst.....
35.	Peningkatan dan pengembangan Bidang Sosial
35.01.	Pembinaan usaha kesehatan sekolah
35.02.	Monitoring dan evaluasi bidang sosial
35.03.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
35.04.	Penyelenggaraan pemilihan pemuda pelopor
35.05.	Fasilitasi Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran
35.06.	Pembinaan mental dan spiritual aparatur
35.07.	Penyelenggaraan rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
35.08.	Pelayanan JAMKESMASDA
35.09.	Penyelenggaraan senam pagi di lingkungan Sekretariat Daerah kab. Kapuas Hulu
35.10.	Penunjang Operasional kegiatan hibah dan bantuan sosial
35.11.	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan
35.12.	Fasilitasi Pelaksanaan Halal Bi Halal
35.13.	Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji
35.14.	Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama
35.15.	Fasilitasi Pelaksanaan Umrah dan Ziarah
35.16.	Antar Jemput Jamaah Haji
35.17.	Fasilitasi Halal bi Halal
35.18.	Fasilitasi Kegiatan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Lainnya
35.19.	Penunjang Kegiatan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Lainnya
.....	dst.....
36.	Peningkatan Efektifitas Kinerja perangkat daerah
36.01.	Penataan Unit Pelaksana (UPT) perangkat daerah kab Kapuas Hulu
36.02.	Fasilitasi Penilaian Pemberian Penghargaan Citra Pelayanan Prima

.....	dst.....
37.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
37.01.	Pengadaan Tanah Keperluan Pemerintah Kabupaten
37.03.	Monitoring dan Evaluasi Tanah Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
37.04.	Pengurusan Sertifikat Tanah Keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
37.05.	Inventarisasi tanah milik Pemerintah Daerah
37.06.	Penetapan batas - batas wilayah
37.07.	Penataan Batas-Batas Wilayah Kecamatan dan Kabupaten
37.08.	Penataan Batas-Batas Wilayah Antar Kabupaten
37.09.	Penyusunan dan Pendataan Informasi Pertanahan di Wilayah Kecamatan
37.10.	Pengadaan Tanah untuk Perluasan Landasan Pacu Bandar Udara Perintis
.....	dst.....
38.	Penyelesaian konflik -konflik pertanahan
38.01.	Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan
38.02.	Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah
.....	dst.....
39.	Peningkatan dan Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintah Daerah
39.01.	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
39.02.	Inventarisasi data rupabumi kecamatan
39.03.	Penyusunan Memori Bupati
39.04.	Rapat koordinasi bidang pemerintahan
39.05.	Rapat kerja perangkat daerah
39.06.	Pengadaan Buku Register Kecamatan
39.07.	Fasilitasi pelantikan bupati dan wakil Bupati Kapuas Hulu
39.08.	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
39.09.	Penyusunan laporan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah
39.10.	Koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi tugas pembantuan
39.11.	Penyusunan rencana strategis kawasan perbatasan kab Kapuas Hulu
39.13.	Pengkajian Kapuas Hulu sebagai kabupaten Konservasi
39.14.	Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
39.15.	Penyusunan Profil Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu
39.16.	Penyusunan Potensi Desa dan Profil Kecamatan
39.17.	Penyusunan Data Pokok Kecamatan
39.18.	Penyusunan Data Monografi Kecamatan
39.19.	Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Tingkat Kecamatan
39.20.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan
39.21.	Pengembangan Data Base Kependudukan di Tingkat Kecamatan
40.	Kerjasama informasi dan media massa
40.01.	Kerjasama berita dengan media cetak
40.03.	Penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan
40.05.	Pencitraan dan publikasi pemerintah
40.06.	Kemitraan Pers
.....	dst.....
41.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

41.01.	Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di lingkungan pemerintah kab KH
41.02.	Penyempurnaan Infrastruktur Internet dan video display SETDA Kapuas Hulu
41.03.	Monitoring Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
42.	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
42.01.	Pengadaan Buku Perpustakaan
42.02.	Koordinasi Konsultasi Perpustakaan/kearsipan
42.03.	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan di Kabupaten Kapuas Hulu
42.04.	Pemeliharaan Kendaraan Perpustakaan Keliling (Mobil Pintar)
42.05.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
42.06.	Fasilitasi Pelaksanaan Rakor Kearsipan dan Perpustakaan se Kalimantan Barat
42.07.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Buku Perpustakaan ke kecamatan
.....	dst.....
43.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
43.01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
43.02.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
43.03.	Pendidikan dan pelatihan tugas teknis dan fungsi bagi PNS daerah
43.04.	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
43.05.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kapuas
.....	dst.....
44.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
44.01.	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
44.02.	Seleksi penerimaan calon PNS
44.03.	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
44.04.	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
44.05.	Seleksi dan Pemberian bantuan Tugas Belajar
44.06.	Penyelenggaraan Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya
44.07.	Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
44.08.	Pengurusan bapetarum
44.09.	Pemutahiran data PNS
44.10.	Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS
44.11.	Penanganan kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS
44.12.	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
44.13.	Penyusunan Uraian Jabatan
44.14.	Sosialisasi Program Layanan Bapetarum di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
44.15.	Pengambilan Data Biometrik KPE bagi PNS dan CPNS
44.16.	Penyelenggaraan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS
44.17.	Bimbingan Emosional Spiritual Quotien bagi PNS
44.18.	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
44.19.	Penerbitan Buletin Kepegawaian
.....	dst.....
45.	Pembinaan Kesejahteraan Ekonomi
45.01.	Pembinaan BUMD
45.02.	Pendataan Sarana dan Prasarana Perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu
45.03.	Koordinasi penataan pasarpagi kecamatan Putussibau Utara

45.04.	Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Sarana Perekonomian
45.05.	Sosialisasi Percepatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan
45.06.	Study Banding Pangan Desa
45.07.	Workshop Tim Pangan Desa
.....	dst.....
46.	Pendidikan Kedinasan
46.01.	Pendidikan dan pelatihan teknis
46.02.	Pendidikan penjenjangan struktural
46.03.	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
46.04.	Pembuatan buku juknis/juklak
46.05.	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
46.06.	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
46.07.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II
46.08.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III
46.09.	Pendidikan Penjenjangan Struktural (Diklat Pim IV)
46.10.	Rapat Teknis Penanggulangan Bencana Tahun 2013
...	Dst.....
47.	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
47.01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
47.02.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
47.03.	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
47.04.	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
...	Dst.....
48.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
48.01.	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
48.02.	Seleksi penerimaan calon PNS
48.03.	Penempatan PNS
48.04.	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
48.05.	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
48.06.	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
48.07.	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
48.08.	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
48.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
48.10.	Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS
48.11.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
48.12.	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
48.13.	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
48.14.	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul,
48.15.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
48.16.	Koordinasi penyelenggaraan diklat
48.17.	Seleksi penerimaan mahasiswa kedokteran jalur khusus
48.18.	Sosialisasi Tanda Kehormatan RI (Lanjutan)
48.19.	Pembentukan Tim Pertimbangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman
48.20.	Penyusunan Formasi CPNSD
48.21.	Monitoring PNS Tugas Belajar
48.22.	Pemberian tunjangan duka atas meninggalnya PNS dan anggota keluarga

48.23.	Pemberian bantuan menunaikan Ibadah Haji pertama
48.24.	Bimbingan Tehnis Sekcam / Seklur dan Kasi -kasi Kecamatan & Kelurahan
48.25.	Sosialisasi Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin
48.26.	Pengangkatan Sumpah /Janji PNS
48.27.	Pengurusan Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen
48.28.	Pengadaan Buku Administrasi Kecamatan
...	Dst.....
49.	Peningkatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Kota
49.01.	Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)
49.02.	Penyuluhan Masalah Kebersihan
49.03.	Lomba Sistem Keamanan Lingkungan
...	Dst.....
50.	Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
50.01.	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama
50.02.	Penyuluhan Masalah SPPT / PBB
50.03.	Rapat Koordinasi Pembangunan
50.04.	Peningkatan kesadaran masyarakat dan Cinta Tanah Air
50.05.	Penyusunan Dokumen Perencanaan
50.06.	Monitoring Proyek Pembangunan
50.07.	Penjaringan Aspirasi Masyarakat
50.08.	Penyuluhan Koperasi dan UKM
...	Dst.....
51.	Pemeliharaan KANTRANTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal
51.01.	Pencegahan dan Deteksi dini AGHT (Kominda)
51.02.	Penyuluhan Bahaya Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif
...	Dst.....
52.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
52.01.	Pengadaan Buku Administrasi Kelurahan
52.02.	Penguatan Jaringan FKDM
52.03.	Fasilitasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
52.04.	Fasilitasi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
52.05.	Penguatan Tim Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
52.06.	Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Dalam Negeri
...	Dst.....
53.	Pendidikan Politik Masyarakat
53.01.	Rapat Koordinasi Daerah Dalam Rangka Pemilukada
53.02.	Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015
...	Dst.....
54.	Peningkatan Penataan Peraturan Kepegawaian
54.01.	Kajian Kebijakan Organisasi Pemerintahan Dan Kepegawaian Daerah
...	Dst.....
55.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepentingan Umum

55.01.	Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran
...	Dst.....
56.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
56.01.	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Pimpinan/ anggota organisasi sosial/
56.02.	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non
56.03.	Rapat koordinasi dengan unsur MUSPIDA
56.04.	Rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah
56.05.	Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
56.06.	Koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya
...	Dst.....
57.	Pengembangan Data dan Informasi Wilayah Perbatasan
57.01.	Pembuatan Buku Profil Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dan Pembuatan Vidio
57.02.	Pembuatan Papan Data/Informasi Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu
57.03.	Penyusunan Data Base Berbasis GIS Pemanfaatan Lahan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Kapuas Hulu
...	Dst.....
Urusan :	1.21. - KETAHANAN PANGAN
01.	Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
01.01.	Penanganan daerah rawan pangan
01.02.	Penyusunan data base potensi produk pangan
01.03.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
01.04.	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
01.05.	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
01.06.	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
01.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
01.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
01.09.	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
01.10.	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
01.11.	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
01.12.	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
01.13.	Pengembangan cadangan pangan daerah
01.14.	Pengembangan desa mandiri pangan
01.15.	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
01.16.	Pengembangan diversifikasi tanaman
01.17.	Pengembangan pertanian pada lahan kering
01.18.	Pengembangan lumbung pangan desa
01.19.	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
01.20.	Pengembangan perbinihan/perbibitan
01.21.	Pengembangan sistem informasi pasar
01.22.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan
01.23.	Koordinasi kebijakan perberasan
01.24.	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
01.25.	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian
01.26.	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi
01.27.	Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya
01.28.	Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen

01.29.	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
01.30.	Penyuluhan sumber pangan alternatif
01.31.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
01.32.	Koordinasi Perumusan Kebijakan Pangan Daerah
01.33.	Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
...	Dst.....
Urusan :	1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
15.01.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
15.02.	Penyelenggaraan Tenaga Teknis Profil Desa dan Kelurahan
15.03.	Sosialisasi Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tingkat Kecamatan
15.04.	Pemberdayaan Lembaga Adat dan LPM di Perdesaan
15.05.	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
15.06.	Monitoring dan Konsultasi Pemberdayaan Masyarakat
15.07.	Pelatihan Pengolahan Data Pokja Profil Desa / Kelurahan
15.08.	Pengolahan / Verifikasi Data Profil Desa dan Kelurahan
15.09.	Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa / Kelurahan
15.10.	Pemilihan dan Pelantikan KADES
15.11.	Fasilitasi Pelantikan Kepala Desa Terpilih
...	Dst.....
16.	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
16.06.	Penyelenggaraan Bimtek Pemanfaatan Potensi SDA Pengembangan TTG di Pedesaan
16.08.	Pembinaan Posyantekdes dan Pameran Teknologi Tepat Guna
16.09.	Sosialisasi BUMdes
16.10.	Rapat Koordinasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Desa
16.11.	Fasilitasi Pembentukan BUMDES
...	Dst.....
17.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
17.01.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
17.02.	Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
17.03.	Pendataan Pemukiman dan Perumahan
17.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan ADD
17.05.	Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pokja Profil Desa
17.06.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
17.07.	Penyelenggaraan Lomba Desa
17.08.	Sosialisasi Sistem Perencanaan Dalam Pembangunan Desa
17.09.	Fasilitasi Pelaksanaan TMMD dan Karya Bhakti TNI
17.10.	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
17.11.	Fasilitasi Lembaga Adat Kabupaten Kapuas Hulu
17.12.	Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
17.13.	Fasilitasi Penyelesaian Penegasan Batas Desa
17.14.	Monitoring dan Evaluasi Patok Batas Desa
17.15.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TMMD
17.16.	Rapat Koordinasi Tugas Pembinaan Pemerintahan Desa
17.17.	Monev Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa

17.18.	Pasilitasi Pembuatan Patok Batas Desa
17.19.	Sosialisasi Penataan Wilayah Desa
...	Dst.....
18.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
18.01.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
18.02.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
18.03.	Bimbingan Teknis Administrasi Sekretaris Desa se Kabupaten
18.04.	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa
18.05.	Fasilitas Pembuatan RP JM-Desa
18.06.	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan
18.07.	Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa
18.08.	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Rangka Membangun Karakter dan Institusional
18.09.	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
18.10.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa
18.11.	Sosialisasi Penataan Wilayah Desa
18.12.	Penyusunan Penyesuaian Peraturan Daerah Tentang Pemerintah Desa
18.13.	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan dan Jasa Pemerintah Desa
18.14.	Sosialisasi Percepatan Penyelesaian Batas Administrasi Antar Desa
18.15.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa
18.16.	Pelatihan Singkat Pemakaian Alat GPS untuk Pengukuran Batas Desa
18.17.	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa
...	Dst.....
19.	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
19.01.	Pembinaan Kelompok P2W-KSS
19.02.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan
19.03.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
...	Dst.....
20.	Penataan Peraturan Perundang - Undangan
20.01.	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
...	Dst.....
21.	Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
21.01.	Pendampingan UPK PNPM Mpd
21.02.	Pendampingan Administrasi Program PNPM Mpd Generasi
...	Dst.....
Urusan :	1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.	Penembangan Data / Informasi
15.01.	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
15.02.	Pengawasan Dan Monitoring Pemancar Dan Frekuensi Radio
15.03.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
15.04.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
15.05.	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
15.06.	Pengadaan alat studio dan komunikasi
15.07.	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

15.08.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
15.11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Teknologi Informasi
16.	Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
16.01.	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
16.02.	dst.....
22.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
22.03.	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Mobile Pusat Layanan Internet kecamatan (M-PLIK)
22.09.	Pengelolaan dan Pengembangan Website SKPD
.....	dst.....
23.	Peningkatan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Melalui Media Penyiaran
23.11.	Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Pemetaan (Cell Plant) Menara Telekomunikasi
23.12.	Sosialisasi PERDA tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
23.13.	Pemasangan instalasi dan jaringan data center kabupaten
23.14.	Penyusunan Rancangan Tentang Peraturan Daerah tentang Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
23.15.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kapuas Hulu
23.16.	Operasional Kegiatan E-Government Kabupaten Kapuas Hulu
23.17.	Sosialisasi Pemanfaatan Internet Protocol Televisi (TV IP)
.....	dst.....
24.	Kerjasama informasi dan media massa
24.01.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
24.02.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
24.03.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
24.04.	Penerbitan Media Legislatif
24.05.	Jumpa Pers
24.06.	Kerjasama dengan Media Cetak
.....	dst.....
25.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
25.01.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
25.02.	Sosialisasi Kelompok Informasi (KIM) Masyarakat Kapuas Hulu
25.03.	Pengelolaan dan Pengembangan Website Kab. Kapuas Hulu dan Website Dishubkominfo
25.04.	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu
25.05.	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
25.06.	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Kabupaten Kapuas Hulu
25.07.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui LPPL Rasika - FM
25.08.	Pembangunan E-Government Kab. Kapuas Hulu
25.09.	Pelaksanaan Surat Elektronik (e-office) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
25.10.	Revisi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
25.11.	Desiminasi Informasi melalui Media Tradisional (Merta) / Pertunjukan Rakyat
.....	dst.....
26.	Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi
26.01.	Perencanaan Pembangunan Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi (DESTIKA)
.....	dst.....

27.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
27.01.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kapuas
27.02.	Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
27.03.	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SiRUP dan SPSE di Kecamatan dan SKPD
27.04.	Sosialisasi Aplikasi E-Procurement
27.05.	Pemuktahiran Data Pengguna Aplikasi E-Procurement Pada LPSE Kapuas Hulu
.....	dst.....
28.	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
28.01.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
28.02.	Pelatihan Jurnalistik bagi siswa SLTP/SLTA
.....	dst.....
Urusan :	2.01. - PERTANIAN
15.	Peningkatan Kesejahteraan Petani
15.08.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani
15.09.	Magang Petugas Pelatihan Penggunaan GPS dan Aplikasi GIS di Luar Propinsi
15.10.	Pembinaan Penguatan Kelembagaan Wilayah Indikasi Geografis Terhadap Peningkatan Produksi Beras Padi Raja Uncak
15.11.	Pelatihan Pngendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Bagi Petugas dan Petani
15.12.	Pelatihan Penggunaan dan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) Bagi Petani dan Pelaku Agribisnis
15.13.	Partisipasi dan Keikutsertaan KTNA Kapuas Hulu Dalam Kegiatan PEDTA ke X Tingkat Propinsi Kalimantan Barat di Kecamatan Hulu Gurung
15.26.	Workshop Grand Design Pengembangan Usaha Agribisnis
.....	dst.....
16.	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan)
16.02.	Penyusunan Data Base Potensi Tanaman Pangan
16.07.	Identifikasi Potensi Wilayah Pengembangan Areal Persawahan dalam Rangka mendukung
16.15.	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija
16.19.	Pengelolaan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan
16.20.	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan
16.25.	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian
16.29.	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan dan Pertanian
16.30.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura
16.31.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
16.32.	Penyusunan Data Penggunaan Lahan (Land Use) Pertanian
16.33.	Peningkatan Produksi Tanaman Padi dan Palawija Skala Kecil
16.34.	Operasional Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
16.35.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
16.40.	Rapat Teknis dan Koordinasi Pembangunan Pertanian
16.41.	Pendataan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN)
16.42.	Partisipasi Keikutsertaan Pesta Pemuda Tani Kalimantan Barat
.....	dst.....
17.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian
17.07.	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah Dalam Pertasi Kencana
17.15.	Pameran dan Expo Hasil Produk Pertanian Tingkat Provinsi

17.16.	Promosi Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah
17.17.	Partisipasi Keikutsertaan dalam Kegiatan Krida Pertanian dan Hari Pangan Sedunia di Kayong Utara
17.18.	Promosi Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah dalam Rangka Peda dan Prestasi Kencana
.....	dst.....
18.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
18.01.	Pelatihan Kelompok Tani Hutan dan Penyuluh Swadaya
18.02.	Pelatihan Teknis Pengendalian OPT Karet
18.05.	Pelatihan Teknis Budidaya dan Pertemuan petani/Penangkar karet
18.07.	Pengembangan Percontohan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan (Demplot
18.08.	Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna Mendukung PEDDA 2016
18.09.	Pembinaan Teknologi Budidaya Gaharu terhadap Kelompok Masyarakat sekitar Kawasan Hutan
18.10.	Pembinaan Petani Nelayan Tentang Teknologi Pembuatan Kolam dan Keramba
18.11.	Sosialisasi Perda Tentang Larangan Penubaan, Penyentruman dan Penggunaan Zat-zat Kimia
18.12.	Peningkatan Keterampilan Petani dan Kelembagaan Petani Melalui Pekan Nasional (PENAS)
18.13.	Peningkatan Keterampilan Petani dan Kelembagaan Petani Melalui Pertasi Kencana
18.14.	Pembinaan Kelompok Tani Hutan Dalam Mengadopsi Teknologi Aneka Tanaman Perkebunan
18.15.	Penyediaan Materi dan Metode Penyuluhan Kehutanan
18.16.	Sosialisasi Pemetaan Partisipatif Wilayah Perdesaan
18.17.	Demonstrasi Cara Pemijahan Ikan
.....	dst.....
19.	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
19.01.	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
19.02.	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan
19.06.	Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Hortikultura
19.07.	Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Buah - Buahan
19.08.	Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Sayuran
19.09.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura dan Peningkatan
19.10.	Penyusunan Statistik Tanamann Hortikultura
19.11.	Pengembangan Kampung Pisang Partisipasi Mendukung PEDDA 2016
19.12.	Pembuatan Demplot Hortikultura Partisipasi Mendukung PEDDA 2016
19.13.	Pembuatan Demplot Tanaman Hortikultura
19.14.	Pendataan Peredaran Benih
19.15.	Pendukung Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Hutan
19.16.	Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Hutan
19.17.	Sosialisasi dan Konsultasi Pencegahan Hama dan Penyakit Tanaman Hortikultura
19.18.	Penyusunan Profil Bidang Hortikultura
19.19.	Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Hortikultura
19.20.	Perbanyakan Pengadaan Bibit Durian Empakan Mendukung PEDDA Tahun 2016
19.21.	Pengembangan dan Demonstrasi Budidaya Jamur Mendukung PEDDA 2016
19.22.	Identifikasi dan Pembuatan Buku Anggrek Endemik Kapuas Hulu
19.23.	Demonstrasi Plot Lahan PKK (Kebun PKK Kabupaten)
.....	dst.....
20.	Pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan lapangan
20.02.	Penyuluhan dan pendampingan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
20.03.	Pertemuan teknis tingkat balai penyuluhan pertanian (BPP)
20.04.	Pertemuan Teknis Mantri Tani Kecamatan

20.05.	Pertemuan rutin penyuluh pertanian tingkat kabupaten
20.06.	Penilaian Angka Kredit Poin Penyuluh Pertanian
20.08.	Pembinaan Pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) Kab.Kapuas Hulu
20.09.	Pembinaan BPP Model
20.12.	Pertemuan teknis dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat
20.13.	Pelatihan Pembekalan Penyuluhan Pertanian Lapang
20.14.	Peningkatan Keterampilan Petani dan Kelembagaan Petani melalui Pekan Daerah (PEDA)
20.15.	Pertemuan Teknis Tingkat Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP)
20.16.	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Bidang Penyuluh Kehutanan
20.17.	Pemuktahiran Data Base Penyuluh / SIMLUH
20.18.	Pertemuan Teknis Bidang Perikanan Tingkat BP4K
20.19.	Penilaian Kinerja Penyuluh Pertanian dan Petani
20.20.	Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kab. Kapuas Hulu
20.21.	Seminar, Temu teknis dan Jambore Penyuluh
20.22.	Pembangunan Balai penyuluhan Pertanian
20.23.	Rehabilitasi Bangunan BPP
20.24.	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala BPP
20.25.	Pertemuan Penyuluh Dalam Rangka Sosialisasi Program dan Evaluasi Kegiatan Dinas T.A. 2016
20.26.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan BPP
20.27.	Pembangunan Sarana Pendukung BPP
20.28.	Gelar Teknologi Penyuluh Tingkat Kabupaten
20.29.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala BPP
20.30.	Pembangunan Ruang Workshop BPP
20.31.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan BPP
20.32.	Pembangunan Pagar Kantor BPP
20.33.	Pengadaan Tanah Untuk Kantor Dan Lahan Percontohan BPP Sauwe Kecamatan Putussibau Selatan
20.34.	Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian
20.35.	Penyediaan Fasilitas Rumah Jabatan Kepala BPP
.....	dst.....
21.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
21.01.	Pendataan Masalah Peternakan
21.02.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
21.06.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
21.07.	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pemotongan Ternak
21.08.	Pengadaan Obat - obatan dan Peralatan Peternakan
21.09.	Pengawasan Peredaran Ternak dan Produk Peternakan Illegal
21.10.	Pelayanan Kesehatan Hewan
21.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan
21.12.	Sosialisasi Tentang Kewaspadaan Dini Bahaya Penyakit Flu Babi di Daerah Perbatasan
21.13.	Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)
21.14.	Pengadaan Obat-obatan, Vaksinasi dan Perlengkapan Peternakan
21.15.	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies
21.17.	Bimbingan Teknis Pengendalian Rabies
.....	dst.....
22.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
22.02.	Pembibitan dan Perawatan Ternak
22.06.	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peternakan

22.08.	Pengembangan Agribisnis Peternakan
22.09.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program peternakan
22.10.	Pendataan Perkembangan dan populasi Ternak
22.11.	Bazar Produk Peternakan
22.12.	Penyusunan Data Base Potensi Peternakan
22.13.	Pendistribusian Ternak Kepada Masyarakat
22.14.	Sosialisasi Persiapan Pengembangan Kawasan Desa Unggas Strategis Kecamatan (KDSK)
.....	dst.....
23.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
23.12.	Gerakan sadar pangan asal hewan atas hasil peternakan masyarakat
23.13.	Pameran dan Lounching Produk Unggulan Peternakan
.....	dst.....
24.	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
24.05.	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna (Mesin Tetas)
24.07.	Pelaksanaan Penerapan Inseminasi Buatan dan Intensifikasi Kawin Alam
24.08.	Sosialisasi Penerapan teknologi peternakan tepat guna
24.09.	Sosialisasi Penerapan Teknologi Pengawetan Pakan Ternak Ruminansia
25.	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman
25.01.	Pencegahan dan Pengenadalian Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim
25.02.	Pengamatan dan Pelaporan Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim
25.03.	Pembinaan dan Penerapan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan
25.04.	Pencegahan dan Pengendalian Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim Pada Kawasan Tanaman Pangan
.....	dst.....
26.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Teknis Pertanian
26.01.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Pembenihan dan Pembibitan
26.02.	Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan SPP / SPMA
.....	dst.....
27.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lapangan
27.02.	Penyuluhan dan Pendampingan Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
27.03.	Pertemuan Teknis Tingkat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
27.05.	Pertemuan Rutin Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten
27.06.	Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian
27.07.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
27.08.	Pendampingan Pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan (PUAP) Kab. Kapuas Hulu
27.09.	Pembinaan Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan di Keramba dan Kolam
.....	dst.....
28.	Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan dan Kebun
28.05.	Monitoring dan Evaluasi PSDH-DR dan Retribusi Hasil Hutan Kab. Kapuas Hulu
28.06.	Sertifikasi Tanaman Kehutanan
28.07.	Pengembangan Industri dan Pengendalian Hasil Hutan
28.08.	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
28.09.	Penelitian Tentang Usaha Percepatan Pembentukan Inti Gaharu
28.10.	Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan Lingkungan / Jalan

28.12.	Survey Wilayah Pemukiman dalam Kawasan Hutan dan Kebun
28.13.	Survey Potensi Sumber Daya Hutan dan Perkebunan
28.14.	Penataan Kawasan Hutan dan Lahan Partisipatif
28.15.	Koordinasi Penataan Kawasan Hutan dan Lahan
.....	dst.....
29.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
29.01.	Reklamasi Lahan Bekas Tambang Emas
29.05.	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan RHL
29.06.	Pelestarian dan Budi Daya Burung Walet serta Konservasi Sumber Daya Alam
29.07.	Pembelajaran Budidaya Sarang Burung Walet
29.08.	Penanggulangan Kegiatan Ilegal logging dan Monitoring Hot Spot kebakaran Hutan dan Lahan di
.....	dst.....
31.	Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum
31.03.	Peningkatan dan Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum
.....	dst.....
Urusan :	2.02. - KEHUTANAN
15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
15.01.	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
15.02.	Pengembangan hutan tanaman
15.03.	Pengembangan hasil hutan non-kayu
15.04.	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
15.05.	Monitoring dan Evaluasi PSDH-DR dan Retribusi Hasil Hutan Kabupaten Kapuas Hulu
15.06.	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
15.07.	Pengembangan industri dan Pengendalian Hasil Hutan
15.08.	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
15.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.10.	Pembinaan /Pemeliharaan batas kawasan baik batas kawasan Maupun fungsi
15.11.	Survey Potensi Sumber daya hutan dan Perkebunan
15.12.	Pemetaan kawasan hutan dan lahan Partisipatif
15.13.	Pengembangan sistem informasi penataan kawasan hutan berbasis WEBGIS
15.14.	Pembinaan, pengawasan, Perbenihan oleh masyarakat dan pengusaha
15.15.	Inventarisasi Potensi Dalam Wilayah KPH
15.16.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Budidaya Lebah Madu di kabupaten Kapuas Hulu
15.17.	Pelatihan Survey Pontensi Sumber Daya Hutan dan Perkebunan
15.18.	Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan
15.19.	Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andaln KTNA ke-XIV
15.20.	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Untuk Klaster Madu
15.21.	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Madu Hutan
15.22.	Peningkatan Sarana Prasarana Pengembangan Madu Hutan
15.23.	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan
15.24.	Pembuatan Sarana Penyuluh Kehutanan / Demplot
.....	dst.....
16.	Rehabilitasi hutan dan lahan
16.01.	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

16.02.	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
16.04.	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
16.05.	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
16.06.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam RHL melalui pembinaan Usaha Pembibitan
16.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.08.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kab. Kapuas Hulu
16.09.	Identifikasi Lokasi Tegakan Benih Tanaman Unggulan Kapuas Hulu
16.10.	Pemeliharaan Lanjutan Tanaman Kiri Kanan Jalan Putussibau - Kalis
16.11.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat) - DBH
16.12.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pembuatan Tanaman Reboisasi Swakelola)
16.13.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pembuatan Tanaman Reboisasi/Kontraktual)
16.14.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kelompok Tani RHL
16.15.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pembuatan Reboisasi)
16.16.	Penyelenggaraan Penghijauan Lingkungan (Keg. DAK-DR TA. 2009 Yang Tidak Terealisasi)
16.17.	Penghijauan Lingkungan dan Peningkatan Produktifitas Lahan di Daerah Tertinggal
16.18.	Penyusunan rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011-2012 di kab KH
16.19.	Pendampingan Penyelenggaraan RHL (Reboisasi swakelola dan pembuatan hutan rakyat)
16.20.	Penyelenggaraan Gerakan Penanaman Pohon Indonesia
16.21.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pembuatan tanaman hutan Rakyat Pengkayaan Swakelola)
16.22.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan lahan (Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Swakelola)
16.23.	Penyediaan Informasi Lahan Kritis untuk Kabupaten Kapuas Hulu
16.24.	Pendukung Penyelenggaraan RHL
16.25.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kelompok Tani RHL
16.26.	Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan
16.29.	Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
16.30.	Peremajaan Kebun Kopi Milik Masyarakat
16.31.	Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Peningkatan Produksi Perkebunan
16.32.	Pemantapan Data Statistik Perkebunan
16.33.	Penilaian Usaha Perkebunan
16.34.	Penyelenggaraan Gerakan Penanaman Pohon Indonesia
16.35.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan rehabilitasi Perhutanan Sosial
16.36.	Pendataan Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan
16.37.	Penyelenggaraan RHL Sumber DAK Kehutanan
16.38.	Penyediaan Sarana Untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Perhutanan Sosial
16.39.	Pembuatan Tanaman Reboisasi
16.40.	Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat
16.41.	Peningkatan Kapasitas Kelembaga Kelompok Tani Hutan Pelaksanaan RHL
16.42.	Penyediaan Bibit Tanaman Untuk GPPI
16.43.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) DI Kab.KH
16.44.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan
16.45.	Pemeliharaan Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan
16.46.	Pelaksanaan Hari Menanam Pohon Indonesia
16.47.	Penyusunan Profil Pelaksanaan RHL
16.48.	Pendataan Tanaman Hasil RHL
16.49.	Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL
16.50.	Penanaman Bibit Kehutanan secara Swakelola
16.51.	Penanaman Swakelola Pada Tanah Milik
16.52.	Pengadaan Bahan Publikasi dan Penyebaran Informasi RHL dan Perhutanan Sosial
.....	dst.....

17.	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
17.01.	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
17.02.	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
17.03.	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
17.04.	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
17.05.	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
17.06.	Sosialisasi dan Pengendalian Pencurian Hasil Hutan
17.07.	Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan
17.08.	Pengamanan dan perlindungan kawasan hutan
17.09.	Pengawasan dan Penanggulangan kebakaran Hutan
17.10.	Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
17.11.	Pengendalian Kerusakan hutan dari pencurian kayu di kawasan hutan negara
17.12.	Monitoring dan Identifikasi Hayati Bernilai Konservasi Tinggi
17.13.	Identifikasi Pemukiman dan Sarana Pembangunan Dalam Kawasan Hutan
17.14.	Pengendalian Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
17.15.	Pelaksanaan Penilaian Lomba PKA
17.16.	Identifikasi Kawasan Ekosistem Esensial
17.17.	Sosialisasi Penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi
17.18.	Monitoring Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
17.19.	Partisipasi Dalam Kegiatan Hari Krida Pertanian/Hari Pangan Sedunia/Pekan Daerah/Pekan Nasional KTNA
17.20.	Koordinasi dan Konsultasi Perlindungan Hutan
17.21.	Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial
.....	dst.....
18.	Program pemanfaatan kawasan hutan industri
18.01.	Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah
18.02.	Dst.....
.....	dst.....
19.	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
19.01.	Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
19.02.	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
19.03.	Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil
19.04.	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
19.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.06.	dst.....
20.	Perencanaan Pembangunan Sektor Perkebunan dan Kehutanan
20.01.	Pengembangan hutan masyarakat adat
20.02.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek - Proyek Perkebunan dan Kehutanan
20.03.	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan
20.04.	Pendampingan Masyarakat Dalam Menjaga Sumber Daya Hutan
20.05.	Pengembangan kesatuan pengelolaan hutan kab Kapuas Hulu
20.06.	Fasilitasi Pengolahan Hutan Oleh Masyarakat
20.07.	Percontohan Induksi Pohon Gaharu milik masyarakat di kab KH
20.08.	Penyusunan Rancangan Petak dan Blok Kerja dalam wilayah KPH Modal
20.09.	Pengendalian Penataan kawasan hutan dan kebun
20.10.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Bididaya Lebah Madu di Kab. KH

20.11.	Penyediaan Sarana Budidaya Lebah Madu
20.12.	Penyusunan Rencana Aksi Sektor Perkebunan dan Kehutanan di Wilayah Perbatasan
20.13.	Pemanfaatan/ Penggunaan Pola Ruang Kehutanan Kabupaten Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
20.14.	Pengembangan Pengelolaan Hutan dan Reboisasi Kawasan Hutan
20.15.	Pembinaan Kegiatan RHL Wilayah KPHP Model di Kabupaten Kapuas Hulu
20.16.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perkebunan dan Kehutanan
20.17.	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Generasi Muda Kehutanan
20.18.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Budidaya Lebah Madu
20.19.	Penyediaan Peralatan Penyuntikan Pohon Gaharu
20.20.	Percontohan Induksi Pohon Gaharu Milik Masyarakat
20.21.	Penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan
20.22.	Penyediaan Peralatan Pengolahan Hasil Hutan
20.23.	Penyediaan Pendukung Operasional KPH
20.24.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mess KPH
20.25.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor KPH
20.26.	Penyediaan Listrik dan Jaringan Listrik untuk Mess dan Kantor KPH
20.27.	Penyusunan Listrik dan Jaringan Listrik untuk Mess dan Kantor KPH
20.28.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mess dan Kantor KPH
20.29.	Pengembangan Inokulan Gaharu di Kabupaten Kapuas Hulu
20.30.	Pembuatan Persemaian Semi Permanen
20.31.	Penyediaan Listrik dan Jaringannya Untuk KPH
20.32.	Penunjang Kegiatan Rutin KPH
20.33.	Partisipasi Dalam Kegiatan Jambore Penyuluh Kehutanan
20.34.	Pengembangan Sentra Madu Hutan Kapuas Hulu / Kluster Industri Madu
20.35.	Pengembangan Sentra / Gallery Produk HHBK Madu Hutan
20.36.	Pembangunan Rumah Produksi Madu Hutan
20.37.	Penyediaan Sarana Pengembangan HHBK
20.38.	Penilaian Lomba Wana Lestari
20.39.	Pengembangan Sentra/Sub Sentra Madu Hutan Kab. Kapuas Hulu
.....	dst.....
21.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
21.01.	Pameran dan Promosi Produk Perkebunan dan Kehutanan
21.02.	Pameran / EXPO
21.03.	Pameran dan pertemuan Nasional Petani di Kutai Kertanegara (KALTIM)
.....	dst.....
22.	Pelaksanaan Trantib dan Pencegahan Tidak Internal Kehutanan
22.01.	Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan
.....	dst.....
23.	Peningkatan kualitas dan kases informasi SDA dan lingkungan hidup
23.01.	Penyusunan data sumber daya alam dan NSDH Nasional dan Daerah
.....	dst.....
24.	Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
24.01.	Pengembangan Industri dan pemasaran hasil hutan
24.02.	Pembinaan , Pengawasan dan Eksploitasi Sumber daya Hutan
24.03.	Pelayanan Pemberian Dokumen Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan

24.04.	Pelayanan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan HHBK
24.05.	Sosialisasi Hutan Hak
24.06.	Pelayanan Dokumen Hasil Hutan dan Monitoring Pengembalian HHBK
.....	dst.....
25.	Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara
25.01.	Pembinaan / koordinasi /evaluasi dan pelaporan di bidang PNBK
25.02.	Pembinaan/Koordinasi/Evaluasi dan Pelaporan di Bidang PNBK
26.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
26.01.	Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Karet
26.02.	Pelatihan Pengelola Laboratorium Gaharu
26.03.	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
26.04.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan/Kehutanan Tepat Guna
.....	dst.....
27.	Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
27.01.	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan
.....	dst.....
28.	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
28.01.	Penyuluhan Peningkatan Produksi Perkebunan dan Kehutanan
28.02.	Penyusunan Program Penyuluhan, Perkebunan dan Kehutanan
28.03.	Penyusunan Monografi/Data Besa Potensi Perkebunan Wilayah Kab. Kapuas Hulu
28.04.	Koordinasi dan Konsultasi Penyuluhan Bidang Perkebunan dan Kehutanan ke Luar Daerah
28.05.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
28.06.	Penyuluhan dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Perkebunan dan Kehutanan
28.07.	Pembangunan Kebun Bibit Desa
28.08.	Koordinasi dan Konsultasi dan Lain-lain Berkenaan dengan Kegiatan Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan
.....	dst.....
29.	Pemberdayaan Kelembagaan Perkebunan dan Kehutanan
29.01.	Peningkatan Peran Aktif Kelembagaan dan Dunia Usaha Perkebunan/Kehutanan
29.02.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
.....	dst.....
30.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
30.01.	Penilaian Angka Kredit Point Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
.....	dst.....
31.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
31.01.	Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar dan Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
31.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Masyarakat
.....	dst.....
32.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
32.01.	Penyuluh dan Pendampingan Kelompok Tani Perkebunan dan Kehutanan
32.02.	Penyusunan Program Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan TK. Kabupaten
32.03.	Penyusunan Monografi/Identifikasi Data Potensi Perkebunan dan Kehutanan Wilayah Kabupaten

32.04.	Penyuluhan dan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan/Kehutanan Pelaksana
32.05.	Pendampingan dan Bimbingan Teknis Kelompok Tani Perkebunan/Kehutanan
24.03.	Pelayanan Pemberian Dokumen Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Iktan
24.04.	Pelayanan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan HHBK
24.05.	Sosialisasi Hutan Hak
24.06.	Pelayanan Dokumen Hasil Hutan dan Monitoring Pengembalian HHBK
.....	dst.....
25.	Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara
25.01.	Pembinaan / koordinasi /evaluasi dan pelaporan di bidang PNBPN
25.02.	Pembinaan/Koordinasi/Evaluasi dan Pelaporan di Bidang PNBPN
.....	dst.....
26.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
26.01.	Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Karet
26.02.	Pelatihan Pengelola Laboratorium Gaharu
26.03.	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
26.04.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan/Kehutanan Tepat Guna
.....	dst.....
27.	Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
27.01.	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan
.....	dst.....
28.	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
28.01.	Penyuluhan Peningkatan Produksi Perkebunan dan Kehutanan
28.02.	Penyusunan Program Penyuluhan, Perkebunan dan Kehutanan
28.03.	Penyusunan Monografi/Data Besa Potensi Perkebunan Wilayah Kab. Kapuas Hulu
28.04.	Koordinasi dan Konsultasi Penyuluhan Bidang Perkebunan dan Kehutanan ke Luar Daerah
28.05.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
28.06.	Penyuluhan dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Perkebunan dan Kehutanan
28.07.	Pembangunan Kebun Bibit Desa
28.08.	Koordinasi dan Konsultasi dan Lain-lain Berkenaan dengan Kegiatan Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan
.....	dst.....
29.	Pemberdayaan Kelembagaan Perkebunan dan Kehutanan
29.01.	Peningkatan Peran Aktif Kelembagaan dan Dunia Usaha Perkebunan/Kehutanan
29.02.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
.....	dst.....
30.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
30.01.	Penilaian Angka Kredit Point Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan
.....	dst.....
31.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
31.01.	Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar dan Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
31.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Masyarakat
.....	dst.....

32.	Pemberdayaan PenyuluhPertanian / Perkebunan Lapangan
32.01.	Penyuluh dan Pendampingan Kelompok Tani Perkebunan dan Kehutanan
32.02.	Penyusunan Programa Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan TK. Kabupaten
32.03.	Penyusunan Monografi/Identifikasi Data Potensi Perkebunan dan Kehutanan Wilayah Kabupaten
32.04.	Penyuluhan dan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan/Kehutanan Pelaksana
32.05.	Pendampingan dan Bimbingan Teknis Kelompok Tani Perkebunan/Kehutanan
.....	dst.....
Urusan :	2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
15.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
15.01.	Pengawasan Kuasa Pertambangan
15.07.	Pengawasan Usaha Pertambangan
15.08.	Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya Mineral
15.09.	Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian untuk Industri Keramik
15.10.	Penyusunan Data Base Program Pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
16.	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
16.01.	Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
.....	dst.....
18.	Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Efisiensi, Efektifitas dan Nilai Tambah Bidang Pertambangan
18.01.	Pengeboran Air Tanah untuk Daerah Rawan Air
18.02.	Rencana Reklamasi Wilayah Pertambangan Rakyat
18.03.	Penyusunan Pengembangan Energi Alternatif di Kab. Kapuas Hulu
18.07.	Inventarisasi dan Informasi Sumber Daya Air
18.08.	Inventarisasi dan Pemetaan Bahan galian Untuk Industri Keramik
.....	dst.....
19.	Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Energi
19.01.	Pengawasan Terhadap Penyaluran LPG
19.02.	Pengawasan BBM
.....	dst.....
20.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bidang Pertambangan Dan Energi
20.02.	Pengadaan Alat Survey Pertambangan
.....	dst.....
27.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
27.01.	Study Kelayakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
27.02.	Penyediaan Listrik Pedesaan
27.03.	Pengawasan BBM
27.04.	Penyediaan Lampu Jalan Kota
27.05.	Pengawasan Terhadap Penyaluran LPG
27.06.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengelolaan Sistem PLTS Terpusat 5 Kw
.....	dst.....
Urusan :	2.04. - PARIWISATA

15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
15.01.	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
15.02.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
15.03.	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
15.04.	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
15.06.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
15.07.	Pengembangan Statistik Kepariwisataan
15.08.	Pelatihan pemandu wisata terpadu
15.09.	Atraksi Budaya Daerah di Obyek-Obyek Wisata
15.10.	Pengadaan/Perencanaan Bahan Promosi
15.11.	Promosi Dalam Negeri dan Dalam Daerah
15.12.	Monitoring & Pengawasan ODTW dan usaha jasa Pariwisata
15.13.	Monitoring dan pendataan produk usaha jasa Pariwisata
15.14.	Peningkatan keterampilan, SDM dan perlengkapan bidang Wisata Bahari
15.15.	Operasional Pemungutan retribusi dan pendataan obyek dan daya tarik wisata
15.16.	Promosi Pariwisata di Luar Negeri (Lanjutan)
.....	dst.....
18.	Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata
18.01.	Pengelolaan Obyek-obyek wisata
.....	dst.....
19.	Pengembangan Pemasaran pariwisata
19.01.	Pelaksanaan Promosi Pemasaran Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Daerah
19.02.	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
19.03.	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Perbatasan
19.05.	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
19.15.	Fasilitasi Lomba Foto Potensi Budaya dan Pariwisata Kab. Kapuas Hulu
19.16.	Fasilitas Pameran Foto Kebudayaan dan Pariwisata
.....	dst.....
20.	Pengembangan Destinasi Pariwisata
20.01.	Pengembangan objek pariwisata unggulan
20.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
20.03.	Pengembangan Paket dan Wisata Unggulan
20.04.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek wisata
20.05.	Pelaksanaan Koordinasi Pokja Ekowisata Dalam Penunjang Program Cluster Ekowisata
20.06.	Pembangunan Homestay
20.08.	Pelaksanaan Fasilitasi Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata Dalam Menunjang Program Cluster Ekowisata
20.09.	Inventarisasi Data Dukung Destinasi Unggulan
20.10.	Pelatihan Kepariwisataan
20.11.	Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Kota Balikpapan
20.12.	Penyuluhan UU dan Perda Perizinan Kepariwisataan
20.13.	Pembuatan Stiker Perizinan Usaha Jasa Pariwisata
20.14.	Penyuluhan Kepariwisataan (sadar wisata) kepada masyarakat pelajar mahasiswa toga tomas dan mitra Pariwisata
20.15.	Pembangunan Kebun Raya

20.16.	Pembangunan Saran Objek Wisata Pantai Manggar
20.17.	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kebersihan
20.18.	Pengadaan Kendaraan Pembersih Pantai
20.19.	Pembuatan Leaflet Himbauan Pengunjung Obyek Wisata
20.20.	Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Balikpapan
20.21.	Pembelajaran Desa Wisata Kabupaten Kapuas Hulu di Yogyakarta
20.22.	Rapat dan Konsultasi Mengenai Kompetisi Pengelolaan DTW Berwawasan Cipta Award
20.23.	Pemeliharaan Pagar Objek Wisata Danau Piang Kuak
.....	dst.....
21.	Pengembangan Kemitraan Pariwisata
21.01.	Pengembangan dan Pemuktahiran Informasi Dan Data Base
21.02.	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
21.03.	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
21.04.	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata
21.05.	Fasilitasi KKN Mahasiswa Bidang Ekowisata
21.06.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
21.07.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
21.08.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
21.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.10.	Pelatihan Tata Kelola Destinasi
21.11.	Pembelajaran Tata Kelola Potensi Wisata
.....	dst.....
Urusan :	2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
20.03.	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya
20.05.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan
20.06.	Pertemuan Teknis Pembudidayaan Ikan
20.07.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat
20.08.	Pengembangan Kelompok Tani Pembudidaya
20.09.	Pameran Hasil Produksi Perikanan Budidaya
20.10.	Penyusunan Masterplan Minapolitan Kabupaten Kapuas Hulu
20.11.	Perencanaan Pembuatan Kolam dan Keramba di Kab. Kapuas Hulu
20.12.	Penyediaan Jasa Perencanaan Fasilitas Perikanan
20.13.	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan
20.14.	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Cluster Perikanan
.....	dst.....
21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
21.06.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Tangkap
21.07.	Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil
21.08.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan
21.09.	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
21.10.	Fasilitasi Pembinaan Bagi Pengumpul dan Pengangkut Ikan di Wilayah Putussibau
21.11.	Fasilitasi Pelaksanaan Hari Nusantara Tingkat Kabupaten
21.12.	Penyusunan PERDA Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
.....	dst.....

22.	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
22.02.	Pemberdayaan Penyuluh Perikanan
22.03.	Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan
22.04.	Sekolah Lapang Penyuluh Perikanan
22.05.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
22.06.	Kegiatan Latihan, Kunjungan dan Supervisi Penyuluh Perikanan
22.07.	Pertemuan Teknis Bidang Perikanan Tingkat Wilayah Kerja penyuluh (WKP)
22.08.	Penilaian Angka Kredit
22.09.	Pembinaan Kelompok P2WKSS Bidang Penyuluhan Perikanan
22.10.	Pekan Daerah (PEDA)
22.11.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
.....	dst.....
23.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
23.02.	Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Penanganan Pasca Panen
23.03.	Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah
23.04.	Promosi Hasil Produksi Perikanan Budidaya
23.05.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Benih Ikan
23.06.	Promosi Hasil Potensi Perikanan Tangkap
23.07.	Pendampingan Kegiatan Lokus Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan
24.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
24.02.	Pengembangan Kawasan Budidaya
24.03.	Penguatan Sarana dan Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Tawar
24.04.	Peningkatan Pengawasan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
24.05.	Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani Pembudidaya
.....	dst.....
25.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya
25.01.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan
25.02.	Pengawasan Sumber Daya Ikan
25.03.	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
25.04.	Penguatan Kelembagaan Kelompok Pengawasan
25.05.	Restocking Ikan Arwana
25.07.	Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas
25.08.	Penanggulangan Aktivitas Illegal Fishing di Kabupaten Kapuas Hulu
.....	dst.....
26.	Program Pengembangan Data dan Informasi Perikanan
26.01.	Pengembangan Statistik dan Informasi Perikanan Budidaya
26.02.	Pengembangan Statistik dan Informasi Perikanan Tangkap
26.03.	Pengembangan Statistk dan Informasi PerikananPengolahan Hasil Perikanan dan Pemasaran
26.04.	Pengembangan Statistik dan Informasi Perikanan KP3K
26.05.	Penyusunan Buku Masterplan Peingkatan Kehidupan Nelayan
.....	dst.....
27.	Program Pengembangan SDM dan Kelembagaan Perikanan
27.01.	Pembinaan Kelompok P2WKSS

27.02.	Pembinaan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan
27.03.	Pertemuan Teknis Bagi Kelompok Pengolah Hasil Perikanan
27.04.	Pembinaan Kelompok Penerima PUMP Pengolahan hasil perikanan
27.05.	Pengukuhan Tim Forikan dan Kegiatan Gemarikan
27.06.	Pembinaan Pasar Benih Ikan
27.07.	Pertemuan Teknis Bagi Kelompok Penerima Bantuan PUPM -Pengolahan Hasil Perikanan
.....	dst.....
28.	Pengembangan Standarisasi Produk Pengolahan Hasil Perikanan
28.01.	Pengawasan Mutu dan Kapasitas Produk Pengolahan Hasil Perikanan
28.03.	Peningkatan Produk dan Mutu Olahan Perikanan
.....	dst.....
29.	Program Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pengendalian
29.02.	Peningkatan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat
.....	dst.....
30.	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau - Pulau Kecil
30.01.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan
30.02.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan
30.03.	Identifikasi dan Dokumentasi Pulau - Pulau Kecil
.....	dst.....
Urusan :	2.06. - PERDAGANGAN
15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
15.01.	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
15.02.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
15.03.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
15.04.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah
15.05.	Pelayanan informasi distribusi dn pengawasan barang beredar
15.06.	Pembinaan / operasi penertiban alat ukur/tera ulang
15.07.	Tera / tera ulang UTTP
15.08.	Operasional pos ukur ulang
15.09.	Study pengembangan kemetrolgian
15.10.	Pemutakhiran data metrologi dalam angka
15.11.	Registrasi wajib tera pemilik alat-alat UTTP
15.12.	Pengawasan barang beredar di pasar
15.13.	Pengawasan kepada distributor dan pengecer bahan kebutuhan pokok masyarakat
15.14.	Pengawasan terhadap legalitas perusahaan bidang perdagangan
.....	dst.....
16.	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
16.01.	Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
16.02.	Penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa
16.03.	Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
16.04.	Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
16.05.	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
16.06.	dst.....

17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
17.01.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
17.02.	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
17.03.	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
17.04.	Pengembangan data base informasi potensi unggulan
17.05.	kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional
17.06.	Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk
17.07.	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
17.08.	Membangun jejaring dengan eksportir
17.09.	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait
17.10.	Pengembangan kluster produk ekspor
17.12.	Pembangunan promosi perdagangan internasional
17.13.	Pameran terpadu di Jakarta
17.14.	Pelatihan strategi pembiayaan ekspor
17.15.	Mengikuti pameran/misi dagang ke Jawa Timur, Jawa Tengah dan Internasional
17.16.	Sosialisasi kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri
.....	dst.....
18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
18.01.	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
18.02.	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
18.03.	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
18.04.	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
18.05.	Pengembangan pasar lelang daerah
18.06.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
18.07.	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
18.08.	Materisasi Listrik Pasar Kampung Baru Tengah (block A, B, C, D)
18.09.	Pembuatan TPS untuk Pembangunan & Rehabilitasi Pasar Klandasan
18.10.	Pengecatan Genteng Asbes Atap Blok A Pasar Sepinggan
18.11.	Pembuatan Konsol Belakang Petak Pasar Ikan Pasar Sepinggan
18.12.	Pembuatan Pembatas Parkir Lingkungan Pasar Sepinggan
18.13.	Pemasangan Paving Stone Halaman Kantor UPTD Wilayah VI
18.14.	Semenisasi halaman parkir UPTD Wilayah I Pasar Shopping
18.15.	Pengecatan Atap Teras Depan Pasar Inpres Kebun Sayur
18.16.	Perbaikan Plafond/Talang Pasar Inpres Kebun Sayur
18.17.	Pemasangan Lantai Beton Block Pasar Kampung Baru Tengah
18.18.	Perbaikan Atap Seng BJLS 25 KI Pasar Kampung Baru Tengah
18.19.	Pembuatan Bak Sampah Beton TPS Pasar Pandansari
18.20.	Pembuatan Pembatas Parkir Pasar Klandasan
18.21.	Pengecatan Gedung Pasar Klandasan dan Pasar Sepinggan
18.22.	Normalisasi Saluran Air/Drainase Pasar Sepinggan
18.23.	Pembuatan Pagar Beton Pengaman TPS Belakang Pasar Sepinggan
18.24.	Pembuatan Pos Satpam Pasar Kampung Baru Tengah
18.25.	Pengadaan Mesin Incenerator
18.26.	Perbaikan/Pemasangan Lantai Keramik Kantor Dinas Pasar
18.27.	Pembangunan Pasar Pandansari Tahap II
18.28.	Pembayaran Sewa Tanah TPS Pasar Pandansari Tahap II
18.29.	Komputerisasi Perijinan Sewa Petak Pasar dan Pendapatan Retribusi

18.30.	Pembuatan profil investasi sektor industri perdagangan dan koperasi
18.31.	Pembuatan Program Database perusahaan sistem Aplikasi Komputerisasi
18.33.	Pembuatan Tangga Penghubung Plaza Muara Rapak (Lanjutan)
18.34.	Pengadaan Blower Lantai Dasar Plaza Muara Rapak (Lanjutan)
18.35.	Pengadaan Pot Tanaman (Potisasi) Pada Pasar (ABT)
18.36.	Pengadaan Pohon Pelindung Pada Pasar (ABT)
18.38.	Pengadaan Tong Sampah dari Drum (ABT)
18.40.	Pembayaran kelebihan Ret Angkutan TPS (Tempat Penampungan Sementara) Pasar Pandansari (ABT)
.....	dst.....
19.	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
19.01.	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
19.02.	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
19.03.	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
19.04.	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
19.05.	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan
19.06.	Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan
19.07.	dst.....
20.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
20.01.	Pembangunan Pasar Pandansari (Luncuran)
20.02.	Pembenahan Kios-Kios Buah Salak
20.03.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar
20.04.	Pembangunan Pasar
20.05.	Rehab Jalan
.....	dst.....
21.	Program pengembangan data dan informasi perdagangan
21.01.	Penyusunan, pengumpulan dan validasi data perindustrian
.....	dst.....
Urusan :	2.07. - INDUSTRI
15.	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
15.01.	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi
15.02.	Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator
15.03.	Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi
15.04.	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
15.05.	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
15.06.	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
15.07.	Dst.....
16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
16.01.	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
16.02.	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
16.03.	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
16.04.	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
16.05.	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
16.06.	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

.....	dst.....
17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
17.01.	Pembinaan kemampuan teknologi industri
17.02.	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
17.03.	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
17.04.	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
17.05.	Diseminasi Teknologi pengolahan komoditi karet (Lanjutan)
17.06.	Pameran promosi investasi industri tingkat nasional
17.07.	Pengembangan teknologi dapur/tungku hemat energi bagi industri tahu/tempe
17.08.	Pengembangan/peningkatan kemampuan desain produk industri mainan anak
17.09.	Pengembangan KIKS tahap II
17.10.	Pembangunan gedung incubator Business Center (IBC)
.....	dst.....
18.	Program Penataan Struktur Industri
18.01.	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
18.02.	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
18.03.	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
18.04.	Dst.....
19.	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
19.01.	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial
19.02.	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
19.03.	Dst.....
20.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
20.01.	Pelatihan Keanggotaan Koperasi
20.02.	Pelatihan Pengurus dan pengawas koperasi
20.03.	Pelatihan UKM dan Wirausaha baru
.....	dst.....
21.	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
21.01.	Pengelolaan dana bergulir UKM dan Wirausaha baru
.....	dst.....
22.	Program peningkatan kualitas sumber daya industri
22.01.	Pelatihan dan bantuan peralatan batik, bordir dan jahit
22.02.	Pelatihan dan bantuan peralatan industri kecil pengolah makanan
22.03.	Pelatihan dan bantuan peralatan industri logam dan bahan galian C
22.04.	Pelatihan dan bantuan peralatan kerajinan kayu, rotan dan bambu
.....	dst.....
23.	Program pengembangan kelembagaan industri kecil dan menengah
23.01.	Pembinaan dan operasional Dekreasda
.....	dst.....
24.	Program Kawasan Industri Kecil Sember
24.01.	Operasional kegiatan kawasan industri kecil sumber (lanjutan)

24.02.	Penyusunan Modul pengembangan wirausaha Baru modul incubator bussiness centre (IBC) (Lanjutan)
.....	dst.....
Urusan :	2.08. - KETRANSMIGRASIAN
15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)
15.07.	Pembinaan, Pendataan dan Verifikasi TKMT/TKPMP
15.08.	Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur)
.....	dst.....
16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
16.06.	Pembinaan TKPMP dan TKMT serta Pembuatan Kartu Ak-1 Ketenagakerjaan
.....	dst.....
17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
17.04.	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
17.05.	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja
.....	dst.....
18.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
18.02.	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
18.05.	Pembinaan Penyuluhan, Pengembangan dan Penyusunan Progran Trsnmigrasi
18.06.	Pembinaan usaha ekonomi daerah permukiman transmigrasi
18.08.	Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas Hulu
18.15.	Sosialisasi dan Identifikasi Areal Calon Daerah Transmigrasi
18.16.	Study Optimalisasi Penataan Jaringan Irigasi Mikro di Kawasan Transmigrasi di Kab. Kapuas Hulu
18.17.	Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan di Wilayah Transmigrasi
18.18.	Rehabilitas dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Gorong-gorong
18.19.	Perencanaan Pembangunan di Wilayah Permukiman Transmigrasi
18.20.	Redisain Pembangunan di Wilayah Permukiman Transmigrasi
18.21.	Penyelenggaraan Rapat Kerja dan Konsultasi / koordinasi Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi
.....	dst.....
19.	Program Transmigrasi Lokal
19.02.	Pembinaan Penyuluhan Transmigrasi dan Sosialisasi Program Transmigrasi
19.03.	Pembinaan Penyuluhan, Pengembangan Kawasan Program Transmigrasi Permukiman Transmigrasi UPT Bina
19.04.	Pendataan dan Pengarahan Calon Transmigrasi
19.05.	Pembinaan Usaha Ekonomi Daerah Transmigrasi
19.07.	Pelatihan Transmigrasi Lokal / Kegiatan Gema INPOSMA Kab. Kapuas Hulu
19.08.	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi
19.09.	Pengurusan dan Penerbitan Sertifikasi Lahan Transmigrasi
19.11.	Fasilitasi dan Pendampingan Seleksi Calon Transmigrasi Teladan Tingkat Nasional
19.12.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Perkembangan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas Hulu
19.13.	Penyediaan Sarana Air Bersih di Wilayah Transmigrasi
.....	dst.....
20.	Program Perencanaan Tata Ruang Kawasan Calon Transmigrasi / RT-UPT
20.01.	Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Rumah dan Bangunan FU Transmigrasi
20.03.	Kegiatan Perencanaan Bangunan Rumah dan Bangunan Permukiman Daerah Transmigrasi

20.04.	Sosialisasi Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) Wilayah Perbatasan
20.05.	Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi Penduduk Setempat
.....	dst.....
21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
21.02.	Pelaksanaan Kegiatan Hari Anak Nasional
21.03.	Peningkatan Mobilitas Bantuan Sosial
21.04.	Mobilitas Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
.....	dst.....
22.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS
22.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Program Komunitas Adat Terpencil
22.02.	Pelatihan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Cacat
22.03.	Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
22.05.	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
22.06.	Pelatihan Bagi Keluarga Miskin di Daerah Pebatasan
22.07.	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
22.08.	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
22.09.	Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni
.....	dst.....
23.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
23.04.	Mobilisasi dan Pendistribusian Bantuan Sosial
23.06.	Penyusunan Data Base PMKS
23.08.	Pembinaan PSM, Karang Taruna dan organisasi sosial
23.09.	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya - upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
23.10.	Pembinaan Operasional Organisasi Sosial
23.11.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, HUT Kemerdekaan RI & Hari Pahlawan Nasional dan Berkabung Daerah
23.12.	Pengiriman Pasien Cacat Mental ke Singkawang
23.13.	Pelayanan TKI Bermasalah
23.14.	Rehabilitasi Korban Bencana Alam dan Sosial
23.15.	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Anak Nasional
23.16.	Pelayanan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan
23.17.	Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni
23.18.	Pembangunan Rumah Singgah
23.19.	Pelayanan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan
23.20.	Rehabilitasi Gedung Bina Loka Karya (LBK) Pala Pulau
23.21.	Peningkatan SDM Bidang Ketenagakerjaan
.....	dst.....
Urusan :	2.08. - KETRANSMIGRASIAN
15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)
15.07.	Pembinaan, Pendataan dan Verifikasi TKMT/TKPMP
15.08.	Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur)
.....	dst.....
16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja

16.06.	Pembinaan TKPMP dan TKMT serta Pembuatan Kartu Ak-1 Ketenagakerjaan
.....	dst.....
17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
17.04.	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
17.05.	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja
.....	dst.....
18.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
18.02.	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
18.05.	Pembinaan Penyuluhan, Pengembangan dan Penyusunan Program Trsnmigrasi
18.06.	Pembinaan usaha ekonomi daerah permukiman transmigrasi
18.08.	Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas Hulu
18.15.	Sosialisasi dan Identifikasi Areal Calon Daerah Transmigrasi
18.16.	Study Optimalisasi Penataan Jaringan Irigasi Mikro di Kawasan Transmigrasi di Kab. Kapuas Hulu
18.17.	Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan di Wilayah Transmigrasi
18.18.	Rehabilitas dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Gorong-gorong
18.19.	Perencanaan Pembangunan di Wilayah Permukiman Transmigrasi
18.20.	Redisain Pembangunan di Wilayah Permukiman Transmigrasi
18.21.	Penyelenggaraan Rapat Kerja dan Konsultasi / koordinasi Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi
.....	dst.....
19.	Program Transmigrasi Lokal
19.02.	Pembinaan Penyuluhan Transmigrasi dan Sosialisasi Program Transmigrasi
19.03.	Pembinaan Penyuluhan, Pengembangan Kawasan Program Transmigrasi Permukiman Transmigrasi UPT Bina
19.04.	Pendataan dan Pengarahan Calon Transmigrasi
19.05.	Pembinaan Usaha Ekonomi Daerah Transmigrasi
19.07.	Pelatihan Transmigrasi Lokal / Kegiatan Gema INPOSMA Kab. Kapuas Hulu
19.08.	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi
19.09.	Pengurusan dan Penerbitan Sertifikasi Lahan Transmigrasi
19.11.	Fasilitasi dan Pendampingan Seleksi Calon Transmigrasi Teladan Tingkat Nasional
19.12.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Perkembangan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas Hulu
19.13.	Penyediaan Sarana Air Bersih di Wilayah Transmigrasi
.....	dst.....
20.	Program Perencanaan Tata Ruang Kawasan Calon Transmigrasi / RT-UPT
20.01.	Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Rumah dan Bangunan FU Transmigrasi
20.03.	Kegiatan Perencanaan Bangunan Rumah dan Bangunan Pemukiman Daerah Transmigrasi
20.04.	Sosialisasi Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) Wilayah Perbatasan
20.05.	Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi Penduduk Setempat
.....	dst.....
21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
21.02.	Pelaksanaan Kegiatan Hari Anak Nasional
21.03.	Peningkatan Mobilitas Bantuan Sosial
21.04.	Mobilitas Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
.....	dst.....
22.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS

22.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Program Komunitas Adat Terpencil
22.02.	Pelatihan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Cacat
22.03.	Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
22.05.	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
22.06.	Pelatihan Bagi Keluarga Miskin di Daerah Pebatasan
22.07.	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
22.08.	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
22.09.	Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni
.....	dst.....
23.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
23.04.	Mobilisasi dan Pendistribusian Bantuan Sosial
23.06.	Penyusunan Data Base PMKS
23.08.	Pembinaan PSM, Karang Taruna dan organisasi sosial
23.09.	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya - upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
23.10.	Pembinaan Operasional Organisasi Sosial
23.11.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, HUT Kemerdekaan RI & Hari Pahlawan Nasional dan Berkabung Daerah
23.12.	Pengiriman Pasien Cacat Mental ke Singkawang
23.13.	Pelayanan TKI Bermasalah
23.14.	Rehabilitasi Korban Bencana Alam dan Sosial
23.15.	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Anak Nasional
23.16.	Pelayanan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan
23.17.	Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni
23.18.	Pembangunan Rumah Singgah
23.19.	Pelayanan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan
23.20.	Rehabilitasi Gedung Bina Loka Karya (LBK) Pala Pulau
23.21.	Peningkatan SDM Bidang Ketenagakerjaan
.....	dst.....

C. KODE REKENING PENDAPATAN

Kode	Uraian	KETERANGAN
1	2	DIGIT
4.	PENDAPATAN	1 = Akun Pendapatan
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 = Kelompok Pendapatan
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	3 = Jenis Pendapatan
4.1.1.06.	Pajak Hotel	4 = Objek Pendapatan
4.1.1.06.01.	Hotel	5 = Rincian Objek Pendapatan
4.1.1.06.02.	Motel (Hotel Melati Dua)	
4.1.1.06.03.	Losmen	
4.1.1.06.04.	Gubuk Pariwisata	
4.1.1.06.05.	Wisma Pariwisata	
4.1.1.06.06.	Pesangrahan	
4.1.1.06.07.	Rumah Penginapan dan sejenisnya	
4.1.1.06.08.	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)	
4.1.1.06.09.	Dst	
4.1.1.07.	Pajak Restoran	
4.1.1.07.01.	Restoran	
4.1.1.07.02.	Rumah Makan	
4.1.1.07.03.	Kafetaria	
4.1.1.07.04.	Kantin	
4.1.1.07.05.	Warung	
4.1.1.07.06.	Bar	
4.1.1.07.07.	Jasa Boga/ Katering	
4.1.1.07.10.	Dst	
4.1.1.08.	Pajak Hiburan	
4.1.1.08.01.	Tontonan Film/Bioskop	
4.1.1.08.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	
4.1.1.08.03.	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya	
4.1.1.08.04.	Pameran	
4.1.1.08.05.	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya	
4.1.1.08.06.	Sirkus/Akrobat/Sulap	
4.1.1.08.07.	Permainan Bilyar, Golf, Bowling	
4.1.1.08.08.	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	
4.1.1.08.09.	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)	
4.1.1.08.10.	Pertandingan Olahraga	
4.1.1.08.11.	Dst	
4.1.1.09.	Pajak Reklame	
4.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	
4.1.1.09.02.	Reklame Kain	
4.1.1.09.03.	Reklame Melekat/Stiker	
4.1.1.09.04.	Reklame Selebaran	

4.1.1.09.05.	Reklame Berjalan	
4.1.1.09.06.	Reklame Udara	
4.1.1.09.07.	Reklame Apung	
4.1.1.09.08.	Reklame Suara	
4.1.1.09.09.	Reklame Film/Slide	
4.1.1.09.10.	Reklame Peragaan	
4.1.1.09.11.	Dst	
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	
4.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri (swasta)	
4.1.1.10.02.	Pajak Penerangan Jalan sumber la!n (PLN)	
4.1.1.10.03.	Pajak Penerangan Jalan sumber (Swasta)	
4.1.1.11.	Pajak Parkir	
4.1.1.11.01.	Pajak Parkir	
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah	
4.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah	
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.1.14.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	
4.1.1.14.01.	Asbes	
4.1.1.14.02.	Batu Tulis	
4.1.1.14.03.	Batu setengah permata	
4.1.1.14.04.	Batu Kapur	
4.1.1.14.05.	Batu Apung	
4.1.1.14.06.	Batu Permata	
4.1.1.14.07.	Bentonit	
4.1.1.14.08.	Dolomit	
4.1.1.14.09.	Feldspar	
4.1.1.14.10.	Garam Batu (Halite)	
4.1.1.14.11.	Grafit	
4.1.1.14.12.	Granit/Andesit	
4.1.1.14.13.	Gips	
4.1.1.14.14.	Kalsit	
4.1.1.14.15.	Kaolin	
4.1.1.14.16.	Leusit	
4.1.1.14.17.	Magnesit	
4.1.1.14.18.	Mika	
4.1.1.14.19.	Marmer	
4.1.1.14.20.	Nitrat	
4.1.1.14.21.	Opsidien	
4.1.1.14.22.	Oker	
4.1.1.14.23.	Batu/kerikil	
4.1.1.14.24.	Pasir Kuarsa	
4.1.1.14.25.	Perlit	
4.1.1.14.26.	Phospat	

4.1.1.14.27.	Talk	
4.1.1.14.28.	Tanah Serap (Fullers earth)	
4.1.1.14.29.	Tanah Diatome	
4.1.1.14.30.	Tanah Liat	
4.1.1.14.31.	Tawas (Alum)	
4.1.1.14.32.	Tras	
4.1.1.14.33.	Yarosif	
4.1.1.14.34.	Zeolit	
4.1.1.14.35.	Basal	
4.1.1.14.36.	Trakit	
4.1.1.14.37.	Mineral bukan logam dan lainnya	
4.1.1.14.38.	Pasir	
4.1.1.14.39.	Tanah Urug	
4.1.1.14.40	Dst	
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	
4.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
4.1.1.16.01.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
4.1.1.18.	Pajak Lingkungan	
4.1.1.18.01.	Pajak lingkungan	
4.1.1.19.	Pajak Air Bawah Tanah	
4.1.1.19.01.	Pajak Air Bawah tanah	
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	
4.1.2.01.02.	Puskesmas keliling	
4.1.2.01.03.	Puskesmas pembantu	
4.1.2.01.04.	Balai Pengobatan	
4.1.2.01.05.	Rumah Sakit Umum Daerah	
4.1.2.01.06.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau	
4.1.2.01.07.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
4.1.2.01.08	Dst	
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
4.1.2.02.01.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi	
4.1.2.02.02.	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan	
4.1.2.02.03.	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah	
4.1.2.02.04.	Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan	
4.1.2.02.07.	Retribusi.....	
4.1.2.03.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta	
4.1.2.03.01.	Kartu Tanda Penduduk	
4.1.2.03.02.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	
4.1.2.03.03.	Kartu Identitas Kerja	

4.1.2.03.04.	Kartu Penduduk Sementara	
4.1.2.03.05.	Kartu Identitas Penduduk Musiman	
4.1.2.03.06.	Kartu Keluarga	
4.1.2.03.07.	Akta Catatan Sipil	
4.1.2.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
4.1.2.04.01.	Pelayanan Penguburan/Pemakaman	
4.1.2.04.02.	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	
4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
4.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	
4.1.2.06.01.	Pelataran	
4.1.2.06.02.	Los	
4.1.2.06.03.	Kios	
4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
4.1.2.07.01.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	
4.1.2.07.02.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	
4.1.2.07.03.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	
4.1.2.07.04.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	
4.1.2.07.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	
4.1.2.07.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	
4.1.2.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	
4.1.2.07.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	
4.1.2.07.09.	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	
4.1.2.07.10.	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	
4.1.2.07.11.	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	
4.1.2.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
4.1.2.08.01.	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	
4.1.2.08.02.	Alat Penanggulangan Kebakaran	
4.1.2.08.03.	Alat Penyelamatan Jiwa	
4.1.2.09.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
4.1.2.09.01.	Penyediaan Peta Dasar (Garis)	
4.1.2.09.02.	Penyediaan Peta Foto	
4.1.2.09.03.	Penyediaan Peta Digital	
4.1.2.09.04.	Penyediaan Peta Tematik	
4.1.2.09.05.	Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	
4.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
4.1.2.10.01.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
4.1.2.11.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
4.1.2.11.01.	Rumah Tangga	
4.1.2.11.02.	Perkantoran	

4.1.2.11.03.	Industri	
4.1.2.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
4.1.2.12.01.	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya	
4.1.2.12.02.	Pengujian dalam keadaan terbungkus	
4.1.2.13.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
4.1.2.13.01.	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan	
4.1.2.13.02.	Pelatihan Teknis	
4.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
4.1.2.14.01.	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
4.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	
4.1.2.15.02.	Laboratorium	
4.1.2.15.03.	Ruangan -LRA	
4.1.2.15.04.	Kendaraan Bermotor	
4.1.2.15.05.	Pujasera	
4.1.2.15.07.	Sewa Kamar Tidur Perwakilan	
4.1.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	
4.1.2.16.01.	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang	
4.1.2.16.02.	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	
4.1.2.16.03.	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh	
4.1.2.16.04.	Kios Los	
4.1.2.17.	Retribusi Tempat Pelelangan	
4.1.2.17.01.	Pelelangan Ikan	
4.1.2.17.02.	Pelelangan Ternak	
4.1.2.17.03.	Pelelangan Hasil Bumi	
4.1.2.17.04.	Pelelangan Hasil Hutan	
4.1.2.17.05.	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat	
4.1.2.18.	Retribusi Terminal	
4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan	
4.1.2.18.02.	Tempat Kegiatan Usaha	
4.1.2.18.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	
4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4.1.2.19.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	
4.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	
4.1.2.20.01.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	
4.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan	
4.1.2.21.01.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	
4.1.2.21.02.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong	

4.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Pelabuhan	
4.1.2.22.01.	Retribusi Jasa ke Pelabuhan	
4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	
4.1.2.23.01.	Pelayanan Tempat Rekreasi	
4.1.2.23.02.	Pelayanan Tempat Pariwisata	
4.1.2.23.03.	Pelayanan Tempat Olahraga	
4.1.2.24.	Retribusi Penyeberangan Air	
4.1.2.24.01.	Pelayanan Penyeberangan Orang	
4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang	
4.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4.1.2.25.01.	Penjualan Hasil Produksi Usaha	
4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Suatu Bangunan	
4.1.2.27.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
4.1.2.27.01.	Pemberian Izin Untuk Melakukan Penjualan Minuman Beralkohol	
4.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan	
4.1.2.28.01.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	
4.1.2.28.02.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	
4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	
4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	
4.1.2.29.02.	Pemberian Izin Trayek kepada Badan	
4.1.2.29.03.	Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum (SIAU)	
4.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan	
4.1.2.30.01.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	
4.1.2.30.02.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	
4.1.2.31.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	
4.1.2.31.01.	Penggunaan ruas jalan tertentu	
4.1.2.31.02.	Penggunaan koridor tertentu -LRA	
4.1.2.31.03.	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan	
4.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
4.1.2.32.01.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja	
4.1.2.33.	Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu	
4.1.2.33.01.	Retribusi Hasil Hutan Bukan kayu	
4.1.2.34.	Retribusi Uji Material / Laboratorium	
4.1.2.34.01.	Retribusi Uji Material / laboratorium	
4.1.2.35.	Retribusi Administrasi Kapal	

4.1.2.35.01.	Retribusi Administrasi kapal	
4.1.2.36.	Retribusi Surat Izin Pertambangan Rakyat	
4.1.2.36.01.	Retribusi Surat Izin Pertambangan Rakyat (Sektor Pertambangan) / IUPE	
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik	
4.1.3.01.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah	
4.1.3.01.02.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN.....	
4.1.3.01.03.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar	
4.1.3.01.04.	Hasil Penempatan Dana di Bank Kalbar/Collection Fee Kredit	
4.1.3.02.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik	
4.1.3.02.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada BUMN	
4.1.3.02.02.	Dst	
4.1.3.03.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	
4.1.3.03.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Patungan	
4.1.3.03.02.	Dst	
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	
4.1.4.01.01.	Pelepasan Hak Atas Tanah	
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang Tidak Terpakai	
4.1.4.01.03.	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	
4.1.4.01.04.	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda dua	
4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	
4.1.4.01.07.	Penjualan Drum Bekas	
4.1.4.01.08.	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	
4.1.4.01.09.	Penjualan Lampu Hias Bekas	
4.1.4.01.10.	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	
4.1.4.01.11.	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas	
4.1.4.01.12.	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi	
4.1.4.01.13.	Penjualan Hasil Pertanian	
4.1.4.01.14.	Penjualan Hasil Kehutanan	
4.1.4.01.15.	Penjualan Hasil Perkebunan	
4.1.4.01.16.	Penjualan Hasil Peternakan	
4.1.4.01.17.	Penjualan Hasil Perikanan	
4.1.4.01.18.	Penjualan Hasil Sitaan	
4.1.4.01.19.	Hasil lelang atas perhitungan penaksiran dan penilaian sisa bangunan	
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Bendahara	
4.1.4.02.03.	Jasa Giro Dana Cadangan	
4.1.4.02.04.	Penerimaan Bunga Dana Bergulir Koperasi	
4.1.4.02.05.	Jasa Giro Pemegang Kas	
4.1.4.02.06.	Pendapatan Bunga JKN	

4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	
4.1.4.03.01.	Pendapatan Bunga Rekening Deposito Pada Bank Kalbar	
4.1.4.03.02.	Pendapatan Bunga Rekening Deposito Pada Bank	
4.1.4.03.03.	Dst.....	
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
4.1.4.04.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Uang Daerah	
4.1.4.04.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Barang Daerah	
4.1.4.05.	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
4.1.4.05.01.	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah	
4.1.4.05.02.	Penerimaan Potongan Hutang Gaji dari PT Taspen	
4.1.4.05.03.	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari.....	
4.1.4.05.04.	Dst.....	
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaa Pekerjaan	
4.1.4.06.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan	
4.1.4.06.02.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan	
4.1.4.06.03.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaa Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	
4.1.4.06.04.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat	
4.1.4.06.05.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang	
4.1.4.06.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan	
4.1.4.06.07.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan	
4.1.4.06.08.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup	
4.1.4.06.09.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan	
4.1.4.06.10.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendudukan dan catatan sipil	
4.1.4.06.11.	Pensdapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4.1.4.06.12.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
4.1.4.06.13.	Dst.....	
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak 1)	
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	

4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda pajak Rokok	
4.1.4.07.06.	Pendapatan Denda pajak Hotel	
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	
4.1.4.07.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	
4.1.4.07.10.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	
4.1.4.07.11.	Pendapatan Denda pajak Parkir	
4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	
4.1.4.07.13.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.4.07.14.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.4.07.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.4.07.16.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi 1)	
4.1.4.08.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4.1.4.08.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
4.1.4.08.03.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta	
4.1.4.08.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
4.1.4.08.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
4.1.4.08.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	
4.1.4.08.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
4.1.4.08.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat pemadaman Kebakaran	
4.1.4.08.09.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
4.1.4.08.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
4.1.4.08.11.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
4.1.4.08.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
4.1.4.08.13.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
4.1.4.08.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
4.1.4.08.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
4.1.4.08.16.	Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan	
4.1.4.08.17.	Retribusi Tempat Pelelangan	
4.1.4.08.18.	Retribusi Terminal	
4.1.4.08.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4.1.4.08.20.	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila	
4.1.4.08.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan	
4.1.4.08.22.	Retribusi Pelayanan Pelabuhan	
4.1.4.08.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	
4.1.4.08.24.	Retribusi Penyeberangan Air	
4.1.4.08.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4.1.4.08.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4.1.4.08.27.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol	
4.1.4.08.28.	Retribusi Izin Gangguan	
4.1.4.08.29.	Retribusi Izin Trayek	
4.1.4.08.30.	Retribusi Izin Perikanan	
4.1.4.08.31.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	
4.1.4.08.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
4.1.4.09.	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO	
4.1.4.09.01.	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO	

4.1.4.09.02.	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO	
4.1.4.09.03.	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO	
4.1.4.09.04.	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO	
4.1.4.10.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	
4.1.4.10.01.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda-LRA	
4.1.4.11.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
4.1.4.11.01.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.4.11.02.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame	
4.1.4.11.03.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas KTP Musiman	
4.1.4.11.04.	Dst.....	
4.1.4.12.	Pendapatan dari Pengembalian	
4.1.4.12.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	
4.1.4.12.02.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi	
4.1.4.12.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan	
4.1.4.12.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	
4.1.4.12.05.	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka	
4.1.4.12.06.	Dst.....	
4.1.4.13.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
4.1.4.13.01.	Fasilitas sosial	
4.1.4.13.02.	Fasilitas Umum	
4.1.4.13.03.	Dst.....	
4.1.4.14.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
4.1.4.14.01.	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk	
4.1.4.14.02.	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan	
4.1.4.14.03.	Uang Ujian Kenaikan tingkat/Kelas	
4.1.4.14.04.	Dst.....	
4.1.4.15.	Pendapatan	
4.1.4.15.01.	Pendapatan Lain-lain	
4.1.4.16.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah	
4.1.4.16.01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	
4.1.4.16.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	
4.1.4.17.	Pendapatan BLUD	
4.1.4.17.02.	Pendapatan Hibah BLUD	
4.1.4.17.03.	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	
4.1.4.17.04.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	
4.1.4.18.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	
4.1.4.18.01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	
4.1.4.18.02.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan	
4.1.4.18.03.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	
4.1.4.18.04.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	

4.1.4.19.	Pendapatan Zakat* - LO	
4.1.4.19.01.	Pendapatan Z4kat * - LO	
4.1.4.19.02.	Dst	
4.1.4.20.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
4.1.4.20.01.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Putussibau Utara	
4.1.4.20.02.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Putussibau Selatan	
4.1.4.20.03.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Bika	
4.1.4.20.04.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Kalis	
4.1.4.20.05.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Embaloh Hilir	
4.1.4.20.06.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Embaloh Hulu	
4.1.4.20.07.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Bunut Hilir	
4.1.4.20.08.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Boyan Tanjung	
4.1.4.20.09.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Bunut Hulu	
4.1.4.20.10.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Mentebah	
4.1.4.20.11.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Jongkong	
4.1.4.20.12.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Pengkadan	
4.1.4.20.13.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Hulu Gurung	
4.1.4.20.14.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Selimbau	
4.1.4.20.15.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Batang Lupar	
4.1.4.20.16.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Badau	
4.1.4.20.17.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Empanang	
4.1.4.20.18.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Puring Kencana	
4.1.4.20.19.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Semitau	
4.1.4.20.20.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Suhaid	
4.1.4.20.21.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Seberuang	
4.1.4.20.22.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Silat Hilir	
4.1.4.20.23.	Dana kapitasi JKN pada FKTP Silat Hulu	
4.1.4.21.	Hasil dari Pengelolaan dana Bergulir	
4.1.4.21.01.	Hasil dari Pengelolaan dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	
4.1.4.21.02.	Dst.....	
4.1.4.22.	Rekening Listrik Pasar	
4.1.4.22.01.	Rekening Listrik pasar	
4.2.	DANA PERIMBANGAN	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	
4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	
4.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib	
4.2.1.01.10	Bagi Hasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
4.2.1.02.01.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	

4.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	
4.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - Iuran Tetap	
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - Royalti	
4.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	
4.2.1.02.11.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus	
4.2.3.01.01.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	
4.2.3.01.02.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	
4.2.3.01.03.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	
4.2.3.01.04.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	
4.2.3.01.05.	DAK Bidang Keluarga Berencana	
4.2.3.01.06.	DAK Bidang Kehutanan	
4.2.3.01.07.	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
4.2.3.01.08.	DAK Bidang Kesehatan	
4.2.3.01.09.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	
4.2.3.01.10.	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan	
4.2.3.01.11.	DAK Bidang Transportasi Perdesaan	
4.2.3.01.12.	DAK Bidang Perdagangan	
4.2.3.01.13.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	
4.2.3.01.14.	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT)	
4.2.3.01.15.	DAK Bidang Pertanian	
4.2.3.01.16.	DAK Bidang Energi Pedesaan	
4.2.3.01.17.	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan	
4.2.3.01.18.	DAK Bidang Pendidikan	
4.2.3.01.19.	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	
4.2.3.01.20.	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	
4.2.3.01.21.	DAK Tambahan Afirmasi	
4.2.3.01.22.	DAK Tambahan P3K2 dan Usulan Daerah	
4.2.3.01.23.	DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD)	
4.2.3.01.24.	Dst.....	
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	
4.2.3.02.01.	DAK - Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	
4.2.3.02.02.	DAK - Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	
4.2.3.02.03.	DAK - Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	
4.2.3.02.04.	DAK - Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	
4.2.3.02.05.	DAK - Non Fisik Akreditasi Puskesmas	
4.2.3.02.06.	DAK - Non Fisik Jaminan Persalinan	
4.2.3.02.07.	DAK - Non Fisik Bantuan Operasional KB	

4.2.3.02.08.	Dst.....	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
4.3.1.01.01.	Hibah dari Pemerintah	
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
4.3.1.02.01.	Pemerintah Daerah	
4.3.1.02.02.	Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dari Provinsi	
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	
4.3.1.03.01.	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
4.3.1.03.02.	Dst	
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	
4.3.1.04.01.	Kelompok masyarakat/perorangan	
4.3.1.04.02.	Sumbangan Pihak ketiga	
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
4.3.1.05.01.	Pendapatan Hibah dari Bilateral	
4.3.1.05.02.	Pendapatan Hibah dari Multilateral	
4.3.1.05.03.	Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya	
4.3.1.05.04.	Dst.....	
4.3.2.	Dana Darurat	
4.3.2.01.	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
4.3.2.01.01.	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
4.3.2.01.02.	Dst	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air	
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.04.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.06.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	
4.3.3.01.09.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan / Air Bawah Tanah (PAP/ABT)	
4.3.3.02.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3)	
4.3.3.02.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
4.3.3.02.02.	Dst.....	
4.3.3.03.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3)	
4.3.3.03.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten.....	
4.3.3.03.02.	Dst.....	

4.3.3.04.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3)	
4.3.3.04.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota.....	
4.3.3.04.02.	Dst.....	
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
4.3.4.01.	Dana Otonomi Khusus	
4.3.4.01.01.	Dana Otonomi khusus	
4.3.4.01.02.	Dst.....	
4.3.4.02.	Dana penyesuaian	
4.3.4.02.01.	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	
4.3.4.02.02.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	
4.3.4.02.03.	Dana Insentif Daerah	
4.3.4.02.04.	Dana Desa	
4.3.4.02.05.	Dana Bantuan Operasional Sekolah	
4.3.4.02.06.	Dst.....	
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari provinsi	
4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Barat	
4.3.5.01.02.	Dst	
4.3.5.02.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
4.3.5.02.01.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
4.3.5.02.02.	Dst	
4.3.5.03.	Bantuan Keuangan dari Kota	
4.3.5.03.01.	Bantuan Keuangan dari Kota	
4.3.5.03.02.	Dst	
4.3.6.	Pendapatan Lainnya	
4.3.6.01.	Pendapatan Lainnya	
4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	
4.3.5.01.02.	Dst	

D. KODE REKENING BELANJA

KODE	URAIAN	KETERANGA
5.	BELANJA	DIGIT
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 = Akun Belanja
5.1.1.	Belanja Pegawai	2 = Kelompok Belanja
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3 = Jenis Belanja
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	4 = Objek Belanja
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	5 = Rincian Objek Belanja
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	
5.1.1.01.10.	Uang Paket	
5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	
5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	
5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas	
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	
5.1.1.01.19.	Iuran Wajib Pajak (IWP)	
5.1.1.01.20.	Tunjangan.....	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	
5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	
5.1.1.02.05.	Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD	
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	
5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif	
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	
5.1.1.03.01.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5.1.1.03.03.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	
5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.04.01.	Biaya pemungutan PBB	
5.1.1.04.02.	Biaya pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.04.03.	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	

5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan pajak daerah	
5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
5.1.1.05.03.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5.1.1.05.04.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan	
5.1.1.05.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok	
5.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	
5.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	
5.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	
5.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	
5.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	
5.1.1.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	
5.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	
5.1.1.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	
5.1.1.05.14.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
5.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan	
5.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi daerah	
5.1.1.06.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
5.1.1.06.03.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda	
5.1.1.06.04.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
5.1.1.06.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	
5.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	
5.1.1.06.08.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
5.1.1.06.09.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta	
5.1.1.06.10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
5.1.1.06.11.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair	
5.1.1.06.12.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	
5.1.1.06.13.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan	
5.1.1.06.14.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	
5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	
5.1.1.06.16.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	
5.1.1.06.17.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan	
5.1.1.06.18.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	
5.1.1.06.19.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	
5.1.1.06.20.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	
5.1.1.06.21.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	
5.1.1.06.22.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	
5.1.1.06.23.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	
5.1.1.06.24.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air	
5.1.1.06.25.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah	
5.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	
5.1.1.06.27.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
5.1.1.06.28.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	
5.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	
5.1.1.06.30.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan	
5.1.1.06.31.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas	

5.1.1.06.32.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
5.1.2.	Belanja Bunga	
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman	
5.1.2.01.01.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5.1.2.01.02.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5.1.2.01.03.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
5.1.2.01.04.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
5.1.2.01.05.	Bunga Utang Pinjaman Lainnya	
5.1.2.02.	Bunga Utang Obligasi	
5.1.2.02.01.	Bunga Utang Obligasi	
5.1.3.	Belanja Subsidi	
5.1.3.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
5.1.3.01.01.	Belanja Subsidi Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat	
5.1.3.01.02.	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah	
5.1.3.01.03.	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	
5.1.4.	Belanja Hibah	
5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
5.1.4.01.02.	Belanja Hibah kepada Politeknik Negeri Pontianak	
5.1.4.01.03.	Belanja Hibah Kepada TMMD	
5.1.4.01.04.	Belanja Hibah Kepada Fakultas Kedokteran UNTAN	
5.1.4.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya3)	
5.1.4.02.01.	Belanja Hibah Kepada Provinsi Pembangunan	
5.1.4.02.02.	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	
5.1.4.02.03.	Hibah kepada Pemerintah Kota	
5.1.4.03.	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa	
5.1.4.03.01.	Pemerintahan Desa...	
5.1.4.03.02.	Kecamatan	
5.1.4.03.03.	Kelurahan	
5.1.4.03.04.	RT	
5.1.4.04.	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4)	
5.1.4.04.01.	Perusahaan Daerah	
5.1.4.04.02.	Dst ...	
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
5.1.4.05.02.	Dst ...	
5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	
5.1.4.06.01.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	
5.1.4.06.02.	Dst.....	

5.1.4.07.	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan	
5.1.4.07.01.	Hibah Dana Bantuan Opreasional Sekolah	
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5.1.5.01.02.	dst.....	
5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	
5.1.5.02.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat	
5.1.5.02.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan	
5.1.5.03.02.	Dst.....	
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
5.1.6.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	
5.1.6.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	
5.1.6.01.02.	Dst...	
5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.04.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.05.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
5.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi....	
5.1.7.01.02.	Dst...	
5.1.7.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
5.1.7.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota....	
5.1.7.02.02.	Belanja Urusan Bersama (DDUB) PNPM-MP	
5.1.7.02.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kecamatan	
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari APBN	
5.1.7.03.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari APBD	
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya	

5.1.7.04.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ...	
5.1.7.04.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
5.1.7.04.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ...	
5.1.7.05.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan kepada Partai politik	
5.1.7.06.	Belanja Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan	
5.1.7.06.01.	Belanja Bantuan Keuangan Bidang pendidikan	
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	
5.2.1.	Belanja Pegawai	
5.2.1.01.	Honorarium PNS	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
5.2.1.01.03.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
5.2.1.01.04.	Honorarium pengelola keuangan	
5.2.1.01.05.	Honorarium penyelenggaraan pembinaan pendidikan	
5.2.1.01.06.	Honorarium petugas penagihan Pajak/retribusi	
5.2.1.01.07.	honorarium pendamping petani /pekebun	
5.2.1.01.08.	Honorarium Operator SSB dan Sandiman	
5.2.1.01.09.	Honorarium/Tunjangan Khusus Polisi Pamong Praja	
5.2.1.01.14.	Honorarium Tim Pokja	
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	
5.2.1.03.	Uang Lembur	
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	
5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	
5.2.1.04.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan dokumentasi	

5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Dekorasi	
5.2.2.01.11.	Belanja peralatan olah raga	
5.2.2.01.12.	Belanja buku keagamaan	
5.2.2.01.14.	Belanja peralatan pelatihan	
5.2.2.01.17.	Belanja bahan baku tenun	
5.2.2.01.18.	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	
5.2.2.01.19.	Dst.....	
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	
5.2.2.02.06.	Belanja bahan peralatan rumah tangga	
5.2.2.02.07.	Bahan bahan kebutuhan rumah tangga hari besar	
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan perlengkapan	
5.2.2.02.09.	Belanja bahan percontohan	
5.2.2.02.10.	Belanja peralatan budidaya perikanan	
5.2.2.02.11.	Belanja pakan ternak	
5.2.2.02.12.	Belanja bahan pameran	
5.2.2.02.13.	Belanja bahan pupuk	
5.2.2.02.14.	Belanja bahan makanan	
5.2.2.02.15.	Belanja pakan ikan	
5.2.2.02.16.	Belanja bahan dan peralatan pertanian / perkebunan	
5.2.2.02.17.	Belanja sarana dan prasarana perikanan tangkap	
5.2.2.02.18.	Belanja sarana dan prasarana pengolahan ikan	
5.2.2.02.19.	Belanja ikan	
5.2.2.02.20.	Belanja alat dan bahan ketrampilan	
5.2.2.02.21.	Belanja sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya	
5.2.2.02.22.	Belanja Sarana dan Prasarana Pengawasan Pengendalian	
5.2.2.02.23.	Belanja Pakan Hewan	
5.2.2.02.24.	Belanja Racun Tanaman	
5.2.2.02.25.	Belanja perlengkapan olahraga	
5.2.2.02.26.	Belanja piagam/Piala/Sertifikat/Uang Pembinaan	
5.2.2.02.27.	Belanja Bahan Saprodi	
5.2.2.02.28.	Belanja Bahan Penunjang	
5.2.2.02.29.	Belanja Piagam/Piala/sertifikat/uang pembinaan	
5.2.2.02.30.	Belanja bahan buku pelajaran	
5.2.2.02.31.	Belanja bahan baku	
5.2.2.02.32.	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	
5.2.2.02.33.	Belanja Bahan Peralatan Peternakan	
5.2.2.02.34.	Dst.....	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	
5.2.2.03.02.	Belanja air	
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	

5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/TV Kabel	
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	
5.2.2.03.10.	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
5.2.2.03.11.	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pemeriksaan kesehatan PNS	
5.2.2.03.13.	Belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan RT	
5.2.2.03.14.	Belanja jasa administrasi ketatausahaan sekolah	
5.2.2.03.15.	Belanja jasa pelayanan kemasyarakatan	
5.2.2.03.16.	Belanja jasa pelayanan dan jasa sarana	
5.2.2.03.17.	Belanja jasa kebersihan kantor	
5.2.2.03.18.	Belanja jasa sarana	
5.2.2.03.19.	Belanja kerjasama dengan pihak ketiga	
5.2.2.03.20.	Belanja jasa pelayanan kemasyarakatan	
5.2.2.03.21.	Belanja jasa administrasi pungutan PPH 21,25,29	
5.2.2.03.22.	Belanja jasa administrasi pungutan pajak daerah	
5.2.2.03.23.	Belanja jasa administrasi PBB	
5.2.2.03.24.	Belanja jasa administrasi pungutan retribusi daerah	
5.2.2.03.26.	Belanja jasa publikasi	
5.2.2.03.27.	Belanja jasa pemeriksaan sampel penyakit hewan	
5.2.2.03.28.	Belanja jasa pemeliharaan tugu	
5.2.2.03.29.	Belanja jasa penyusunan laporan	
5.2.2.03.30.	Belanja jasa perencanaan	
5.2.2.03.31.	Belanja jasa pemeliharaan lingkungan	
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Administrasi Pengurusan Perijinan	
5.2.2.03.34.	Belanja jasa perencanaan jembatan	
5.2.2.03.37.	Belanja jasa pemeriksaan	
5.2.2.03.38.	Belanja jasa kebersihan kantor	
5.2.2.03.39.	Belanja pemeriksaan komputer	
5.2.2.03.40.	Belanja jasa pelayanan kemasyarakatan	
5.2.2.03.41.	Belanja jasa administrasi ketatausahaan sekolah	
5.2.2.03.43.	Belanja jasa pihak ketiga	
5.2.2.03.44.	Belanja transportasi dan akomodasi	
5.2.2.03.45.	Belanja jasa administrasi pelayanan akta capil	
5.2.2.03.46.	Belanja operasional	
5.2.2.03.47.	Belanja pemeliharaan jaringan komputer	
5.2.2.03.48.	Belanja perbaikan AC,Kulkas,tape recorder	
5.2.2.03.49.	Belanja jasa pemeliharaan	
5.2.2.03.50.	Belanja jasa pemeliharaan kesehatan	
5.2.2.03.51.	Belanja jasa kepanitiaan	
5.2.2.03.52.	Belanja penyelesaian konflik pertanahan	
5.2.2.03.53.	Belanja Jasa Administrasi Pelayanan KTP/KK	
5.2.2.03.54.	Belanja jasa Dokumentasi / Dekorasi	
5.2.2.03.55.	Belanja Jasa Pembuatan Akta Pendirian	
5.2.2.03.56.	Dst.....	
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	

5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Askes Pegawai	
5.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Kebakaran	
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	
5.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	
5.2.2.05.07.	Belanja Balik Nama Kendaraan Bermotor	
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	
5.2.2.07.05.	Belanja sewa kamar hotel untuk pengajar	
5.2.2.07.06.	Belanja sewa kamar hotel	
5.2.2.07.07.	Belanja sewa penginapan peserta	
5.2.2.07.08.	Belanja Sewa Gedung / stand Pameran	
5.2.2.07.09.	Dst.....	
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	
5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	
5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator	
5.2.2.09.02.	Belanja sewa Buldoser	
5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Alat Balon Gas	
5.2.2.09.04.	Belanja Sewa Dump Truck	
5.2.2.09.05.	Dst.....	
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer	
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	

5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Theodolit / GPS dan Soil Tester	
5.2.2.10.08.	Belanja sewa sound sistem/OHP	
5.2.2.10.09.	Belanja sewa alat pelatihan	
5.2.2.10.10.	Belanja sewa perlengkapan pameran	
5.2.2.10.11.	Belanja sewa alat musik	
5.2.2.10.12.	Belanja sewa peralatan kantor	
5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Alat Studio	
5.2.2.10.14.	Dst.....	
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman tim	
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5.2.2.12.01.	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Dinas lapangan	
5.2.2.12.07.	Belanja pakaian Linmas / Hansip	
5.2.2.12.08.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	
5.2.2.12.09.	Belanja Pakaian Satpam	
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	
5.2.2.13.02.	Belanja pakaian kerja pelatihan	
5.2.2.13.03.	Belanja pakaian kerja tukang/pengrajin& budaya	
5.2.2.13.04.	Belanja pakaian kerja penyuluh pertanian dan perlengkapannya	
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	
5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI	
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	
5.2.2.14.05.	Belanja pakaian kaos kegiatan	
5.2.2.14.06.	Belanja pakaian KDH dan WKDH hari hari tertentu	
5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Pasien	
5.2.2.14.08.	Belanja pakaian dinas personil	
5.2.2.14.09.	Belanja Pakaian Pramuka	
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Dharma Wanita	
5.2.2.14.11.	Belanja Pakaian Paskibra	
5.2.2.14.12.	Belanja Pakaian Kerja Petugas Kebersihan	
5.2.2.14.13.	Dst.....	
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	

5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	
5.2.2.16.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
5.2.2.16.01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	
5.2.2.16.02.	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah	
5.2.2.17.	Belanja Pemulangan Pegawai	
5.2.2.17.01.	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah	
5.2.2.17.02.	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah	
5.2.2.17.03.	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	
5.2.2.18.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	
5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Drainase	
5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung	
5.2.2.18.05.	Belanja Pemeliharaan Jaringan listrik	
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	
5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	
5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
5.2.2.18.09.	Belanja Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga	
5.2.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan	
5.2.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Lingkungan	
5.2.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat alat Bengkel	
5.2.2.18.13.	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	
5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	
5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	
5.2.2.18.16.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	
5.2.2.18.17.	Belanja pemeliharaan jaringan	
5.2.2.18.18.	Belanja Pemeliharaan/ Penataan Lahan	
5.2.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	
5.2.2.18.20.	Belanja pemeliharaan cagar budaya	
5.2.2.18.21.	Belanja Pemeliharaan Objek Wisata	
5.2.2.18.22.	Belanja pemeliharaan ruangan kantor	
5.2.2.18.23.	Belanja Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	
5.2.2.18.24.	Belanja Pemeliharaan Infrastruktur	
5.2.2.18.25.	Dst.....	
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	
5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	
5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	
5.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	
5.2.2.19.04.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi	
5.2.2.19.05.	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal	
5.2.2.19.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	

5.2.2.20.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga / Pemerintah / Pemerintah Daerah lain	
5.2.2.20.01.	Pengadaan Buku Pelajaran / Perpustakaan	
5.2.2.20.02.	Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktek sekolah	
5.2.2.20.03.	Pengadaan Alat-alat kesehatan	
5.2.2.20.04.	Pengadaan Alat-alat laboratorium	
5.2.2.20.05.	Pengadaan alat-alat kedokteran	
5.2.2.20.06.	Pengadaan bahan kimia	
5.2.2.20.07.	Pengadaan obat dan bahan medis	
5.2.2.20.08.	Pengadaan alat-alat olahraga	
5.2.2.20.09.	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	
5.2.2.20.10.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	
5.2.2.20.11.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	
5.2.2.20.12.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	
5.2.2.20.13.	Pengadaan barang-barang seni dan budaya	
5.2.2.20.14.	Pengadaan Barang-barang bernilai sejarah	
5.2.2.20.15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Kebudayaan	
5.2.2.20.16.	Pengadaan Sarana dan Parasarana Air Bersih	
5.2.2.20.17.	Pengadaan Alat-alat angkutan darat/sungai	
5.2.2.20.18.	Pengadaan alat-alat bengkel dan keterampilan	
5.2.2.20.19.	Pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	
5.2.2.20.20.	Pengadaan Jalan	
5.2.2.20.21.	Pengadaan Jembatan	
5.2.2.20.22.	Pengadaan Jaringan	
5.2.2.20.23.	Pengadaan Instalasi	
5.2.2.20.24.	Pengadaan Alat-alat berat	
5.2.2.20.25.	Pengadaan Konstruksi / Bangunan	
5.2.2.20.26.	Pengadaan Tamanan / Bibit Tanaman	
5.2.2.20.27.	Pengadaan Pupuk	
5.2.2.20.28.	Pengadaan Obat-obatan Pertanian / Perkebunan / Kehutanan	
5.2.2.20.29.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pertanian/perkebunan/kehutanan	
5.2.2.20.30.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan/Kehutanan	
5.2.2.20.31.	Pengadaan Hewan Ternak/Bibit Ternak	
5.2.2.20.32.	Pengadaan Pakan Ternak	
5.2.2.20.33.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Peternakan	
5.2.2.20.34.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan	
5.2.2.20.35.	Pengadaan Obat-obatan Peternakan	
5.2.2.20.36.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Energi dan SDM	
5.2.2.20.37.	Pengadaan Ikan / Bibit Ikan	
5.2.2.20.38.	Pengadaan Pakan Ikan	
5.2.2.20.39.	Pengadaan Obat-obatan Perikanan	
5.2.2.20.40.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kelautan dan Perikanan	
5.2.2.20.41.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	
5.2.2.20.42.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perindustrian dan Perdagangan	
5.2.2.20.43.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
5.2.2.20.44.	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kewirausahaan	
5.2.2.20.45.	Pengadaan Bahan Bangunan	
5.2.2.20.46.	Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman	
5.2.2.20.47.	Belanja Kompensasi bangunan dan Tanam Tumbuh	

5.2.2.20.48.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	
5.2.2.20.49.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesenian	
5.2.2.20.50.	Belanja Pengadaan Kelengkapan Pilkades	
5.2.2.20.51.	Dst.....	
5.2.2.21.	Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga	
5.2.2.21.01.	Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat	
5.2.2.21.02.	Belanja Barang yang akan dijual kepada pihak ketiga	
5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	
5.2.2.22.01.	Belanja Pegawai BLUD	
5.2.2.22.02.	Belanja Barang dan Jasa blud	
5.2.2.23.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5.2.2.23.01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3	
5.2.2.23.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	
5.2.2.23.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	
5.2.2.23.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3	
5.2.2.23.05.	Belanja Beasiswa tugas belajar STPDN	
5.2.2.23.06.	Belanja beasiswa tugas belajar D-1 pada STAN	
5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	
5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	
5.2.2.24.02.	Belanja sosialisasi	
5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	
5.2.2.24.04.	Belanja Kepersertaan	
5.2.2.24.06.	Belanja Lokakarya	
5.2.2.25.	Belanja jasa PNSD dan Non PNSD	
5.2.2.25.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	
5.2.2.25.02.	Belanja Jasa Moderator / Pendamping Pengajar	
5.2.2.25.03.	Belanja Jasa Tenaga Kerja / Upah Pekerja	
5.2.2.25.04.	Belanja Jasa Kepanitiaan	
5.2.2.25.05.	Uang Saku Peserta	
5.2.2.25.06.	Belanja Jasa Penulisan Makalah / Naskah / Laporan	
5.2.2.25.07.	Belanja Jasa Kuasa Hukum	
5.2.2.25.08.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Notulen/Pembaca Doa	
5.2.2.25.09.	Belanja Jasa Operator	
5.2.2.25.10.	Belanja Jasa Dirijen/Rohaniawan	
5.2.2.25.11.	Belanja Jasa Pengamanan	
5.2.2.25.12.	Belanja Jasa Tim Pembinaan Kemasyarakatan	
5.2.2.25.13.	Belanja Jasa Tim Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	
5.2.2.25.14.	Dst.....	
5.2.2.26.	Belanja Hadiah / Prestasi	
5.2.2.26.01.	Belanja Hadiah atas Prestasi	
5.2.2.26.02.	Belanja Hadiah atas Penghargaan	
5.2.2.26.03.	Belanja Pembinaan	

5.2.2.27.	Belanja Barang Dana BOS	
5.2.2.27.01.	Belanja Barang dana BOS	
5.2.3.	Belanja Modal	
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan tanah Perkampungan	
5.2.3.01.02.	Belanja modal Pengadaan tanah Pertanian	
5.2.3.01.03.	Belanja modal Pengadaan tanah Perkebunan	
5.2.3.01.04.	Belanja modal Pengadaan tanah Kebun Campuran	
5.2.3.01.05.	Belanja modal Pengadaan tanah Hutan	
5.2.3.01.06.	Belanja modal Pengadaan tanah Tanah Kolam Ikan	
5.2.3.01.07.	Belanja modal Pengadaan tanah Danau/rawa	
5.2.3.01.08.	Belanja modal Pengadaan tanah Tandus/rusak	
5.2.3.01.09.	Belanja modal Pengadaan tanah alang-alang dan padang rumput	
5.2.3.01.10.	Belanja modal Pengadaan tanah penguna	
5.2.3.01.11.	Belanja modal Pengadaan tanah untuk bangunan gedung	
5.2.3.01.12.	Belanja modal Pengadaan tanah untuk Pertambangan	
5.2.3.01.13.	Belanja modal Pengadaan tanah untuk bagunan bukan gedung	
5.2.3.01.14.	Belanja modal Pengadaan tanah BLUD	
5.2.3.01.15.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis	
5.2.3.01.16.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan	
5.2.3.01.17.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan	
5.2.3.01.18.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar	
5.2.3.01.19.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	
5.2.3.01.20.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman	
5.2.3.01.21.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat	
5.2.3.01.22.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah	
5.2.3.01.23.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga	
5.2.3.01.24.	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan	
5.2.3.01.25.	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian	
5.2.3.01.26.	Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan	
5.2.3.01.27.	Belanja modal Pengadaan tanah perikanan	
5.2.3.01.28.	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan	
5.2.3.01.29.	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan	
5.2.3.01.30.	Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku	
5.2.3.01.31.	Belanja modal Pengadaan tanah sentra industri	
5.2.3.01.32.	Belanja modal Pengadaan tanah fasilitas militer	
5.2.3.01.33.	Belanja modal Pengadaan tanah perhotelan/wisma/losmen/cottage	
5.2.3.01.34.	Belanja modal Pengadaan tanah asrama	
5.2.3.01.35.	Belanja modal Pengadaan tanah lokasi pengolahan briket	
5.2.3.01.36.	Belanja modal Pengadaan tanah untuk kawasan industri	
5.2.3.01.37.	Belanja modal Pengadaan tanah asrama	
5.2.3.01.38.	Belanja modal Pengadaan tanah untuk sarana umum	
5.2.3.01.39.	Belanja Modal Penghijauan/reboisasi/pemagaran hutan kota	
5.2.3.01.40.	Belanja modal pengadaan tanah untuk fasilitas umum	
5.2.3.01.41.	Belanja Modal Ganti Rugi Penyelesaian Konflik Tanah	
5.2.3.01.42.	Dst.....	
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	

5.2.3.02.01.	Belanja modal Pengadaan traktor	
5.2.3.02.02.	Belanja modal Pengadaan Grader	
5.2.3.02.03.	Belanja modal Pengadaan Excavator	
5.2.3.02.04.	Belanja modal Pengadaan Pile Driver	
5.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan Hauler	
5.2.3.02.06.	Belanja modal Pengadaan Asphalt Equipment	
5.2.3.02.07.	Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment	
5.2.3.02.08.	Belanja modal Pengadaan Aggregate Concrete Equipment	
5.2.3.02.09.	Belanja modal Pengadaan Loader	
5.2.3.02.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat	
5.2.3.02.11.	Belanja modal Pengadaan mesin Proses	
5.2.3.02.12.	Belanja Modal Dredger	
5.2.3.02.13.	Belanja Modal Floating Excavator	
5.2.3.02.14.	Belanja Modal Amphibi Dredger	
5.2.3.02.15.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Tarik	
5.2.3.02.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses agung	
5.2.3.02.17.	Belanja Modal Alat Penarik	
5.2.3.02.18.	Belanja Modal Feeder	
5.2.3.02.19.	Belanja Modal Compressor	
5.2.3.02.20.	Belanja Modal Electric Generating Set	
5.2.3.02.21.	Belanja Modal Pompa	
5.2.3.02.22.	Belanja Modal Mesin Bor	
5.2.3.02.23.	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	
5.2.3.02.24.	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	
5.2.3.02.25.	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	
5.2.3.02.26.	Belanja Modal Pengadaan Tandem Roller	
5.2.3.02.27.	Belanja Modal Mesin Pengolah Semen	
5.2.3.02.28.	Belanja Modal Pengadaan Chainsaw	
5.2.3.02.29.	Belanja Modal Pengadaan Stamper	
5.2.3.02.30.	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	
5.2.3.02.31.	Dst.....	
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
5.2.3.03.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	
5.2.3.03.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	
5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	
5.2.3.03.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	
5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	
5.2.3.03.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	
5.2.3.03.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	
5.2.3.03.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	
5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	
5.2.3.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	
5.2.3.03.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	
5.2.3.03.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	
5.2.3.03.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan	
5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor kompektor	
5.2.3.03.16.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance	

5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Mobil KIR Keliling	
5.2.3.03.18.	Dst.....	
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	
5.2.3.04.02.	Belanja modal Pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong	
5.2.3.04.03.	Belanja modal Pengadaan becak	
5.2.3.04.04.	Belanja modal Pengadaan sepeda	
5.2.3.04.05.	Belanja modal Pengadaan karavan	
5.2.3.04.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan sampah	
5.2.3.04.07.	Belanja modal pengadaan kontainer	
5.2.3.04.08.	Dst.....	
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	
5.2.3.05.01.	Belanja modal Pengadaan kapal motor	
5.2.3.05.02.	Belanja modal Pengadaan kapal feri	
5.2.3.05.03.	Belanja modal Pengadaan speed boat	
5.2.3.05.04.	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel	
5.2.3.05.05.	Belanja modal Pengadaan hydro foil	
5.2.3.05.06.	Belanja modal Pengadaan jet foil	
5.2.3.05.07.	Belanja modal Pengadaan kapal tug boat	
5.2.3.05.08.	Belanja modal Pengadaan kapal tanker	
5.2.3.05.09.	Belanja modal Pengadaan kapal kargo	
5.2.3.05.10.	Belanja Modal Pengadaan Bodi Speed Boat	
5.2.3.05.11.	Dst.....	
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	
5.2.3.06.01.	Belanja modal Pengadaan perahu layar	
5.2.3.06.02.	Belanja modal Pengadaan perahu sampan	
5.2.3.06.03.	Belanja modal Pengadaan perahu tongkang	
5.2.3.06.04.	Belanja modal Pengadaan perahu karet	
5.2.3.06.05.	Belanja modal Pengadaan perahu rakit	
5.2.3.06.06.	Belanja modal Pengadaan perahu sekoci	
5.2.3.06.07.	Belanja Modal Pengadaan Kano Double	
5.2.3.06.08.	Belanja Modaol Pengadaan Hand Boat	
5.2.3.06.09.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Piber Glass	
5.2.3.06.10.	Dst.....	
5.2.3.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
5.2.3.07.01.	Belanja modal Pengadaan pesawat kargo	
5.2.3.07.02.	Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang	
5.2.3.07.03.	Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter	
5.2.3.07.04.	Belanja modal pesawat pemadam kebakaran	
5.2.3.07.05.	Belanja modal Pengadaan pesawat capung	
5.2.3.07.06.	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi	
5.2.3.07.07.	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang	
5.2.3.07.08.	Dst.....	
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	

5.2.3.08.01.	Belanja modal Pengadaan mesin las	
5.2.3.08.02.	Belanja modal Pengadaan mesin bubut	
5.2.3.08.03.	Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak	
5.2.3.08.04.	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	
5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pres Papan	
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Perbengkelan	
5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan pertukangan furniture	
5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan mesin pengolah sampah	
5.2.3.08.09.	Belanja modal pengadaan alat bantu kerja	
5.2.3.08.10.	Belanja modal pengadaan gergaji mesin	
5.2.3.08.11.	Belanja modal pengadaan kualii pemasak aspal	
5.2.3.08.12.	Belanja Modal Pengadaan Travo Las Listrik	
5.2.3.08.13.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Peralatan Uji Kendaraan	
5.2.3.08.14.	Dst.....	
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
5.2.3.09.01.	Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian	
5.2.3.09.02.	Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah	
5.2.3.09.03.	Belanja modal Pengadaan mesin bajak	
5.2.3.09.04.	Belanja modal Pengadaan alat penetas	
5.2.3.09.05.	Belanja modal Pengadaan alat pertanian	
5.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan perlengkapan peternakan	
5.2.3.09.07.	Belanja Modal Pengadaan kandang Ternak	
5.2.3.09.08.	Belanja Modal Alat Budi Daya dan Pasca Panen	
5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan peralatan perikanan	
5.2.3.09.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengering Centrifugar	
5.2.3.09.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian	
5.2.3.09.12.	Belanja Modal Pengadaan Chainsaw	
5.2.3.09.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Buah-buahan	
5.2.3.09.14.	Belanja Modal Pengadaan Pembuatan Pupuk Kompos	
5.2.3.09.15.	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	
5.2.3.09.16.	Belanja Modal Pengadaan Power Treser	
5.2.3.09.17.	Dst.....	
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	
5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	
5.2.3.10.03.	Belanja modal Pengadaan mesin stensil	
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	
5.2.3.10.05.	Belanja modal Pengadaan mesin cetak	
5.2.3.10.06.	Belanja modal Pengadaan mesin jilid	
5.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas	
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	
5.2.3.10.09.	Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik	
5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	
5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan Mesin Rumput	
5.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaan mesin penyedot air	
5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan mesin laminating	

5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan penyedot asap	
5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan mesin pemotong	
5.2.3.10.17.	Belanja modal pengadaan kotak lelang	
5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan Generator	
5.2.3.10.19.	Belanja modal Pengadaan trolly Dorong	
5.2.3.10.20.	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	
5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peringatan Otomatis	
5.2.3.10.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot	
5.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Rolling Screen Banner	
5.2.3.10.24.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Oksigen	
5.2.3.10.25	Belanja Modal Pengadaan Mesin SHS / Tenaga Surya	
5.2.3.10.26.	Dst.....	
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	
5.2.3.11.01.	Belanja modal Pengadaan meja gambar	
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	
5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	
5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	
5.2.3.11.06.	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu	
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	
5.2.3.11.09.	Belanja modal pengadaan solarcell	
5.2.3.11.10.	Belanja modal pengadaan gorden jendela	
5.2.3.11.11.	Belanja modal pengadaan genset	
5.2.3.11.12.	Belanja modal pengadaan bendera	
5.2.3.11.13.	Belanja modal pengadaan umbul - umbul	
5.2.3.11.14.	Belanja modal pengadaan plakat daerah	
5.2.3.11.15.	Belanja modal pengadaan tenda	
5.2.3.11.16.	Belanja pengadaan peralatan P3K	
5.2.3.11.17.	Belanja modal pengadaan vacum cleaner / penyedot debu	
5.2.3.11.18.	Belanja modal pengadaan Teralis	
5.2.3.11.19.	Belanja modal pengadaan papan nama	
5.2.3.11.20.	Belanja modal pengadaan tangga panjat	
5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Perporasi	
5.2.3.11.22	Belanja Modal Pengadaan Boxfun	
5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	
5.2.3.11.24.	Belanja modal pengadaan perlengkapan kepariwisataan	
5.2.3.11.25.	Belanja Modal Pengadaan Rak Obat	
5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	
5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan	
5.2.3.11.28.	Belanja Modal Pengadaan Display Informasi	
5.2.3.11.29.	Belanja Modal Pengadaan Cold Chain	
5.2.3.11.30.	Dst.....	
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	

5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	
5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	
5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU	
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Modem Internet Mobile	
5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	
5.2.3.12.13.	Belanja Modal Perangkat Lunak Database	
5.2.3.12.14.	Belanja Modal Perangkat Lunak Antivirus dan Keamanan	
5.2.3.12.15.	Belanja Modal Perangkat Lunak Perkantoran	
5.2.3.12.16.	Belanja Modal Perangkat Lunak Multimedia	
5.2.3.12.17.	Belanja Modal Perangkat Lunak Utilitas	
5.2.3.12.18.	Belanja Modal Pengadaan Software	
5.2.3.12.19.	Belanja Modal Pengadaan Plotter	
5.2.3.12.20.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Digital Society	
5.2.3.12.21.	Belanja Modal Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	
5.2.3.12.22.	Belanja Modal Pengadaan Mikro Tik	
5.2.3.12.23.	Dst.....	
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	
5.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja makan	
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	
5.2.3.13.06.	Belanja modal Pengadaan kursi makan	
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	
5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	
5.2.3.13.10.	Belanja modal Pengadaan kursi sekolah	
5.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan meja sekolah	
5.2.3.13.12.	Belanja modal Pengadaan kursi tamu	
5.2.3.13.13.	Belanja modal Pengadaan meja tamu	
5.2.3.13.14.	Belanja modal Pengadaan papan tulis/white board	
5.2.3.13.15.	Belanja modal pengadaan meubelair	
5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip	
5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja Aula	
5.2.3.13.18.	Belanja Modal pengadaan Kursi Aula	
5.2.3.13.19.	Belanja modal pengadaan podium rapat	
5.2.3.13.20.	Belanja modal pengadaan Rak Jemuran	
5.2.3.13.21.	Belanja modal pengadaan buffet kaca	
5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah	
5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kamar	
5.2.3.13.24.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kamar	
5.2.3.12.25.	Dst.....	

5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	
5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	
5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	
5.2.3.14.03.	Belanja modal Pengadaan lemari makan	
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	
5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	
5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring	
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	
5.2.3.14.08.	Belanja modal Pengadaan wastafel	
5.2.3.14.09.	Belanja modal pengadaan tong air	
5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	
5.2.3.14.11.	Belanja modal pengadaan baskom	
5.2.3.14.14.	Belanja modal pengadaan vacum cleaner	
5.2.3.14.15.	Belanja Modal pengadaan Kompor Biasa	
5.2.3.14.16.	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	
5.2.3.14.17.	Belanja modal pengadaan Rice Cooker	
5.2.3.14.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih Air	
5.2.3.14.19.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kompor	
5.2.3.14.20.	Dst.....	
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias	
5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	
5.2.3.15.03.	Belanja modal pengadaan karpet tebal	
5.2.3.15.04.	Belanja modal pengadaan kasur/sarung bantal/selimut/spray/bantal	
5.2.3.15.05.	Belanja modal pengadaan gorden,plastik/ventilasi/kawat nyamuk	
5.2.3.15.06.	Belanja modal pengadaan mesin cuci	
5.2.3.15.07.	belanja modal pengadaan vacum cleaner	
5.2.3.15.08.	belanja modal pengadaan cermin	
5.2.3.15.09.	Belanja modal pengadaan taplak meja	
5.2.3.15.10.	Belanja modal pengadaan benda ukiran	
5.2.3.15.11.	Belanja modal pengadaan akuarium	
5.2.3.15.12.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan / Foto	
5.2.3.15.13.	Belanja modal pengadaan Penghias Ruangan RT	
5.2.3.15.14.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian	
5.2.3.15.15.	Belanja Modal Pengadaan Meja Hias	
5.2.3.15.16.	Belanja Modal Pengadaan Sajadah	
5.2.3.15.17.	Belanja Modal Pengadaan Hanger Baju	
5.2.3.15.18.	Dst.....	
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	
5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan televisi	
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan tape recorder/VCD player/DVD player	
5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan microphone/wireless/pengeras suara	
5.2.3.16.07.	Belanja modal Pengadaan sound system	
5.2.3.16.08.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	

5.2.3.16.09.	Belanja modal pengadaan mikrophone	
5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	
5.2.3.16.11.	Belanja modal pengadaan parabola	
5.2.3.16.12.	Belanja modal pengadaan wireless	
5.2.3.16.13.	Belanja modal pengadaan alat penyiaran radio	
5.2.3.16.14.	Belanja modal pengadaan speaker	
5.2.3.16.15.	Belanja Modal Pengadaan Airphone	
5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Mobile Enrollment	
5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Kamera	
5.2.3.16.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	
5.2.3.16.19.	Belanja Modal Pengadaan Perekam Suara	
5.2.3.16.20.	Belanja Modal Pengadaan Exciter	
5.2.3.16.21.	Dst.....	
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon	
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	
5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan radio SSB	
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHF	
5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan radio UHF	
5.2.3.17.07.	Belanja modal Pengadaan alat sandi	
5.2.3.17.08.	Belanja modal Pengadaan megaphone	
5.2.3.17.09.	Belanja modal Pengadaan wireless	
5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan radio monitor digital	
5.2.3.17.11.	Belanja Modal Pengadaan kofreen system	
5.2.3.17.12.	belanja modal pengadaan alat alat komunikasi penyiaran radio	
5.2.3.17.13.	Belanja modal pengadaan mic confren bosh	
5.2.3.17.14.	Belanja Modal Pengadaan jaringan / saluran internet	
5.2.3.17.15.	Belanja modal pengadaan antena radio	
5.2.3.17.16.	Belanja modal pengadaan TDA 200	
5.2.3.17.17.	Belanja Modal Pengadaan Cestener	
5.2.3.17.18.	Belanja Modal Pengadaan Antena Radio	
5.2.3.17.19.	Belanja modal pengadaan Interkom	
5.2.3.17.20.	Belanja modal alat-alat komunikasi radio	
5.2.3.17.21.	Dst.....	
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan timbangan	
5.2.3.18.02.	Belanja modal Pengadaan teodolite	
5.2.3.18.03.	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi	
5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	
5.2.3.18.05.	Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi	
5.2.3.18.06.	Belanja modal Pengadaan bejana ukur	
5.2.3.18.07.	Belanja modal Pengadaan barometer	
5.2.3.18.08.	Belanja modal Pengadaan seismograph	
5.2.3.18.09.	Belanja modal Pengadaan ultrasonograph	
5.2.3.18.10.	Belanja modal Pengadaan termometer	
5.2.3.18.11.	Belanja modal pengadaan alat Ukur bibit kehutanan	

5.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan alat ukur meteran	
5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Water Current Meter	
5.2.3.18.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Kualitas Air	
5.2.3.18.15.	Belanja Modal Pengadaan Hammer Test Concrete	
5.2.3.18.16.	Belanja Modal Pengadaan Peta	
5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Bor Geologi	
5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Ukur	
5.2.3.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur DCP	
5.2.3.18.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Sand Cone	
5.2.3.18.21.	Belanja Modal Pengadaan Distometer	
5.2.3.18.22.	Belanja Modal Pengadaan Manometer	
5.2.3.18.23.	Belanja Modal Pengadaan Haga meter	
5.2.3.18.24.	Belanja Modal Pengadaan Alat Speedy Moisture Tester	
5.2.3.18.25.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laser Distance Meter	
5.2.3.18.26.	Belanja Modal Pengadaan Alat Survey Air Tanah	
5.2.3.18.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Tes Slump	
5.2.3.18.28.	Belanja Modal Pengadaan Abney Meter Seco	
5.2.3.18.29.	Belanja Modal Pengadaan Vector Optik Rover	
5.2.3.18.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Praktek	
5.2.3.18.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Altimeter	
5.2.3.18.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat PUTS	
5.2.3.18.33.	Dst.....	
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	
5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	
5.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	
5.2.3.19.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT	
5.2.3.19.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata	
5.2.3.19.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah	
5.2.3.19.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak	
5.2.3.19.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	
5.2.3.19.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin	
5.2.3.19.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi	
5.2.3.19.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi	
5.2.3.19.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi	
5.2.3.19.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan	
5.2.3.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	
5.2.3.19.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis	
5.2.3.19.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pelayanan KB	
5.2.3.19.18.	Belanja Modal Pengadaan Cold Box Vaksin	
5.2.3.19.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran BDRS/UTD	
5.2.3.19.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran IGD Rumah Sakit	
5.2.3.19.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran ICU Rumah Sakit	
5.2.3.19.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Rumah Sakit Siap Ponek	
5.2.3.19.23.	Belanja Modal Pengadaan TT kelas 3 Rumah Sakit	
5.2.3.19.24.	Dst.....	
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	
5.2.3.20.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	

5.2.3.20.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	
5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	
5.2.3.20.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian	
5.2.3.20.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	
5.2.3.20.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan	
5.2.3.20.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	
5.2.3.20.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	
5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	
5.2.3.20.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat Keselamatan	
5.2.3.20.11.	Belanja modal pengadaan alat lab lingkungan	
5.2.3.20.12.	Belanja modal pengadaan alat lab kesehatan	
5.2.3.20.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laporatorium IPA	
5.2.3.20.14.	Belanja Modal Pengadaan Cerobong Uap	
5.2.3.20.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Matematika	
5.2.3.20.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium IPS	
5.2.3.20.17.	Belanja Modal Pengadaan Teknologi Informasi Komunikasi dan Multimedia Interaktif SD	
5.2.3.20.18.	Belanja Modal Perlengkapan Penunjang Laboratorium	
5.2.3.20.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Suling Gaharu	
5.2.3.20.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyuntikan Gaharu	
5.2.3.20.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Laboratorium Kebinamargaan	
5.2.3.20.22.	Dst.....	
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	
5.2.3.21.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over	
5.2.3.21.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass	
5.2.3.21.04.	Belanja modal Pemeliharaan jalan	
5.2.3.21.05.	Belanja modal peningkatan jalan	
5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Gertak Kayu	
5.2.3.21.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Usaha Tani	
5.2.3.21.08.	Dst.....	
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
5.2.3.22.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung	
5.2.3.22.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton	
5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	
5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	
5.2.3.22.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pondasi abutment jembatan	
5.2.3.22.06.	Belanja modal pengadaan konstruksi abutment jembatan	
5.2.3.22.07.	Belanaj modal pengadaan konstruksi jembatan kayu	
5.2.3.22.08.	Belanja Modal Pengadaan kostruksi Jembatan Usaha Tani	
5.2.3.22.09.	Dst.....	
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	
5.2.3.23.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan	
5.2.3.23.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk	
5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	
5.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah	
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	

5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	
5.2.3.23.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir	
5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	
5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan konstruksi drainase	
5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan konstruksi dinding penahan tebing	
5.2.3.23.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Peningkatan Drainase	
5.2.3.23.13.	Belanja modal pembangunan penataan sawah	
5.2.3.23.14.	Belanja modal pengadaan konstruksi embung	
5.2.3.23.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kolam dan Saluran air	
5.2.3.23.16.	Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air	
5.2.3.23.17.	Belanja Modal Pengadaan Sumur dan pompa air	
5.2.3.23.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Drainase	
5.2.3.23.19.	Dst.....	
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan	
5.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	
5.2.3.24.03.	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota	
5.2.3.24.04.	Belanja modal Pengadaan penerangan jalan umum	
5.2.3.24.05.	Belanja modal peralatan kebersihan kota	
5.2.3.24.06.	Belanja modal taman kota	
5.2.3.24.07.	Belanja Modal Pengadaan Taman Hijau	
5.2.3.24.08.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	
5.2.3.24.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora	
5.2.3.24.11.	Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	
5.2.3.24.12.	Belanja modal Pengadaan Takaran Kering	
5.2.3.24.13.	Belanja modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL	
5.2.3.24.14.	Belanja modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu	
5.2.3.24.15.	Belanja modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas	
5.2.3.24.16.	Dst.....	
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	
5.2.3.25.02.	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	
5.2.3.25.03.	Belanja modal instalasi genset	
5.2.3.25.04.	Belanja Jaringan Listrik	
5.2.3.25.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	
5.2.3.25.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Processing	
5.2.3.25.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen	
5.2.3.25.08.	Belanja modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan	
5.2.3.25.09.	Dst.....	
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	
5.2.3.26.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	
5.2.3.26.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	
5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	
5.2.3.26.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah	

5.2.3.26.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	
5.2.3.26.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan	
5.2.3.26.08.	Belanja modal bangunan tempat sampah permanen	
5.2.3.26.09.	Belanja modal Penataan / peningkatan lokasi TPA	
5.2.3.26.10.	Belanja modal Pembangunan sarana pertamanan	
5.2.3.26.11.	Belanja modal Pembangunan Terminal	
5.2.3.26.12.	Belanja modal Pengadaan rumah semi permanen	
5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan fasilitas umum	
5.2.3.26.14.	Belanja modal Pembangunan sarana kebersihan	
5.2.3.26.15.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung pertemuan / serba guna	
5.2.3.26.16.	Belanja modal rehabilitasi gedung kantor	
5.2.3.26.17.	Belanja modal Pembangunan Mess	
5.2.3.26.18.	Belanja modal Pengadaan konstruksi sarana pengawasan sumber daya ikan	
5.2.3.26.19.	Belanja modal Pengadaan konstruksi TPI	
5.2.3.26.20.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pasar benih ikan	
5.2.3.26.21.	Belanja modal Pembangunan Pasar	
5.2.3.26.22.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sekolah	
5.2.3.26.23.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan objek wisata	
5.2.3.26.24.	Belanja modal Pengadaan konstruksi sarana kesehatan	
5.2.3.26.25.	Belanja modal Pengadaan sarana pendukung	
5.2.3.26.26.	Belanja modal pengadaan asrama	
5.2.3.26.27.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pusat hiburan rakyat	
5.2.3.26.28.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana ibadah	
5.2.3.26.29.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana olahraga	
5.2.3.26.30.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung perhotelan/wisma/losmen/c	
5.2.3.26.31.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung asrama	
5.2.3.26.32.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana industri	
5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte	
5.2.3.26.34.	Belanja modal pembangunan garasi/hanggar	
5.2.3.26.35.	Belanja Modal Pemagaran	
5.2.3.26.36.	Belanja Modal Pembangunan Kebun	
5.2.3.26.37.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Perumahan	
5.2.3.26.38.	Belanja Modal Pembangunan Pagar/ Kandang	
5.2.3.26.39.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Pertanian	
5.2.3.26.40.	Belanja Modal Pengadaan Pos Penyuluh	
5.2.3.26.41.	Belanja Modal Pengadaan Box Culvert	
5.2.3.26.42.	Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame	
5.2.3.26.43.	Belanja Modal pengadaan Ruang Galeri	
5.2.3.2644.	Dst.....	
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan buku matematika	
5.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan buku fisika	
5.2.3.27.03.	Belanja modal Pengadaan buku kimia	
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan buku biologi	
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan buku biografi	
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan buku geografi	
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan buku astronomi	
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan buku arkeologi	

5.2.3.27.09.	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	
5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	
5.2.3.27.11.	Belanja modal Pengadaan buku sejarah	
5.2.3.27.12.	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	
5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	
5.2.3.27.14.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	
5.2.3.27.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	
5.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	
5.2.3.27.17.	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia	
5.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	
5.2.3.27.20.	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan	
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	
5.2.3.27.22.	Belanja modal Pengadaan buku naskah	
5.2.3.27.23.	Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)	
5.2.3.27.24.	Belanja modal Pengadaan mikrofilm	
5.2.3.27.25.	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe	
5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku / perpustakaan	
5.2.3.27.27.	Belanja Modal pengadaan buku raport	
5.2.3.27.28.	Belanja Modal Masterplan	
5.2.3.27.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku Teknis Perikanan	
5.2.3.27.30.	Belanja Modal pengadaan Buku Pengayaan	
5.2.3.27.31.	Dst.....	
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Kesenian	
5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan Pahatan	
5.2.3.28.02.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan Lukisan	
5.2.3.28.03.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	
5.2.3.28.04.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	
5.2.3.28.05.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan	
5.2.3.28.06.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	
5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	
5.2.3.28.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Tradisional	
5.2.3.28.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Musik Drum band	
5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	
5.2.3.28.12.	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	
5.2.3.28.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	
5.2.3.28.14.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	
5.2.3.28.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	
5.2.3.28.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	
5.2.3.28.17.	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia	
5.2.3.28.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	
5.2.3.28.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	
5.2.3.28.20.	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan	
5.2.3.28.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	
5.2.3.28.22.	Belanja modal Pengadaan buku naskah	
5.2.3.28.23.	Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)	
5.2.3.28.24.	Belanja modal Pengadaan mikrofilm	

5.2.3.28.25.	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe	
5.2.3.28.26.	Belanja Modal Buku / perpustakaan	
5.2.3.28.27.	Belanja Modal pengadaan buku raport	
5.2.3.28.28.	Dst.....	
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang	
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan ternak	
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan tanaman	
5.2.3.29.04.	Belanja modal pengadaan ikan	
5.2.3.29.05.	Belanja modal pengadaan pakan ikan	
5.2.3.29.06.	Dst.....	
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan senjata api	
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan radar	
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan mobil water canon	
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan borgol	
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet	
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan perisai/tameng	
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan detektor logam	
5.2.3.30.08.	Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru	
5.2.3.30.09.	Belanja modal Pengadaan pentungan	
5.2.3.30.10.	Belanja modal Pengadaan helm	
5.2.3.30.11.	Belanja modal Pengadaan alarm/sirene	
5.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	
5.2.3.30.13.	Belanja modal Pengadaan baju pelampung/pelampung	
5.2.3.30.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam	
5.2.3.30.15.	Belanja Modal Pengadaan Teropong	
5.2.3.30.16.	Belanja Modal Pengadaan Papan Selancar	
5.2.3.30.17.	Belanja Modal Pengadaan Rompi Anti Huru Hara	
5.2.3.30.18.	Belanja Modal Pengadan Mesin Pemadam Kebakaran	
5.2.3.30.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan SAR	
5.2.3.30.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pelindung Kebakaran	
5.2.3.30.21.	Dst.....	
5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS	
5.2.3.31.01.	Belanja Modal Dana BOS	
5.2.3.31.02.	Dst.....	

E. KODE REKENING PEMBIAYAAN

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	DIGIT
6.1.1.	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1 = Akun Pembiayaan
6.1.1.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	2 = Kelompok Pembiayaan
6.1.1.01.01.	Pajak Daerah	3 = Jenis Pembiayaan
6.1.1.01.02.	Retribusi Daerah	4 = Objek Pembiayaan
6.1.1.01.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 = Rincian Objek Pembiayaan
6.1.1.01.04.	Penerimaan LL PAD yang Sah	
6.1.1.01.05.	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Sisa UYHD	
6.1.1.02.	Pelampuan Penerimaan Dana Perimbangan	
6.1.1.02.01.	Bagi Hasil Pajak	
6.1.1.02.02.	Bagi Hasil SDA	
6.1.1.02.03.	dst	
6.1.1.03.	Pelampuan Penerimaan Lain-lain PD yang sah	
6.1.1.03.01.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	
6.1.1.03.02.	Pendapatan Hibah	
6.1.1.03.03.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja dan Akibat Lainnya	
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	
6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	
6.1.1.04.05.	Belanja Bunga	
6.1.1.04.06.	Belanja Subsidi	
6.1.1.04.07.	Belanja Hibah	
6.1.1.04.08.	Belanja Bantuan Sosial	
6.1.1.04.09.	Belanja Bagi Hasil	
6.1.1.04.10.	Belanja Bantuan Keuangan	
6.1.1.04.11.	Belanja Tidak Terduga	
6.1.1.05.	Sisa Dana Yang Belum Dilaksanakan	
6.1.1.05.01.	Sisa Dana JKN FKTP yang belum dilaksanakan	
6.1.1.06.	Sisa Belanja DAK	
6.1.1.06.01.	DAK Bidang Pendidikan	
6.1.1.06.02.	DAK Bidang Kesehatan	
6.1.1.06.03.	DAK Bidang Infrastruktur	
6.1.1.07.	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	
6.1.1.07.01.	Dana Bagi Hasil PBB	
6.1.1.07.02.	Dana Bagi Hasil PPh	
6.1.1.07.03.	Dana Bagi Hasil SDA IUPH	

6.1.1.07.04.	Dana Bagi Hasil SDA SDH	
6.1.1.07.05.	Dana Bagi Hasil DR	
6.1.1.08.	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	
6.1.1.08.01.	Dana Penyesuaian BOS	
6.1.1.08.02.	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD	
6.1.1.08.03.	Dana Penyesuaian Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD	
6.1.1.09.01.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah	
6.1.1.10.	Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	
6.1.1.10.01.	Penyertaan Modal yang tidak terealisasi	
6.1.1.10.02.	Utang Pihak ketiga yang tidak terealisasi	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.1.04.15.	Dst.....	
6.1.1.05.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	
6.1.1.05.01.	Uang jaminan	
6.1.1.05.02.	Potongan Taspen	
6.1.1.05.03.	Potongan Beras	
6.1.1.05.04.	Askes	
6.1.1.05.05.	SP2D yang Tidak Cair	
6.1.1.05.06.	Dst.....	
6.1.1.06.	Kegiatan lanjutan	
6.1.1.06.01.	Penyedia Lahan untuk Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pemerintahan	
6.1.1.06.02.	Pembangunan Jalan	
6.1.1.06.03.	Pembangunan dan rehabilitasi bangunan irigasi	
6.1.1.06.04.	Rehabilitasi tanggul kali laya	
6.1.1.06.05.	Rehabilitasi permanen saluran drainase/irigasi (penanggulangan pasca banjir)	
6.1.1.06.06.	Dst.....	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.01.	Pencairan Dana Cadangan nomor	
6.1.2.01.02.	Dst.....	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.3.01.	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	
6.1.3.01.01.	BUMD	
6.1.3.01.02.	Dst.....	
6.1.3.02.	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
6.1.3.02.01.	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
6.1.3.02.02.	Dst.....	

6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
6.1.4.01.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
6.1.4.01.01.	Penerusan pinjaman	
6.1.4.01.02.	Dst.....	
6.1.4.02.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	
6.1.4.02.01.	Pemerintah daerah	
6.1.4.02.02.	Dst.....	
6.1.4.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	
6.1.4.03.01.	Bank	
6.1.4.03.02.	Dst.....	
6.1.4.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
6.1.4.04.01.	Lembaga keuangan bukan bank	
6.1.4.04.02.	Dst.....	
6.1.4.05.	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah	
6.1.4.05.01.	Obligasi	
6.1.4.05.02.	Dst.....	
6.1.4.05.	Dst.....	
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.5.01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.5.01.01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.....	
6.1.5.01.02.	Dst.....	
6.1.5.02.	Dst.....	
6.1.6.	Penerimaan piutang daerah	
6.1.6.01.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	
6.1.6.01.01.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah	
6.1.6.01.02.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah	
6.1.6.01.03.	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah	
6.1.6.01.04.	Dst.....	
6.1.6.02.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.1.6.02.01.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.1.6.02.02.	Dst.....	
6.1.6.03.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	
6.1.6.03.01.	Pemerintah daerah	
6.1.6.03.02.	Dst.....	
6.1.6.04.	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	

6.1.6.04.01.	Bank	
6.1.6.04.02.	Dst.....	
6.1.6.05.	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
6.1.6.05.01.	Lembaga keuangan bukan bank	
6.1.6.05.02.	Dst.....	
6.1.6.06.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
6.1.6.06.01.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
6.1.6.06.02.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	
6.1.6.06.03.	Dst.....	
6.1.6.07.	Dst.....	
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.02.	Dst.....	
6.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	
6.2.2.01.	Badan usaha milik pemerintah (BUMN)	
6.2.2.01.01.	Penyertaan Modal	
6.2.2.01.02.	Dst.....	
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	
6.2.2.02.01.	Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Kalbar	
6.2.2.02.02.	Penyertaan Modal Laba ditahan Pada PT. Bank Kalbar	
6.2.2.02.03.	Dst.....	
6.2.2.03.	Badan usaha milik swasta	
6.2.2.03.01.	Pemberian Pinjaman	
6.2.2.03.02.	Dst.....	
6.2.2.04.	Dana Bergulir	
6.2.2.04.01.	Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat	
6.2.2.04.02.	Dst.....	
6.2.2.05.	Dst.....	
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	
6.2.3.01.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	
6.2.3.01.01.	Penerusan pinjaman	
6.2.3.01.02.	Dst....	
6.2.3.02.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain	

6.2.3.02.01.	Pemerintah daerah	
6.2.3.02.02.	Dst....	
6.2.3.03.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank	
6.2.3.03.01.	Bank	
6.2.3.03.02.	Dst....	
6.2.3.04.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	
6.2.3.04.01.	Lembaga keuangan bukan Bank	
6.2.3.04.02.	Dst....	
6.2.3.05.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	
6.2.3.05.01.	Penerusan pinjaman	
6.2.3.05.02.	Dst....	
6.2.3.06.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain	
6.2.3.06.01.	Pemerintah daerah	
6.2.3.06.02.	Dst....	
6.2.3.07.	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	
6.2.3.07.01.	Bank	
6.2.3.07.02.	Dst....	
6.2.3.08.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.08.01.	Lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.08.02.	Badan/Swasta/Lembaga	
6.2.3.08.03.	Dst....	
6.2.3.09.	Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo	
6.2.3.09.01.	Obligasi atas nama	
6.2.3.09.02.	Obligasi nomor	
6.2.3.09.03.	Dst	
6.2.3.10.	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo	
6.2.3.10.01.	Obligasi atas nama	
6.2.3.10.02.	Obligasi nomor	
6.2.3.10.03.	Dst	
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.4.01.	Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah	
6.2.4.01.01.	Pemerintah	
6.2.4.01.02.	Dst	
6.2.4.02.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain	
6.2.4.02.01.	Pemerintah daerah ...	

6.2.4.02.02.	Unit Kerja Pemerintah Daerah	
6.2.4.02.03.	Dst	
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.01.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1.01.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1.01.02.	Dst	

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

MARIUS MARCELLUS TJ.